

**PERGESERAN RELASI TINDAKAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR PADA MASA TRANSISI PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT
TANGKAP CANTRANG DI PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA,
KELURAHAN MAYANGAN, KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Sosiologi pada Bidang Minat Sosiologi Lingkungan

Disusun Oleh :

CHATERINA ERVITA PRAMESWARI

NIM. 135120107111029



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PERGESERAN TINDAKAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR PADA
MASA TRANSISI PELARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI
PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA, KELURAHAN MAYANGAN, KOTA
PROBOLINGGO**

Disusun oleh:

Chaterina Ervita Prameswari 135120107111029

Telah Diuji dan Dinyatakan LULUS dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal: 9 Januari 2018


Tim Penguji

Pembimbing 1



Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 19740308 200501 2 001

Pembimbing 2




Genta Mahardhika Rozalinna, S.sos., MA
NIK. 201503 891128 2 001

Anggota penguji 1



Nike Kusumawanti, S.Sos., MA
NIP. 19830112 201504 2 001

Anggota penguji 2



Ahmad Imron Rozuli, SE., M.Si
NIP. 19740107 200601 1 001

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Unti Ludigdo. Ak
NIP. 19690814 199402 1 001


HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang beridentitas dibawah ini:

Nama : Chaterina Ervita Prameswari
NIM : 135120107111029
Jurusan/ Konsentrasi : Sosiologi/ Sosiologi Lingkungan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pergeseran Tindakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pada Masa Transisi Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo” adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya milik sendiri di dalam skripsi ini ditandai dan diberikan keterangan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

 ng, Februari 2018
Chaterina Ervita Prameswari

HALAMAN PERSETUJUAN

PERGESERAN TINDAKAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR PADA MASA TRANSISI PELARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA, KELURAHAN MAYANGAN, KOTA PROBOLINGGO

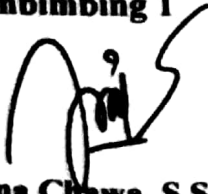
Disusun oleh:

Chaterina Ervita Prameswari

135120107111029

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Diujikan

Pembimbing 1



Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 19740308 200501 2 001

Pembimbing 2



Genta Mahardhika Rozalinna, S.sos., MA
NIK. 201503 891128 2 001

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Relasi antar aktor sebelum pelarangan cantrang.....	88
Bagan 2: Relasi antar aktor di masa transisi	90
Bagan 3: Tindakan ekonomi bentuk dari tindakan sosial	94
Bagan 4: Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial	104
Bagan 5: Institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial ..	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Keterlekatan-Ketidakterlekatan Tindakan Ekonomi dari Polanyi, dkk.....	25
Gambar 2: Keterlekatan kuat dan keterlekatan lemah dari suatu tindakan ekonomi	26
Gambar 3: Detail alat penangkapan cantrang.....	37
Gambar 5: Peta Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo	61

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	12
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori.....	22
2.2.1 Teori Tindakan Ekonomi dengan konsep Keterlekatan dan Tiga Proposisi utama	22
2.3 Definisi Konseptual.....	31
2.3.1 Masyarakat Pesisir	31
2.3.2 Cantrang sebagai Alat Tangkap	36
2.3.3 Pergeseran Relasi	38
2.4 Alur Berpikir	43
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Metode dan Pendekatan Penelitian	43
3.3 Fokus Penelitian	45
3.4 Subyek Penelitian.....	46
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	48
3.5.1 Lokasi Penelitian.....	48
3.5.2 Waktu Penelitian	48
3.6 Jenis dan Sumber Data	49
3.6.1 Data Primer	49
3.6.1 Data Sekunder	51
3.7 Teknik Penentuan Informan	51
3.7.1 Nelayan Besar	51

3.7.2 Nelayan Kecil.....	52
3.7.3 Cantrang	53
3.7.4 <i>Pangamba'</i>	53
3.7.5 Tengkulak	53
3.7.6 Pemerintah	54
3.8 Teknik Analisa Data.....	56
3.9 Proposisi Penelitian.....	59
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Mayangan dan Pelabuhan Tanjung Tembaga.....	61
4.2 Keadaan Penduduk.....	65
4.3 Polemik Peraturan Menteri No 02 Tahun 2015	70
4.4 Gambaran Umum Informan	78
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Relasi Antar Aktor di Pelabuhan Tanjung Tembaga Sebelum Pelarangan Alat Tangkap Cantrang	83
5.2 Tindakan Ekonomi Nelayan Pada Masa Transisi	88
5.2.1 Tindakan Ekonomi Merupakan Bentuk Tindakan Sosial	97
5.2.2 Tindakan Ekonomi Disituasikan Secara Sosial	106
5.2.3 Institusi Ekonomi Dikonstruksi Secara Sosial	113
5.3 Bentuk Keterlekatan Antara Aktor di Pelabuhan Tanjung Tembaga.....	118
 BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	121
6.2 Saran.....	122
 DAFTAR PUSTAKA	124
 LAMPIRAN	
Lampiran 1 Guide Interview	125
Lampiran 2 Dokumentasi	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan dengan penelitian terdahulu	22
Tabel 2: Skema alur berpikir	43
Tabel 3: Kategori subyek penelitian	47
Tabel 4: Timeline perencanaan proposal	49
Tabel 5: Timeline perencanaan laporan	49
Tabel 6: Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia.....	65
Tabel 7: Tingkat pendidikan warga Kelurahan Mayangan	67
Tabel 8: Jenis Mata pencaharian dan jumlah penduduk yang bekerja	69

KATA PENGANTAR

Berkah Dalem,

Terima kasih kepada beberapa pihak yang senantiasa membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Pergeseran Tindakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pada Masa Transisi Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.”** Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua yang senantiasa mendukung dengan tulus semua keputusan penulis, terutama dalam menyelesaikan skripsi.
2. Mbak Genta yang senantiasa membimbing, berdiskusi dan memberikan masukan kepada penulis. Ibu Anif yang selalu mempercayakan keputusan kepada penulis dan memberikan kritik saran kepada penulis. Serta Ibu Nike dan Bapak Imron yang telah memberikan ketersediaan waktunya untuk menguji.
3. Informan penelitian yang mau berbagi pendapat dan juga membagikan kegiatan sehari-harinya.
4. Sebagai pecinta Suralisme, penulis mengucapkan terimakasih kepada buku-buku yang selalu menemani, memberi ide dan melayani ketertarikan penulis di bidang sastra. Terima kasih telah menjadi Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup penulis.

5. Pemilik Group “Iwak Nus” yang selalu mendengarkan dan bersedia hidup bersama penulis selama 4 tahun.
6. Defrilla dan Zulfa, yang selalu memberikan ruang kepada penulis untuk menghantui mereka.
7. Pemilik Group “Teman Ghibah” serta teman-teman semuanya yang selalu mendukung dan percaya kepada penulis.

Harapan besar penulis laporan ini akan dapat bermanfaat untuk semuanya, terkhusus adalah untuk penulis sendiri. Penulis juga berharap agar konflik pemerintah khususnya dibidang Perikanan dan Kelautan dengan Masyarakat Pesisir segera mendapatkan jalan keluar. Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam penyusunan laporan ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak.

Malang, Februari 2018



Chaterina Ervita Prameswari

ABSTRAKSI

Chaterina Ervita Prameswari. 2018. Pergeseran Tindakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pada Masa Transisi Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Pembimbing: Anif Fatma Chawa dan Genta Mahardhika Rozalinna

Penelitian ini mengkaji tentang pergeseran tindakan ekonomi masyarakat pesisir. Latar belakang munculnya kajian ini karena letak penelitian yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sehingga membuat masyarakat pesisir memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun terdapat masalah sosial ketika Menteri Kelautan dan Perikanan memberlakukan Peraturan Menteri No 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini membuat masyarakat pesisir yang membangun hubungan kerja sama dengan nelayan cantrang mengalami pergeseran tindakan ekonomi. Sehingga, fokus penelitian ini adalah melihat dampak pelarangan alat tangkap cantrang terhadap tindakan ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah penjadohan pola dan analisis deret waktu.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Pergeseran tindakan ekonomi terjadi ketika tidak berjalannya nelayan cantrang yang menyebabkan ABK cantrang bekerja pada juragan lain seperti nelayan besar, tengkulak dan *pangamba*'. Tengkulak mengalami penurunan hasil tangkap, sehingga membangun kerja sama dengan nelayan kecil. Bentuk keterlekatan adalah keterlekatan relasional karena adanya hubungan personal dengan melibatkan aspek sosial, ekonomi dan Budaya Pandulangan di Pelabuhan Tanjung Tembaga.

Kata Kunci: *Cantrang, Masyarakat Pesisir, Tindakan Ekonomi dan Keterlekatan*

ABSTRACT

Chaterina Ervita Prameswari. 2018. Shift of Economic Action on Coastal Community in Transition Period on Using Ban of Cantrang in a Harbour on Tanjung Tembaga, Mayangan Village, Probolinggo City. Advisor: Anif Fatma Chawa and Genta Mahardhika Rozalinna

Topic of research about shift of economic action on coastal community. The reason of this research is because research location limiting with Madura Strait. So, make coastal community make use of marine resources for the life. However there are social problem when minister of maritime and fishery impose minister regulation No 02 Years 2015 on prohibition of the use of a fishing trawl and seinse net in Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia. This make coastal community that build relation with cantrang fishermen to shift of an economic action. So, the focus of this research is look at the impact a ban on using cantrang of economic action.

The method is qualitative use case study approach. Location is the Harbour of Tanjung Tembaga, Probolinggo city. This research use purposive sampling. Colelecting data with observe, interview and literature study, analysis data with *penjodohan pola* and *analisis deret waktu*.

The result is: that shift economic action when lossing of cantrang fishermen that make laborers work on other skipper, as big fishermen, middleman and *pangamba*'. Middleman make decreased of result, so build cooperation with small fishermen. The personal relationships between actor on involving social aspects, economic and cultural pandulangan in harbour on Tanjung Tembaga that bring relational embedded type.

Keyword: *Cantrang, Coastal Community, Economic Actions and Embeddedness*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

70 persen dari total wilayah yang ada, Indonesia memiliki wilayah laut. Terdapat sekitar 17.500 pulau di Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia (Kinseng, 2014, hal. 3). Kondisi yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan membuat beberapa daerah di Indonesia memiliki kekayaan akan potensi hasil laut. Hal ini terjadi di Kota Probolinggo yang dikenal sebagai wilayah pesisir utara karena berada di sepanjang daerah pesisir utara dan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Keadaan tersebut, membuat beberapa penduduk ini yang kemudian membuat mayoritas penduduk di Kota Probolinggo yang berada di daerah pesisir utara bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang ikan.

Diketahui dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir (Kusnadi, 2002, hal. 5). Dikutip dari Republika, 22 Juni 1993 bahwa desa pesisir masih mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah kemiskinan struktural sehingga menjadikan penduduk di kawasan pesisir harus menanggung beban kehidupan. Pengertian dari masyarakat pesisir bukan hanya pada kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir saja, namun juga dilihat dari kehidupan perekonomiannya yang bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Keberadaan masyarakat pesisir merupakan salah satu masyarakat yang dominan di Indonesia karena merupakan salah satu kalangan masyarakat yang termasuk golongan dengan tingkat kemiskinan terbesar (Kristanto, 2016, hal. 2). Golongan masyarakat pesisir yang dianggap paling memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk keberlangsungan hidupnya adalah nelayan (Kusnadi, 2002, hal. 26). Pekerjaan sebagai nelayan memiliki resiko yang tinggi, karena pada kegiatan

penangkapan ikan bergantung dengan kondisi alam serta peraturan pemerintah dan pada pemasaran hasil tangkapan bergantung kepada nilai pasar yang fluktuatif sehingga menyebabkan nelayan di daerah pesisir berada dalam kondisi perekonomian yang rendah.

Sumber daya alam dan potensi hasil laut yang melimpah tidak sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi pada nelayan di daerah pesisir. Masyarakat nelayan diartikan sebagai kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Hal ini dikarenakan sistem penjualan dan kelembagaan yang berada di daerah pesisir mengalami perubahan yang mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi nelayan (Julianto, 2016, hal. 1861). Sistem penjualan yang dilakukan langsung oleh nelayan dengan menjual ikan yang nilai jualnya rendah serta sistem pembayaran yang tidak langsung merupakan salah satu faktor rendahnya kondisi sosial-ekonomi nelayan. Selain itu, tidak berfungsinya koperasi simpan pinjam membuat nelayan bertumpu kepada tengkulak yang menyediakan peminjaman uang dengan bunga yang tinggi ataupun dengan rasa hutang budi yang membuat nelayan kemudian menjual hasil tangkapannya secara murah kepada tengkulak ataupun investor. Sehingga, dengan menghilangnya lembaga simpan pinjam yang resmi dari pemerintah membuat rasa kolektivitas suatu komunitas dalam nelayan menjadi turun (Julianto, 2016, hal. 1861).

Keterlibatan akan kegiatan penangkapan ikan serta pendistribusian hasil tangkapan tidak lepas dari beberapa aktor nelayan yang terlibat. Pada umumnya masyarakat nelayan terbagi menjadi empat aktor, yaitu nelayan, Anak Buah Kapal (ABK), *Pangamba'* dan Tengkulak. Nelayan terdiri dari nelayan besar dan nelayan kecil atas dasar kepemilikan modal. Anak Buah Kapal (ABK) merupakan nelayan yang terklasifikasi menjadi nelayan buruh dimana aktor ini tidak memiliki modal ekonomi melainkan memiliki ketersediaan

tenaga untuk dijual kepada pemilik modal. *Pangamba*¹ (dalam bahasa madura) yang terbagi menjadi *Amba'an tengah*² dan *Amba'an darat*³. Dari pemilahan ikan yang banyak dilakukan oleh *Amba'an tengah*, hasilnya disalurkan melalui tengkulak yang membeli dalam jumlah banyak untuk dijual ke TPI.

Melihat keadaan nelayan di wilayah pesisir, yaitu memiliki struktur yang menunjukkan stratifikasi berdasarkan kepemilikan modal serta otoritas dan penguasaan akan pasar terjadi pada kehidupan setiap aktor nelayan (Kinseng, 2014, hal. 34). Pada aktor nelayan yang tergabung akan membentuk suatu kelas sosial dan relasi- relasi sosial. Dalam hal inilah, terbentuklah sistem hubungan yang ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan dan kepercayaan. Misalnya pada kelompok nelayan yang dikategorikan sebagai nelayan besar memiliki modal yang cukup besar, yang biasa dinamakan sebagai juragan kapal yang berkuasa penuh kepada ABK, sehingga ABK membutuhkan kepercayaan terhadap juragan kapal agar bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. ABK akan menjual tenaganya untuk bertahan hidup kepada nelayan besar. Kondisi ini membentuk suatu hubungan yang saling bergantung antar aktor nelayan.

Pemanfaatan penggunaan alat tangkap sangat berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan ikan. Alat tangkap yang digunakan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan sangat bermacam-macam dan beragam sesuai kebutuhan dan jenis ombak di laut. Salah satu alat tangkap yang terkenal dan digunakan sebagian besar nelayan di wilayah pesisir utara, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah alat tangkap cantrang (Eka, 2015: 2). Dilihat dari bentuknya alat tangkap cantrang menyerupai payang, tetapi ukuran jaringnya lebih kecil, sekitar 2 inchi. Cantrang sendiri merupakan alat tangkap yang

¹ Pedagang perantara atau penghadang, karena norma-norma tertentu, nelayan tidak dapat secara langsung menjual hasil tangkapannya, tetapi harus menyerahkannya terlebih dahulu kepada pengamba' yang bertindak sebagai pihak yang akan menjualkannya (perantara).

² Sebutan lain bagi *pengamba*' besar yang melakukan transaksi pembelian ikan di tengah laut.

³ Sebutan lain bagi *pengamba*' kecil yang melakukan transaksi jual beli ikan di pinggir pantai, dalam kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Tembaga, pengamba' kecil biasanya di dominasi oleh istri-istri nelayan yang nantinya ikut mempekerjakan istri-istri nelayan lain.

digunakan untuk menangkap sumberdaya perikanan demersal (jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan), terutama ikan dan udang yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (*warp*), pelampung dan pemberat. Daerah penangkapan (*Fishing Ground*) Cantrang tidak jauh dari pantai, pada bentuk dasar perairan berlumpur atau lumpur berpasir dengan permukaan dasar rata. Daerah penangkapan yang baik untuk alat tangkap cantrang harus memenuhi beberapa syarat, yang pertama yaitu dasar perairan yang rata dengan substrat pasir, lumpur atau tanah liat berpasir, dan yang terakhir adalah dengan arus laut yang cukup kecil (< 3 knot) serta cuaca yang terang tidak berangin kencang (Eka, 2015: 2).

Penggunaan alat tangkap cantrang sangat populer dikalangan nelayan pesisir utara, namun alat tangkap cantrang ini mampu merusak ekosistem serta biota laut karena proses penangkapan yang mirip pukot harimau. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang, sehingga dasar laut teraduk dan memutuskan rantai makanan yang mengakibatkan jumlah ikan berkurang. Hal ini menyebabkan juga pada turunnya hasil produksi perikanan karena adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang.

Keadaan penggunaan alat tangkap cantrang menjadi tidak selektif dalam komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas produksi perikanan. Sehingga, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang dan Pukat yang akan diberlakukan secara resmi pada tanggal 1 Januari 2018. Peraturan ini sejalan dengan Pilar

Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yaitu keberlanjutan (*sustainability*) sumber daya ikan yang dapat membuat kualitas perikanan Indonesia meningkat di mata dunia, sehingga pertumbuhan ekonomi sektor perikanan Indonesia semakin kuat dengan berbasis ekosistem.

Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) tidak langsung diberlakukan secara keras, namun diberikan kelonggaran dalam uji kebijakan. Dalam melakukan tahapan peraturan yang akan diberlakukan secara resmi, KPP mengeluarkan Surat edaran Nomor: 72/ MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Perairan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)⁴. KKP melakukan proses pendampingan dan pergantian dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang khusus menangani penggantian alat tangkap cantrang. Pokja ini dibentuk sesuai dengan amanat surat edaran yang memfokuskan pada pendampingan dan sosialisasi kepada seluruh aparat di Indonesia dalam waktu dua tahun hingga 31 Desember 2017. Saat pokja terbentuk, tim akan bekerja bersama dengan aparat dan juga pemerintah daerah yang terlibat langsung di lapangan. Dalam pendampingan tersebut, tim yang bekerja sama memberikan pemahaman tentang relokasi daerah penangkapan ikan, percepatan perizinan alat penangkapan ikan pengganti yang diizinkan, dan memfasilitasi penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) pengganti. Selain itu, dalam melakukan pendampingan, KPP memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Melihat keadaan nelayan di wilayah pesisir serta polemik Peraturan Menteri KKP yang telah ditetapkan, dalam hal ini dapat diambil contoh pada nelayan yang berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Peneliti mengangkat isu penelitian di wilayah Kelurahan Mayangan di Kota Probolinggo yang

⁴ dikutip pada KKP.go.id tentang Peraturan Menteri No 02 Tahun 2015 diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12.37 wib

merupakan salah satu Kota di Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 56,67 km² dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.797 jiwa/ km²⁵. Selain itu, Kelurahan Mayangan terletak pada bagian utara di Kota Probolinggo. Sehingga letaknya yang berbatasan langsung dengan Selat Madura di bagian utara menyebabkan sektor perikanan sebagai sektor yang dominan di kawasan pesisir dan laut. Ditambah lagi dengan adanya fasilitas berupa Pelabuhan Tanjung Tembaga mampu melayani hasil tangkap dan juga pendistribusian ikan serta barang yang akan dikirim keluar kota hingga Pulau. Potensi perikanan yang utama didominasi oleh perikanan laut dan tambak yang berada di sebelah utara Kelurahan Mayangan dan berkembang linier di sepanjang pantai.

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Madura, membuat masyarakat di Kelurahan Mayangan memanfaatkan hasil dari laut dengan berprofesi sebagai nelayan ataupun pedagang ikan. Nelayan yang berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan ini terbagi menjadi nelayan besar, nelayan cantrang dan nelayan kecil. Pembagian ini dibentuk berdasarkan kepemilikan modal dan juga teknologi yang dimiliki. Nelayan besar merupakan nelayan yang memiliki kapal besar dengan teknologi mesin yang dikemudikan oleh nahkoda dan mempekerjakan ABK diatas 50 orang. Sedangkan Nelayan cantrang merupakan nelayan yang berada di kawasan pesisir utara dengan penggunaan alat tangkap berupa cantrang dan mempekerjakan ABK. Biasanya dalam melakukan penangkapan ikan, nelayan cantrang menggunakan kapal gardan⁶. Sedangkan nelayan kecil adalah nelayan yang memiliki kapal kecil seperti sampan, tongak dan mempekerjakan kurang dari 50 orang (dalam kasus yang terjadi tidak sampai 50 orang) dengan menggunakan alat tangkap seperti jaring ikan dan tombak. Selain itu, terdapat aktor lain yaitu nelayan buruh (ABK) yang bekerja kepada nelayan besar,

⁵ dikutip pada kotaprobolinggo.bps.go.id diakses pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 12.55 wib

⁶ Perahu nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang/ sejenisnya yang dalam sekali melaut memerlukan 15-25 orang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.

nelayan cantrang dan nelayan kecil, *Pangamba'* yang dalam subjek penelitian dimasukkan hanya *Amba'an tengah dan Tengkulak*.

Turunnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 Tahun 2015 yang melarang penggunaan alat tangkap pukot dan hela yang diantaranya adalah cantrang memunculkan masalah yang dihadapi oleh nelayan cantrang. Masalah yang terjadi bukan hanya dampak sosial namun juga dampak ekonomi karena nelayan cantrang merasa sangat dirugikan dan mengalami banyak penurunan pada hasil tangkapannya. Hal ini kemudian akan berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi antar aktor seperti tidak berlayarnya kapal cantrang yang membuat tengkulak kekurangan ikan. Selain itu, tidak bekerjanya nelayan buruh yang bekerja pada nelayan cantrang dalam penangkapan ikan karena nelayan cantrang tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan lagi melainkan berpindah statusnya menjadi nelayan buruh yang bekerja kepada nelayan besar. Dalam hal inilah yang kemudian membedakan posisi dari nelayan cantrang dengan nelayan buruh, yang semula kedua aktor tersebut saling berelasi dalam kegiatan penangkapan ikan menjadi sama posisinya dan memunculkan relasi baru dengan nelayan besar. Untuk mengurangi rugi dan menambah penghasilan nelayan cantrang ini mereka melakukan peminjaman uang kepada *Rentenir/ bank thithil* dan juga menjalin relasi kepada nelayan besar dalam kegiatan penangkapan ikan. Uniknyalah dalam pengembalian pinjaman kepada nelayan besar, nelayan cantrang ini mengangsur dalam bentuk tenaga untuk membantu nelayan besar melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah besar.

Memfokuskan pada dampak teknologi terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan cantrang dan nelayan buruh pada kegiatan penangkapan ikan, akan terjadi tindakan ekonomi yang bukan hanya berasal dari kepentingan ekonomi saja, namun juga kondisi sosial yang berpengaruh terhadap jalannya tindakan ekonomi para aktor yang terlibat. Hubungan yang terjadi antara nelayan cantrang dan nelayan buruh dengan nelayan besar

menjadi berelasi dan mengalami pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap pelarangan penggunaan cantrang dimana nelayan cantrang menjadi nelayan buruh yang bekerja kepada nelayan besar sebagai aktor yang memiliki modal besar. Selain itu, dalam hubungan sosial antara kedua belah pihak dapat dijelaskan ketika nelayan buruh merasa terbantu dengan ikut serta dalam kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan besar karena terdapat penambahan pendapatan. Hal inilah yang juga terjadi kepada nelayan besar ketika mempekerjakan nelayan buruh di saat genting karena secara tidak langsung ada kenaikan status sosial yang dialami oleh nelayan besar sehingga adanya penghargaan di mata kelompok nelayan lain.

Kerja sama yang dilakukan pada kegiatan penangkapan ikan antara nelayan buruh dengan nelayan besar tentunya akan menghasilkan tindakan yang dilakukan berulang-ulang karena adanya rasa saling membutuhkan serta membentuk relasi antara kedua aktor. Dengan menggunakan teori dari Granovetter yang melihat bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah keterlekatan (*embeddednes*) yang berkaitan untuk mengkaji tindakan ekonomi (Jarot, 2015: 7). Sehingga, dari latar belakang yang sudah dijelaskan mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana tindakan sosial ekonomi yang dilakukan aktor nelayan dalam membentuk relasi serta melakukan kerjasama pada kegiatan penangkapan ikan ketika munculnya larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang telah lama digunakan oleh nelayan di kawasan pesisir utara Kota Probolinggo. Berangkat dari fenomena dan fokus yang telah ditetapkan, peneliti mengambil judul yaitu ***“Pergeseran Relasi Pada Tindakan Sosial-Ekonomi Nelayan Pada Masa Transisi Pelarangan Penggunaan Cantrang (Studi kasus Pada Nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi nelayan pada masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menggambarkan adanya pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi nelayan pada masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian serta alasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Sosiologi Ekonomi yang dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi nelayan pada masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Nelayan Cantrang, untuk mengetahui langkah-langkah dan menyusun strategi dalam permasalahan tentang pelarangan cantrang.
2. Bagi Dinas Perikanan Kota Probolinggo, untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengevaluasi serta melakukan pendampingan pada masyarakat nelayan yang masih terdampak atas pelarangan cantrang.
3. Bagi Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur, untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan cantrang serta kebijakan UU No. 23 tahun 2014 yang berpengaruh atas kelautan di seluruh wilayah Jawa Timur pada masyarakat nelayan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua acuan sebagai dasar acuan dalam memposisikan penelitian yang akan dilakukan kali ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Jarot Wisnu Kristanto (2016), dengan judul penelitian Keterlekatan Pada Tindakan Ekonomi Nelayan Kelompok Bina Lestari Pada Kegiatan Penangkapan Ikan Dalam Upaya Pemanfaatan Nilai Ekonomi Lingkungan di Pesisir Pantai Tamban (Studi Kasus di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). Penelitian ini memfokuskan pada tindakan ekonomi para nelayan pada kegiatan penangkapan ikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai analisis adalah Teori tindakan ekonomi menggunakan konsep keterlekatan dan tiga proposisi utama oleh Granoveter. Sedangkan metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data yang menggunakan deskriptif analisis (Kristanto, 2016, hal. 13-14).

Hasil dari penelitian yang telah di dapatkan adalah sebagai berikut: pertama, tindakan ekonomi antara nelayan besar dengan nelayan kecil pada kegiatan penangkapan ikan dalam upaya pemanfaatan nilai ekonomi lingkungan di Pantai Tamban merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dari aktor-aktor yang terlibat dalam menentukan tindakan ekonomi yang akan dilakukan (Kristanto, 2016). Kedua, tindakan ekonomi antara nelayan besar dengan nelayan kecil pada kegiatan penangkapan ikan merupakan bentuk tindakan sosial dimana motif dari nelayan besar dan nelayan kecil membentuk sebuah relasi kerja sama pada kegiatan penangkapan ikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata (Kristanto, 2016).

Penelitian kedua dilakukan oleh Maya Resty Andryana (2016), dengan judul penelitian Strategi Adaptasi Nelayan dalam Menghadapi Peraturan Pelarangan Cantrang. Dalam penelitian ini difokuskan pada analisis hubungan kondisi ekonomi nelayan dan tingkat persepsi nelayan terhadap peraturan larangan cantrang dimana akan dipaparkan bagaimana hubungan persepsi nelayan dalam peraturan larangan cantrang dengan kondisi ekonomi nelayan serta strategi adaptasi yang dilakukan untuk bertahan hidup (Andryana, 2015, hal. 21). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan didukung oleh data kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan dua konsep, yaitu konsep strategi dari Scoones (1998) dan konsep persepsi dari Vander (1984).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Maya Resty Andryana adalah sebagai berikut: Pertama, Persepsi nelayan tentang penggunaan cantrang yang didapat adalah berbeda-beda, hal ini tergantung dengan kepentingan masing-masing serta pengalaman yang dimiliki. Dimana disebutkan persepsi negatif terhadap peraturan larangan cantrang dimiliki oleh nelayan pengguna cantrang dan persepsi positif terhadap larangan cantrang didominasi oleh nelayan bukan pengguna cantrang. Berdasarkan hasil uji model *Rank Spearman* dengan *IBM SPSS Statistics 21* dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara persepsi nelayan dan lapisan ekonomi nelayan yang rendah (Andryana, 2015, hal. 59). Kedua, ditunjukkan bahwa lapisan ekonomi nelayan pengguna cantrang dibagi berdasarkan status kepemilikan kapal bagi nelayan pengguna cantrang, yang terdiri dari nelayan pengguna cantrang yang memiliki kapal sendiri dan nelayan ABK kapal cantrang (Andryana, 2015). Nelayan pemilik kapal cantrang berada pada dua lapisan yaitu lapisan ekonomi atas dan lapisan ekonomi bawah. Perbedaan tersebut dikarenakan nelayan pemilik pada lapisan atas memodifikasi kapalnya dan melakukan *markdown*, sehingga pendapatannya lebih tinggi dibandingkan nelayan pemilik yang

masih menggunakan kapal es. Berdasarkan analisis data menggunakan uji *Rank Spearman*, lapisan ekonomi nelayan bukan pengguna cantrang memiliki korelasi rendah negatif dengan strategi diversifikasi alat tangkap dan lapisan ekonomi nelayan pengguna cantrang memiliki korelasi rendah negatif dengan strategi jaringan sosial (Andryana, 2015, hal. 60).

Hasil yang terakhir disebutkan bahwa saat ini, nelayan belum memiliki strategi adaptasi terhadap peraturan larangan cantrang yang akan diterapkan pada 1 Januari 2017. Namun, nelayan-nelayan tersebut memiliki strategi adaptasi yang dilakukan untuk bertahan hidup ketika tidak melaut atau saat cuaca tidak menentu. Nelayan bukan pengguna cantrang cenderung heterogen dalam pemilihan strategi adaptasi. Hal itu dilakukan karena tingkat pendapatan nelayan pengguna cantrang lebih rendah daripada nelayan pengguna cantrang. Sebaliknya, strategi adaptasi yang dilakukan oleh nelayan pengguna cantrang cenderung homogen (Andryana, 2015, hal. 60).

Persamaan yang terdapat pada dua penelitian yang dijadikan bahan referensi dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang dilakukan oleh (Kristanto, 2016) melihat keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi pada nelayan di wilayah pesisir selatan Pantai Tamban. Keterlekatan yang terjadi antar nelayan besar dengan nelayan kecil membentuk suatu relasi yang berdasar pada tindakan ekonomi dan tindakan sosial. Tindakan ekonomi nelayan besar dan nelayan kecil yang melakukan kerja sama dalam kegiatan penangkapan hasil laut berangkat dari kepentingan sosial yaitu ketika nelayan besar mempunyai sumber daya berupa modal yang dapat dipinjamkan kepada nelayan kecil dan proses pengembalian modal yang tidak terbatas oleh waktu membuat nelayan kecil memiliki hutang sosial. Dari semua kondisi sosial yang terjadi antara nelayan besar dengan nelayan kecil secara tidak langsung memunculkan interaksi sosial melalui hubungan timbal balik. Berawal dari tindakan sosial menghasilkan tindakan ekonomi

dalam kegiatan penangkapan hasil laut yang menjadi kontrol sosial dalam melakukan tindakan kerja sama. Hal ini juga sama dilakukan oleh peneliti dengan melihat keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi nelayan di wilayah pesisir utara Pelabuhan Tanjung Tembaga. Dalam hal ini, dilihat juga keterlekatan yang terjadi dengan dimulai dari tindakan sosial sebagai kontrol sosial antara aktor nelayan yang menghasilkan tindakan ekonomi.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Andryana, 2015) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya masalah penelitian yang sama ditunjukkan dengan pelarangan alat tangkap cantrang yang akan mempengaruhi persepsi serta strategi masyarakat nelayan dalam tindakan ekonomi serta sosial nelayan Kabupaten Tegal, Jawa Barat. Dalam fenomena yang terjadi diperlihatkan bahwa masyarakat nelayan Kabupaten Tegal menggunakan alat tangkap cantrang, namun ketika terjadi pelarangan tentunya pendapatan masyarakat nelayan mengalami penurunan dan tidak bekerjanya nelayan atau berpindah kerjanya nelayan menjadi pedagang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perubahan sosial-ekonomi pada masyarakat nelayan Kabupaten Tegal, Jawa Barat. Penelitian yang akan dilakukan peneliti juga berfokus melihat pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi pada masa transisi pelarangan alat tangkap cantrang dimana masyarakat nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo menggunakan cantrang sebagai alat tangkap hasil laut. Namun yang terjadi di masa transisi ini membuat aktor nelayan harus mengganti sistem yang telah dilakukan sebelumnya sehingga merubah relasi yang telah terjadi antar aktor yang terlibat.

Perbedaan antara penelitian ini dan dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Kristanto, 2016) hanya menggambarkan relasi pada tindakan sosial-ekonomi, keterlekatan antara nelayan besar dengan nelayan kecil di Pantai Tamban dan hanya melihat relasi dalam sektor perikanan melalui penangkapan

hasil laut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggambarkan pergeseran relasi antara aktor nelayan yang berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo yang lebih kompleks karena masuknya Peraturan Pemerintah KPP No. 02 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat dan Cantrang. Selain itu, peneliti juga melihat relasi di sektor perikanan melalui penangkapan hasil laut dan sektor perdagangan melalui jual beli hasil laut/ distribusi. Dari perbedaan ini, penelitian yang akan dilakukan menjelaskan bagaimana dampak teknologi terkait dengan kehidupan sosial-ekonomi nelayan, sehingga keterlekatan sosial ekonomi akan mengalami perubahan di masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andryana, 2015) adalah dimana tidak menggambarkan secara detail tentang relasi antar aktor nelayan dan juga tindakan sosial-ekonomi yang terjadi antar nelayan besar dan kecil di Kabupaten Tegal. Selain itu, hanya melihat relasi yang telah dibangun pada nelayan saja di sektor perikanan.

Secara keseluruhan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menunjukkan tentang perubahan dalam relasi antar nelayan baik di bidang perikanan serta pendistribusian hasil tangkap ketika adanya permasalahan akan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Alat Tangkap Cantrang. Sedangkan kondisi yang dialami dalam penelitian ini adalah masa transisi dimana Peraturan akan diberlakukan awal tahun 2018.

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut:

Komponen	Jarot Wisnu Kristanto (2016)	Maya Resty Andryana (2015)	Chaterina Ervita Prameswari (2018)
Judul Penelitian	Keterlekatan Pada Tindakan Ekonomi Nelayan Kelompok Bina Lestari Pada Kegiatan Penangkapan	Strategi Adaptasi Nelayan dalam Menghadapi Peraturan Pelarangan Cantrang	Pergeseran relasi pada Tindakan Sosial-Ekonomi Nelayan Pada Masa Transisi Pelarangan

	Ikan Dalam Upaya Pemanfaatan Nilai Ekonomi Lingkungan di Pesisir Pantai Tamban (Studi Kasus di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)		Alat Tangkap Cantrang (Studi kasus pada Nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo)
Fokus Penelitian	Tindakan ekonomi nelayan	Persepsi dan strategi nelayan akan larangan cantrang	Dampak teknologi terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan
Teori Yang Digunakan	Teori tindakan sosial menggunakan konsep keterlekatan Granovetter	konsep strategi dari Scoones (1998) dan konsep persepsi dari Vander (1984)	Teori tindakan sosial menggunakan konsep keterlekatan Granovetter
Lokasi Penelitian	Pantai Tamban, Kabupaten Malang	Kota Tegal, Jawa Tengah	Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo
Metode Pengumpulan Data	Kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus	Kuantitatif menggunakan olah data kualitatif	Kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus
Teknik Analisis Data	Menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis.	Menggunakan teknik analisis data korelasi melalui SPSS	Menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis.
Hasil Penelitian	1. tindakan ekonomi antara nelayan besar dengan nelayan kecil pada kegiatan penangkapan ikan dalam upaya pemanfaatan nilai ekonomi lingkungan di Pantai Tamban merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dari aktor-aktor yang terlibat dalam menentukan tindakan ekonomi yang akan	1. Persepsi nelayan tentang penggunaan cantrang yang didapat adalah berbeda-beda, hal ini tergantung dengan kepentingan masing-masing serta pengalaman yang dimiliki. 2. lapisan ekonomi nelayan pengguna cantrang dibagi berdasarkan status kepemilikan kapal nelayan	1. Pergesaran relasi terjadi dimana tengkulak yang saat dulu hanya mengambil hasil tangkapan dari nelayan besar dan nelayan cantrang, kini membangun relasi dengan nelayan kecil untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan dan pembatasan

	<p>dilakukan.</p> <p>2. Tindakan ekonomi antara nelayan besar dengan nelayan kecil pada kegiatan penangkapan ikan merupakan bentuk tindakan sosial.</p> <p>3. Tindakan ekonomi antara nelayan besar dengan nelayan kecil pada kegiatan penangkapan ikan disituasikan secara sosial.</p> <p>4. Institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial pada kegiatan penangkapan ikan dimana relasi antara nelayan besar dengan nelayan kecil dalam bentuk kerja sama pada kegiatan penangkapan ikan dikonstruksi secara sosial melalui institusi ekonomi berupa agenda syukuran nelayan Kelompok Nelayan Bina Lestari.</p> <p>5. Bentuk keterlekatan nelayan besar dengan nelayan kecil pada kegiatan penangkapan hasil laut merupakan keterlekatan sosial dimana terjadi kepercayaan antara nelayan besar dengan nelayan kecil</p>	<p>pengguna cantrang, yang terdiri dari nelayan pengguna cantrang yang memiliki kapal sendiri dan nelayan ABK kapal cantrang.</p> <p>3. nelayan belum memiliki strategi adaptasi terhadap peraturan larangan cantrang yang akan diterapkan pada 1 Januari 2017. Namun, nelayan-nelayan tersebut memiliki strategi adaptasi yang dilakukan untuk bertahan hidup ketika tidak melaut atau saat cuaca tidak menentu.</p>	<p>hasil tangkapan laut yang dilakukan oleh nelayan cantrang, sehingga mengakibatkan tengkulak semakin hari mengalami penurunan hasil tangkap untuk didistribusikan.</p> <p>2. Jenis keterlekatan yang terjadi pada masa transisi ini adalah keterlekatan relasional dimana relasi ini terjadi karena adanya hubungan personal antar aktor dengan melibatkan aspek sosial, ekonomi dan budaya Pandalungan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.</p>
Persamaan	Melihat keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi pada nelayan di wilayah pesisir selatan Pantai Tamban.	Masalah penelitian yang ditunjukkan dengan adanya Permen no 02 tahun 2015 tentang	Melihat keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi antar aktor nelayan setelah diberlakukannya

		larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pukat yang akan mempengaruhi persepsi serta strategi masyarakat nelayan dalam tindakan ekonomi serta sosial nelayan Kabupaten Tegal, Jawa Barat.	Permen no 02 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pukat
Perbedaan	Hanya menggambarkan relasi pada tindakan sosial-ekonomi dan keterlekatan antara nelayan besar dengan nelayan kecil di Pantai Tamban dalam sektor perikanan melalui penangkapan ikan	Tidak menggambarkan secara detail tentang relasi antar aktor nelayan dan juga tindakan sosial-ekonomi yang terjadi antar nelayan besar dan kecil di Kabupaten Tegal	Adanya Peraturan Pemerintah sebagai fokus penelitian untuk melihat bagaimana pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi aktor nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Selain itu, peneliti juga melihat dalam sektor perikanan serta sekor perdagangan

Tabel 1: Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu
(sumber : data diolah peneliti, tahun 2017)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Tindakan Ekonomi dengan Konsep Keterlekatan (*Embeddedness*) dan Tiga Proposisi Utama

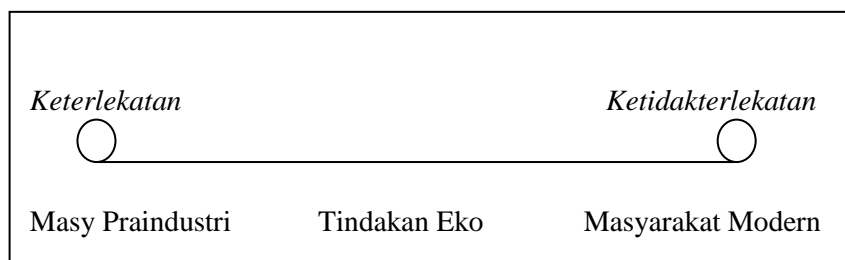
Granovetter (1985) mengajukan konsep keterlekatan untuk menjawab pertanyaan klasik dari teori sosial yang digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan sosial (Damsar, 1997, hal. 33). Konsep keterlekatan, menurut Granovetter, merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (*embeddedness*) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor (Damsar, 1997, hal. 33). Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktor individual, tetapi juga

perilaku ekonomi yang cukup luas dengan melibatkan penetapan harga dan institusi-institusi ekonom, yang tergabung di dalam suatu jaringan hubungan sosial. Jaringan hubungan sosial dimaksudkan sebagai suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama diantara individu-individu atau kelompok-kelompok (Granovetter dan Swedberg, 1992: 9 dalam (Damsar, 1997, hal. 33-34)). Pengekspresian interaksi dengan orang lain inilah menjadikan “terlekat” karena merupakan tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan. Pentingnya cara seseorang terlekat dalam jaringan hubungan sosial yang akan menentukan banyaknya tindakan sosial dan jumlah dari hasil institusional. Misalnya, apa yang terjadi dalam produksi, distribusi dan konsumsi sangat banyak dipengaruhi oleh keterlekatan orang dalam hubungan sosial (Swedberg, 1990) dalam (Damsar, 1997, hal. 34).

Karya Granovetter yang paling penting terkait dengan diskusi keterlekatan muncul dalam artikelnya pada tahun 1985 “*Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*” yang dimana merupakan katalis untuk kemunculan sosiologi ekonomi baru, dan merupakan artikel yang sering dikutip dalam sosiologi ekonomi kontemporer (Swedberg, 2003, hal. 35). Menurut Granovetter, diantara aktor terdapat hubungan yang dekat dan renggang atau jauh dengan hubungan yang lain, yang disebut keterlekatan relasional dan keterlekatan struktural (Swedberg, 2003, hal. 36). Granovetter dalam artikelnya tentang keterlekatan menambahkan hubungan posisi dari keterlekatan dengan teori institusi, seperti yang dijelaskan dalam *The Social Construction of Reality* (1966) oleh Peter Berger dan Thomas Luckman dimana Granovetter berpendapat bahwa institusi dapat dilihat sebagai sebuah jaringan yang beku. Interaksi yang terjadi diantara manusia secara bertahap memperoleh

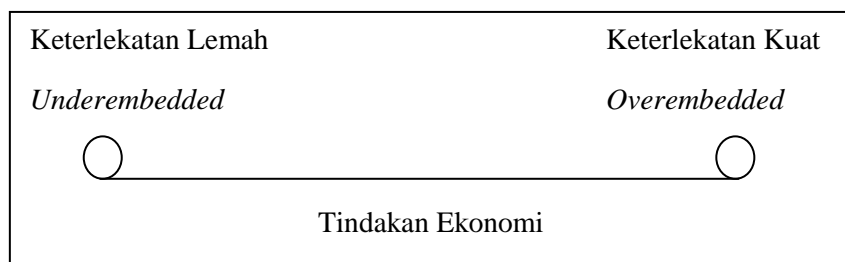
kualitas objektif, sehingga pada akhirnya manusia menganggap bahwa hal itu benar. Fokus dalam intitusi ekonomi ini adalah pergerakan dari sumber daya-sumber daya untuk tindakan kelompok (Damsar, 1997).

Terdapat perdebatan tentang konsep keterlekatan yang diungkapkan Granoveter. Granovetter dan Sweberg sendiri mengungkapkan ketidaksetujuan akan konsep keterlekatan-ketidakterlekatan (*embedded-disembedded*) dari Polanyi yang melihat ekonomi dalam masyarakat pra-industri melekat dalam institusional-institusional sosial, politik dan agama dengan tingkat atau derajat keterlekatan. Menurut Polanyi, kehidupan ekonomi dalam masyarakat pra-industri diatur oleh resiporositas dan redistribusi, sedangkan dalam masyarakat modern, “pasar yang menentukan harga” diatur oleh suatu logika baru, yaitu logika yang menegaskan bahwa tindakan ekonomi tidak melekat dalam masyarakat (Prof Damsar, 2009, hal. 142). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaturan dirinya (*self regulating market*) sendiri antara ekonomi terstruktur dengan atas dasar pasar dan secara radikal melepaskan dirinya dari institusi sosial lainnya yang berfungsi menurut hukumnya dimana tindakan ekonomi dituntun oleh pencapaian perolehan ekonomi yang maksimum. Berikut dikhotomi keterlekatan-ketidakterlekatan dari Polanyi dkk (Prof Damsar, 2009, hal. 142):



Gambar 1 Keterlekatan-Ketidakterlekatan Tindakan Ekonomi dari Polanyi, dkk (Prof Damsar, 2009)

Sedangkan menurut Granovetter dan Swedberg, tindakan ekonomi dalam masyarakat industri melekat dalam jaringan hubungan sosial dan institusi sosial seperti agama, politik, pendidikan, keluarga dan lain-lain seperti yang terjadi pada masyarakat pra industri. Oleh karena itu, Granovetter dan Swedberg mengusulkan bahwa tindakan ekonomi berlangsung di antara keterlekatan lemah (*underembedded*) dan keterlekatan kuat (*overembedded*). Dengan kata lain, tindakan ekonomi bukan berlangsung dalam kontinum antara kutub keterlekatan dan kutub ketidakterlekatan, namun berada di garis kontinum kutub keterlekatan kuat dan keterlekatan lemah (Prof Damsar, 2009, hal. 144). Secara ringkas, pandangan Granovetter dan Swedberg dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Keterlekatan Lemah dan Keterlekatan Kuat dari Suatu Tindakan Ekonomi
(Prof Damsar, 2009, hal. 144)

Damsar (2009) mengilustrasikan pandangan Granovetter dan Swedberg melalui tindakan ekonomi nasabah bank dalam menarik uang untuk melihat derajat yang berbeda dari keterlekatan. Keterlekatan akan kuat ketika nasabah melakukan penarikan dananya melalui pemotongan saldo dari kartu tabungan lewat kasir di kantor dibandingkan seorang nasabah melakukan penarikan lewat kartu ATM. Hal ini dikarenakan adanya interaksi sosial antara nasabah dengan kasir bank ketika melakukan penarikan uang melalui suatu kantor bank. Adanya jalinan komunikasi yang baik antara nasabah dengan kasir yang ditunjukkan ketika kasir mempersilahkan masuk nasabah untuk menandatangani slip

pengambilan uang. Hal ini juga bisa memperkuat interaksi sosial menjadi hubungan sosial ketika antara kedua pihak mengenal identitas diri dan saling menanyakan kabar.

Sedangkan, keterlekatan menjadi lemah ketika nasabah melakukan penarikan uang melalui ATM. Hal ini dikarenakan nasabah hanya berhubungan dengan mesin, meskipun melalui proses pengantrian memungkinkan terjadinya pintu masuk bagi terbentuknya suatu interaksi. Sehingga bentuk hubungan ini lebih lemah jika dibandingkan dengan yang pertama (melalui kasir).

Ide dasar aliran pemikiran ini dapat dirujuk kepada tiga proposisi utama yang diajukan oleh Swedberg dan Granoveter (1992) dalam (Prof Damsar, 2009, hal. 29):

1. Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial
2. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial
3. Institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial

Ketiga proposisi ini berakar dari pemikiran Weber yang dikembangkan secara lebih luas oleh Swedberg dan Granovetter. Pada proposisi yang pertama diungkapkan bahwa tindakan ekonomi merupakan bentuk dari tindakan sosial dengan cara memperhatikan tingkah laku orang lain, sebagai contohnya seseorang memperhatikan perilaku yang dilakukan oleh orang lain, berbicara dengan seseorang, berpikir tentang seseorang atau suatu kelompok sosial tertentu dan memberikan senyuman bagi orang lain. Selanjutnya Weber menjelaskan bahwa pelaku ekonomi selalu mengarahkan tindakannya kepada perilaku orang lain melalui makna-makna yang terstruktur dan menginterpretasikan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, atau norma yang dimiliki dalam sistem hubungan sosial yang sedang berlangsung.

Dalam proposisi yang kedua disebutkan bahwa tindakan ekonomi merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam proses hubungan sosial yang sedang berlangsung, dengan kata lain, tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan melekat dalam hubungan sosial personal yang sedang berlangsung dari/antar pelaku ekonomi (Damsar, 1997). Dalam hal ini, pelaku melakukan suatu interaksi sosial secara langsung dengan cara mendefinisikan suatu situasi sosial tertentu terlebih dahulu, sebelum melakukan interaksi terhadap orang lain. Sebagai contoh proses interaksi antara pembeli dan penjual sayur dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar, seorang penjual yang sedang menjual sayur, apabila stok sayurnya habis dan membutuhkan tambahan sayur, maka penjual sayur tersebut dapat berinteraksi dengan penjual sayur lain yang memiliki stok sayur, agar meminjamkan stok sayur yang dipunyai agar dijual pada pembeli langganannya tersebut dan pada tutupnya pasar, stok sayur yang dipinjam dapat dibayarkan (Prof Damsar, 2009, hal. 149).

Pemahaman terhadap proposisi yang ketiga, bahwa institusi ekonomi sebagai konstruksi sosial dapat dipahami melalui pendapat Peter L. Berger dan Luckman (1966) yang menyatakan bahwa institusi ekonomi bukan suatu jenis dari seperangkat realitas eksternal yang nampak, namun ia merupakan hasil dari kreasi sosial yang terjadi secara perlahan, cara melakukan sesuatu yang apabila suatu institusi muncul dalam keberadaannya, maka orang dapat mengarahkan tindakannya kepada seperangkat aktivitas yang dikenakan hukuman oleh pelaku sosial lainnya, yang memperlakukannya sebagai sesuatu yang keberadaannya diluar waktu dan tidak dapat menjadi yang sebaliknya, sebagai contohnya seorang pedagang mendapat bantuan pasokan sayur dari petani, dimana pada saat itu sulit memperoleh pasokan sayur karena musim kemarau, sehingga dalam peristiwa

tersebut petani itu menambah nilai prestasinya terhadap pedagang, yang mana hubungan antara pedagang dan petani tersebut memiliki nilai sosial dan moral yang lebih dari sekedar hubungan distribusi pasokan sayur (Prof Damsar, 2009, hal. 151).

Granovetter (1990) dalam *"The Old and New Economic Sociology"* membedakan dua bentuk keterlekatan, yaitu (Prof Damsar, 2009, hal. 146):

1. Keterlekatan Relasional

Keterlekatan relasional merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor (Prof Damsar, 2009, hal. 146). Penjelasan konsep "disituasikan secara sosial" menjelaskan suatu aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan orang lain atau dikaitkan dengan individu lain. Misalnya dalam tindakan ekonomi hubungan pelanggan antara penjual dan pembeli dimana terjadi hubungan interpersonal yang melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, agama dan politik (Prof Damsar, 2009). Sehingga, antara penjual dan pembeli akan melakukan klientisasi dimana ketika pembeli menghadapi informasi yang tidak pasti dan sulit maka ia berusaha mengatasi persoalan melalui konstruksi hubungan langganan dengan penjual.

2. Keterlekatan Struktural

Keterlekatan struktural adalah keterlekatan yang terjadi dalam suatu jaringan hubungan yang lebih luas. Jaringan ini dapat berupa institusi atau struktur sosial (Prof Damsar, 2009, hal. 149). Konsep institusi sosial merupakan struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan (Brinkerhoff dan White, 1989) dalam (Prof Damsar, 2009, hal. 149). Konsep sosial seperti ini merujuk akan makna subyektif yang mempertimbangkan

perilaku atau tindakan orang lain yang berkaitan dengan pemaknaan orang tersebut. Dengan demikian, pola hubungan atau interaksi yang terorganisir dalam suatu ruang sosial inilah yang menunjuk pada hubungan sosial. Pemahaman tentang struktur sosial diberikan oleh beberapa ahli, Thomas J. Sullivan dan Kenrick S. Thompson (1984) dimana disebutkan bahwa struktur sosial merupakan pola interaksi yang terorganisir dalam suatu kelompok atau masyarakat dimana pada interaksinya diatur oleh norma sosial (Prof Damsar, 2009, hal. 150).

Tiga proposisi utama yang dikemukakan oleh Granovetter sebelumnya dijadikan penulis sebagai pijakan dalam menganalisis bagaimana relasi pada tindakan sosial-ekonomi yang terjadi antar aktor nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Terlebih ketika berlakunya Peraturan Pemerintah No 02 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang dan Pukat menjadi masalah sosial sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi antar aktor nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Nelayan Pesisir Utara

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2002, hal. 24). Dari letak tinggalnya, menjadikan masyarakat yang hidupnya dekat dengan wilayah pesisir memanfaatkan potensi hasil laut yang berprofesi sebagai nelayan. Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan

memiliki banyak sekali permasalahan yang kompleks, politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Nelayan pesisir utara merupakan masyarakat yang ikut turut serta dalam kegiatan pencarian ikan, pemilahan hingga pendistribusian yang tempat tinggalnya terletak di pesisir utara.

Secara geografis, pesisir utara terletak di daerah Kota yang terdapat pelabuhan besar yang menjadi transit berbagai pulau. Letaknya yang berada di Kota membuat pesisir utara dekat dengan pusat pemerintahan. Hal inilah yang membedakan dengan pesisir selatan, dimana letaknya berada di Kabupaten dan jauh dari pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan disinilah yang menjadi acuan, dimana nelayan yang berada di pesisir utara dekat dengan peraturan dan macam-macam kebijakan yang menjadikan nelayan lebih terlatih oleh pemerintah. Berbeda dengan nelayan di pesisir selatan, dimana mereka dapat secara mandiri mengatasi kebijakan sendiri karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan.

Secara morfologi, garis pantai yang membentuk jawa bagian selatan lebih lurus jika dibandingkan dengan garis pantai yang terbentuk di bagian utara (Sadwewo, 2010). Hal ini terjadi karena garis pantai selatan dengan dominasi lurus disebabkan karena bagian selatan pulau jawa merupakan daerah pertemuan lempeng benua dan lempeng samudera, sedangkan pada pantai utara jawa terbentuk karena proses erosi sungai-sungai yang mengalir dan bermuara di pantai utara Jawa dan hasil dari endapan erosi ini yang mempengaruhi morfologi dasar laut pantai utara (Sadwewo, 2010, hal. 14). Endapan erosi yang halus inilah yang kemudian menjadi materi dominan dasar laut pulau jawa, sehingga dasar laut pulau jawa cenderung datar. Morfologi dasar laut yang cenderung datar inilah yang menjadi salah satu hal yang mempengaruhi karakteristik ombak dimana ombak di pantai utara tidak sebesar di pantai selatan (Sadwewo, 2010, hal. 14). Selain itu, yang membedakan pantai utara

dengan pantai selatan adalah gugusan pulau yang banyak dimiliki di pantai utara sehingga ombak yang datang pecah dan tidak begitu kencang sesampai di pantai. Sedangkan di bagian pantai selatan memiliki tebing yang berpengaruh pada hantaman gelombang karena berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Dari perbedaan diatas, membuat pantai utara memiliki pelabuhan yang cukup besar dan ramai dibanding pantai selatan.

Menteri Perikanan dan Kelautan menyebutkan bahwa ada sedikit perbedaan kultur masyarakat pesisir selatan dengan masyarakat pesisir utara Jawa.¹ Dimana pada kawasan pesisir selatan ekonomi keluarga pesisir lebih banyak ditopang oleh peran para wanita. Hal ini membuat keluarga pesisir selatan lebih mengalami ketidakmakmuran dibandingkan dengan kawasan pesisir utara. Sementara itu, pada kawasan pesisir utara, kaum pria lebih dominan menggerakkan roda ekonomi keluarga, sehingga dengan pria bekerja sebagai nelayan dimana pekerjaan nelayan memiliki banyak resiko membuat pria lebih rentan menghadapi segala resiko dan lebih makmur dibandingkan dengan nelayan pesisir utara. Dalam buku (Kusnadi, 2002, hal. 34), permasalahan yang dihadapi nelayan antara lain:

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat.
2. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha.
3. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada.
4. Kualitas sumberdaya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

¹ Dikutip dari harian kompas.com mengenai perbedaan kultur nelayan pesisir selatan dengan nelayan pesisir utara versi Menteri Susi Pudjiastuti diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 15.29 wib

5. Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan
6. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Hal ini juga terjadi di tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimana kawasan pesisir utara lebih tepatnya di Pelabuhan Tanjung Tembaga memiliki karakteristik yang sangat kompleks dari segi aktor yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Tembaga merupakan pusat perdagangan unggulan Jatim dan menjadi satu-satunya milik yang dikelola oleh Pemprov Jatim untuk menunjang perekonomian dan perdagangan Jatim². Pelabuhan Tanjung Tembaga memiliki letak yang strategis dan dari sisi bisnis sangat prospektif karena melayani sekitar 120 juta penduduk wilayah Indonesia Timur³. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat nelayan yang berada di wilayah Pelabuhan Tembaga memiliki struktur ekonomi yang tinggi ataupun rendah. Dimana masyarakat nelayan yang memiliki ekonomi tinggi menjadi seperti kapitalis yang mempekerjakan masyarakat nelayan buruh.

Berdasarkan definisi dan penjelasan mengenai perbedaan nelayan pesisir utara dengan pesisir selatan sebagai individu-individu yang secara geografis tinggal di daerah pesisir, maka dapat diuraikan bahwa nelayan yang berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo mempunyai struktur sosial tersendiri dan mempunyai pembagian tugas, dan mempunyai kesamaan ciri-ciri, seperti bermata pencaharian yang masih bergantung pada laut, merupakan obyek utama dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat mengambil informan

² dikutip pada <http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/20/gubernur-minta-pelindo-serahkan-pengelolaan-pelabuhan-tanjung-tembaga-probolinggo> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 15.13 wib

³ dikutip pada <http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/20/gubernur-minta-pelindo-serahkan-pengelolaan-pelabuhan-tanjung-tembaga-probolinggo> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 15.13 wib

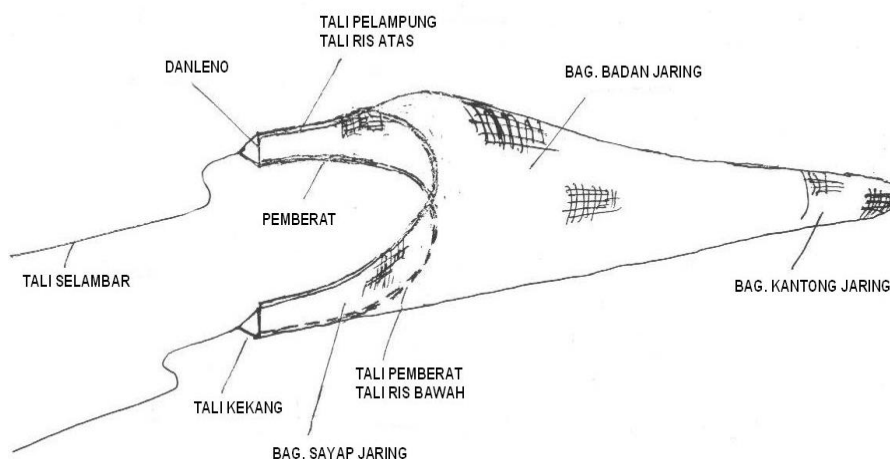
dari aktor-aktor nelayan sebagai sumber data untuk mengetahui dan menganalisa mengenai relasi pada tindakan sosial-ekonomi masyarakat nelayan pada masa transisi pelarangan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sehingga peneliti dapat mengetahui bahwa nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga membentuk relasi dengan beberapa aktor yang terlibat dan juga mengalami keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi dalam kegiatan penangkapan ikan dan pendistribusian hasil tangkap.

2.3.2 Cantrang Sebagai Alat Tangkap

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya (Pasal 1 Permen KP No 57 tahun 2014). Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang merupakan sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan (Pasal 1 Permen KP No 57 tahun 2014). Ada berbagai jenis alat penangkapan ikan baik yang masih tradisional maupun yang sudah mengalami modifikasi (modernisasi) (Andryana, 2015, hal. 12).

Nelayan menggunakan berbagai alat tangkap untuk meningkatkan produktivitasnya, salah satu alat tangkap yang digunakan adalah cantrang (Andryana, 2015, hal. 13). Cantrang merupakan alat tangkap berbentuk jaring yang apabila dilihat dari bentuknya menyerupai alat tangkap payang, tetapi ukuran di tiap bagiannya lebih kecil. Jika dilihat dari fungsi dan hasil tangkapan utamanya, cantrang menyerupai *trawl*, tetapi bentuknya lebih sederhana dan pada saat pengoperasiannya tidak ditarik oleh kapal dan tidak menggunakan pembuka jaring (Andryana, 2015, hal. 13). Secara umum, cantrang digolongkan ke dalam

kelompok *Danish Seine* atau *Snurrevard* yang terdapat di Eropa dan beberapa di kawasan Amerika (Andryana, 2015, hal. 14). Cantrang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sayap, badan, dan kantong. Sayap berfungsi sebagai penggiring agar ikan dapat masuk menuju kantong melalui badan. Badan berfungsi untuk mengkonsentrasikan ikan menuju kantong dalam satu arah dan kantong akan menampung ikan-ikan yang masuk sebagai hasil tangkapan. Sering terjadi kesalahan mengenai pengertian pukat hela dan cantrang, padahal cantrang berbeda dengan pukat hela. Seringkali cantrang disamakan dengan pukat hela. Pukat hela menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela, Pukat Hela adalah semua jenis alat penangkap ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/ dihela menggunakan satu kapal yang bergerak. Berikut, merupakan gambar alat tangkap cantrang:



Gambar 3 Detail Alat Penangkapan Cantrang
Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh (Andryana, 2015, hal. 14)

Cantrang banyak digunakan terutama oleh nelayan di kawasan pesisir utara Jawa Timur. Hal ini dikarenakan potensi hasil laut wilayah pesisir utara Jawa

Timur memiliki potensi demersal (bawah laut), sehingga sangat cocok ditangkap menggunakan alat tangkap cantrang. Namun terjadi banyak sekali kontroversi terhadap alat tangkap jenis cantrang ini, karena tidak bersifat ramah lingkungan. Penggunaan jaring yang berjarak sekitar 2 mm, membuat tidak adanya pembaharuan ekologi di dalam laut. Sehingga, alat tangkap jenis cantrang ini akan dilakukan pelarangan pada tanggal 1 Januari 2018.

Berdasarkan definisi dan polemik cantrang sebagai alat tangkap, uraian diatas terjadi juga di tempat yang akan dilakukan peneliti dimana masyarakat nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo menggunakan cantrang sebagai alat tangkap. Namun, ketika terjadi pelarangan, tentunya terjadi perubahan alat tangkap dan juga perubahan status, dimana banyak nelayan cantrang yang mengalami kemunduran hasil tangkap, penurunan ekonomi dan tidak bekerjanya dalam penangkapan ikan sebagai pemilik kapal. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah sosial masyarakat nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo yang tentunya akan terjadi pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi masyarakat nelayan

2.3.3 Pergeseran Relasi

Pergeseran relasi pada tindakan sosial-ekonomi nelayan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Tembaga yaitu dengan memunculkan pola-pola baru pada tindakan sosial-ekonomi. Pemunculan pola-pola baru terjadi karena bentuk penyesuaian aktor nelayan akan berlakunya pelarangan alat tangkap cantrang. Hal inilah yang kemudian menyebabkan sistem hubungan yang telah terbentuk selama ini mengalami proses pergeseran agar dapat menghidupi aktor-aktor nelayan yang mengalami perubahan status.

Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018. Sebelum pelarangan alat tangkap cantrang terjadi, terdapat sistem yang telah dibangun oleh aktor nelayan yang memunculkan keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi. Sistem tersebut digambarkan sebagai bentuk hubungan yang kompleks antar aktor nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga dimana setiap aktor memiliki peran masing-masing dalam membangun keterlekatan.

Nelayan besar yang memiliki modal dan teknologi yang cukup lengkap, membuat nelayan kecil dan nelayan buruh melakukan tindakan kerja sama. Nelayan buruh bekerja menjual tenaganya untuk nelayan besar, nelayan kecil dan juga nelayan cantrang, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi nelayan buruh dengan mendapatkan hasil berupa gaji serta *iwak-iwakan*⁴. Semakin tinggi konsistensi kerja nelayan buruh kepada nelayan besar atau nelayan cantrang, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan nelayan besar kepada nelayan buruh. Nelayan besar dan nelayan cantrang yang sangat bergantung pada ABK akan membutuhkan nelayan buruh untuk kegiatan penangkapan ikan dan ketika jaringan sosial dan kepercayaan telah dibangun diantara keduanya, maka nelayan buruh bisa mendapatkan promosi menjadi pemegang kendali dalam pelepasan jaring ikan.

Hubungan yang dibangun nelayan besar, nelayan cantrang dan nelayan kecil adalah bagi hasil yang telah dilakukan perjanjian ketika bertemu dilaut, biasanya yang terjadi adalah nelayan besar kerap kali membeli hasil tangkapan nelayan kecil karena nelayan kecil membutuhkan uang mendadak. Ketika sampai di darat pun, nelayan besar dan kecil sudah dihadapkan oleh *pangamba'* yang akan membeli ikan dalam jumlah besar kepada nelayan besar, cantrang dan kecil. Peran *pangamba' darat* inilah yang dapat dilihat ketika pembelian ikan dengan harga lebih murah di pasaran, misalnya harga normal ikan tuna/ kg adalah Rp 18.000,00.

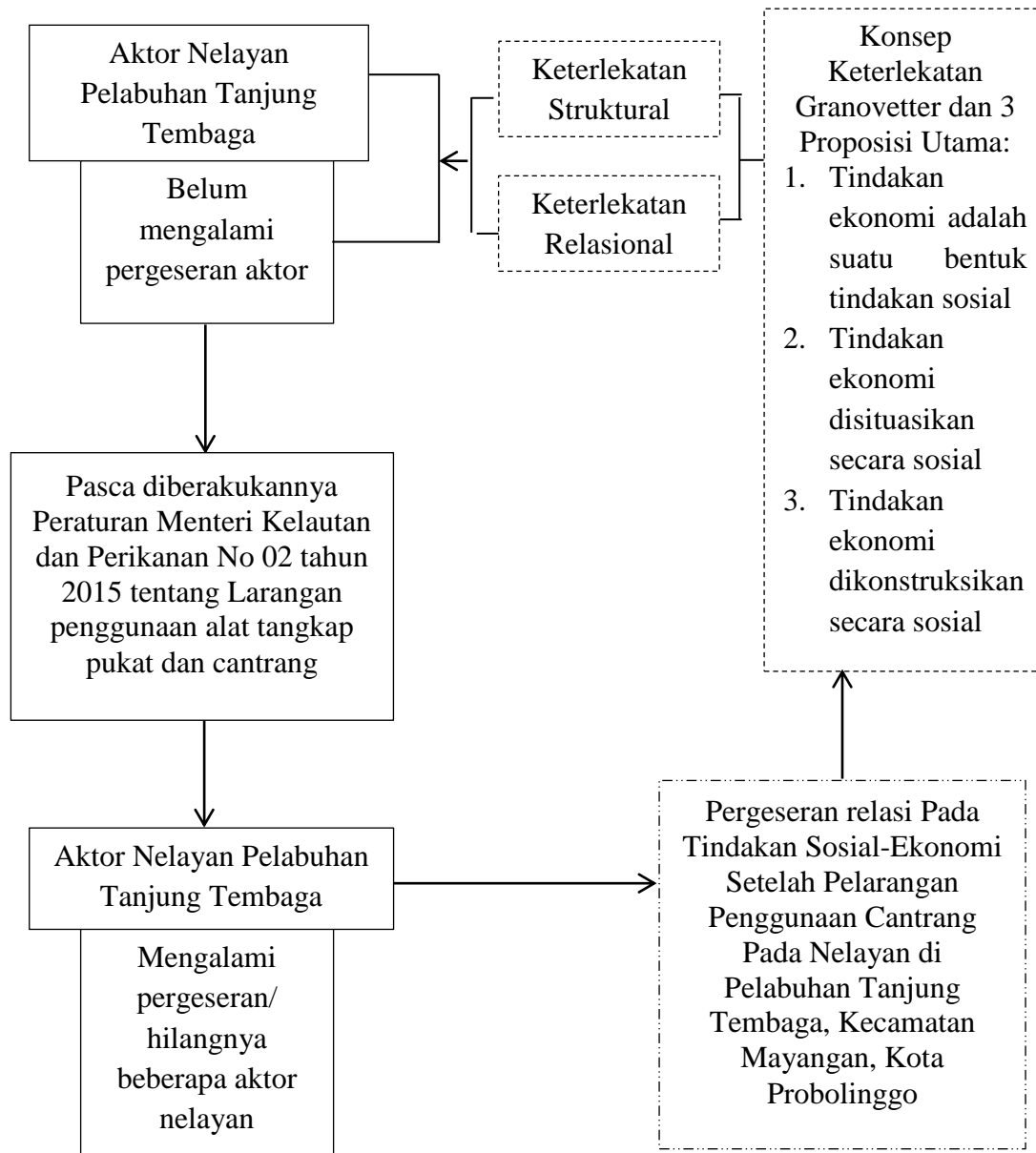
⁴ Bagi hasil tangkapan ikan dari juragan kapal kepada nelayan ABK setiap kali memperoleh ikan hasil tangkapan

Namun yang terjadi dalam proses transaksi adalah harga ikan tuna/ kg mencapai Rp 12.000,00. Nelayan kecil tidak menganggap proses transaksi tersebut mengalami kerugian karena ketika masa padangan, *pangamba'* terkadang memberikan bantuan modal kepada nelayan kecil, sehingga nelayan kecil merasa berhutang budi kepada *pangamba'*.

Sistem hubungan yang dibangun oleh *pangamba'* dengan tengkulak juga mengalami proses yang sama dengan nelayan kecil. Dimana tengkulaklah yang akan menentukan harga ikan di pasaran. Sedangkan hubungan *rentenir/ bank thithil* dengan nelayan besar dan kecil memunculkan tindakan balas budi dengan tidak hanya nelayan membayar uang dengan bunga yang tinggi, namun juga pemberian hasil tangkapan nelayan kepada *rentenir/ bank thithil*.

Dari hubungan yang telah dibentuk oleh nelayan inilah, yang akan diteliti oleh peneliti ketika masuknya Permen No 02 Tahun 2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Pukat dan Cantrang. Karena dengan masalah yang terjadi, tidak akan mengubah sistem yang telah dibangun nelayan, namun akan memunculkan pola-pola baru pada tindakan sosial-ekonomi. Pergeseran inilah yang akan dilakukan proses penelitian dan analisis menggunakan teori Granovetter oleh Peneliti.

2.4 Alur Berpikir



Tabel 2 Skema Alur Berpikir

Keterangan:

- : Fokus Peneliti
- : Pemikiran Granovetter

Penelitian ini mengkaji terbentuknya pola tindakan sosial-ekonomi antar aktor nelayan di pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Fokus

penelitian dalam penelitian ini adalah melihat tindakan sosial-ekonomi antar nelayan serta melihat dampak perubahan alat tangkap terhadap tindakan sosial-ekonomi nelayan. Untuk melihat perubahan yang terjadi maka ada dua kondisi yang harus dilihat dan dianalisis. Kondisi pertama ketika belum diberlakukannya Peraturan Menteri No. 02 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan pukat dan cantrang di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia. Melihat kondisi di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, yang berbatasan langsung dengan Selat Madura, menjadikan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir utara berprofesi sebagai nelayan untuk memanfaatkan potensi hasil laut. Masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah Pelabuhan Tanjung Tembaga memiliki alat tangkap yang digunakan sejak lama, yaitu cantrang. Hal inilah yang menjadi karakteristik nelayan di pesisir pantai utara, khususnya daerah Jawa Timur dimana alat tangkap cantrang banyak digunakan oleh nelayan.

Dari keadaan diatas, terbentuklah aktor-aktor dalam masyarakat nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga yang saling membentuk sistem dan relasi. Aktor tersebut adalah nelayan yang terdiri dari nelayan besar, nelayan cantrang dan nelayan kecil, *Pangambe'*, tengkulak dan rentenir/ *bank thithil*. Dimana para aktor saling berelasi melakukan tindakan sosial-ekonomi, berupa kegiatan penangkapan ikan, pemilahan hasil tangkap, penjualan dan pendistribusian yang dilakukan secara berulang-ulang oleh aktor nelayan dan mempengaruhi terbentuknya sebuah tindakan ekonomi yang secara spesifik. Kemudian setelah terjadi hubungan sosial yang berlangsung antara para aktor, pada akhirnya aktor-aktor akan mengalami keterlekatan dalam hubungan sosial yang berlangsung di dalamnya.

Kondisi yang dialami aktor tentunya akan mengalami perubahan ketika diberlakukannya Peraturan no 02 tahun 2015, dimana aktor-aktor mengalami pergeseran, nelayan cantrang yang notabennya menggunakan cantrang sebagai alat tangkap bergeser menjadi nelayan buruh atau ABK yang bekerja untuk nelayan besar. Hal ini disebabkan

karena peraturan yang melarang cantrang sehingga terjadi penurunan pendapatan dan hasil tangkapan. Kondisi seperti inilah yang akan dilihat melalui penelitian, bagaimana pergeseran relasi pada tindakan sosial ekonomi nelayan setelah terjadi pelarangan alat tangkap cantrang. Tentunya, akan mengalami perubahan karena adanya pergeseran aktor yang kemudian relasi mengalami pergeseran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat, dimana praktik ini mentransformasikan dunia (Creswell, 2015, hal. 58). Peneliti akan menjadi rangkaian penelitian dalam representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi.

Dalam menerapkan penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah pendekatan yang naturalistik terhadap dunia untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam latar yang berkonteks khusus (Creswell, 2015). Pendekatan naturalistik memfokuskan pada aspek persoalan yang digunakan berdasarkan kondisi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk memahami suatu fenomena dalam suatu konteks yang khusus (Creswell, 2015). Secara umum, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memproses pencarian data dari konteks kejadian langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa kenyataannya, yang berarti membuat berbagai kejadiannya seperti merekat dan melibatkan perspektif peneliti yang partisipatif di dalam berbagai kejadiannya (Nawawi, 1997). Melalui penyampaian data yang disajikan secara naratif, serta menggunakan penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamati (Nawawi, 1997, hal. 97).

Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan analisa data yang dikumpulkan berupa kata-kata, tabulasi data, dan gambar-

gambar. Semua data penelitian yang telah dikumpulkan merupakan kata kunci terhadap apa yang sudah diteliti, sehingga laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajian laporan penelitian. (Moleong, 2006, hal. 26).

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode ini memaparkan secara langsung hubungan antara peneliti dan informan serta fakta-fakta yang ditemui di lapangan, sehingga peneliti dapat menggambarkan dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ditemui, berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan maupun melalui observasi secara langsung perihal bentuk pergeseran relasi tindakan sosial-ekonomi antara aktor nelayan pada masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap pukat dan cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan penelitian yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan-nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema. (Creswell, 2015, hal. 135-136). Alasan utama peneliti memilih pendekatan studi kasus karena pendekatan studi kasus merupakan sebuah pendekatan yang meneliti tentang sebuah kasus, dimana kasus ini biasanya terjadi pada batasan ruang dan waktu. Di dalam batas ruang dan waktu tersebut kasus itu menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan penelitian, yang mana dalam penelitian mengacu pada dua pertanyaan dasar yaitu “*how*” dan “*why*” (Creswell, 2015, hal. 137).

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, dikarenakan bahwa dalam penelitian ini memfokuskan secara khusus bagaimana pergeseran relasi dan keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi antar nelayan pada masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo.

Dalam pendekatan studi kasus ini, peneliti menggunakan jenis studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental sendiri merupakan salah satu jenis studi kasus yang digunakan ketika suatu penelitian memiliki tujuan untuk melihat fenomena yang terjadi di beberapa wilayah yang luas dengan mengambil satu lokasi sebagai sampel pilihannya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana perubahan keterlekatan pada tindakan sosial-ekonomi Nelayan ketika terjadi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo dan juga melihat dampak teknologi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Nelayan yang terjadi di kawasan Jawa Timur khususnya di Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.

3.3 Fokus Penelitian

Sebuah penelitian sosial mempunyai objek penelitian yang luas berdasarkan fenomena dan kasus sosial yang beragam, sehingga dalam penelitian kualitatif harus mempunyai batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi penelitian dengan satu atau lebih variabel. Dalam penelitian kualitatif, batasan masalah biasa disebut dengan fokus penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2010, hal. 207).

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah melihat dampak teknologi terhadap tindakan sosial-ekonomi dan keterlekatan yang terjadi dalam relasi antar aktor nelayan pada masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Adanya pola tindakan sosial-

ekonomi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh aktor nelayan tersebut akan mempengaruhi terbentuknya sebuah pola tindakan sosial-ekonomi yang secara spesifik, yang melatar belakangi terbentuknya relasi antara tiap aktor nelayan dalam kerja sama pada kegiatan penangkapan ikan di sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga. Selain itu, akan diberlakukannya Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan no 02 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pukat akan menggeser relasi dan tindakan sosial-ekonomi yang telah terjadi pada aktor nelayan.

3.4 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan itu melekat. Dalam hal ini subyek penellitan berfungsi sebagai sumber data untuk dapat memecahkan permasalahan yang merupakan maksud dan tujuan penelitian tersebut dilakukan.

Dalam penelitian ini, sumber data melalui informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan yang dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya akan informasi mengenai fenomena yang ingin diteliti. Pengambilan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pilihan peneliti berdasarkan aspek yang menjadi fokus penelitian, yaitu pada nelayan yang terdampak atas peraturan yang diterapkan.

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah nelayan besar, nelayan cantrang, nelayan kecil, buruh nelayan (ABK), *Pangamba'* atau *amba'an* darat dan tengkulak.

NO	SUBYEK PENELITIAN	KATEGORI
----	-------------------	----------

1.	Nelayan Besar	Memiliki kapal diatas 20 GT ¹ , mempekerjakan anak buah kapal (ABK) diatas 50 orang, merupakan kapal industri penangkapan ikan
2.	Nelayan Cantrang	Biasa disebut kapal cantrang karena memiliki alat penangkapan berupa cantrang
3.	Nelayan Kecil	Memiliki kapal 5-10 GT, mempekerjakan anak buah kapal (ABK) diatas 1-50 orang dengan penghasilan kotor kurang lebih Rp 14.000.000,00/ minggu ²
4.	<i>Pengambe'</i> - <i>Amba'an</i> darat	Perempuan yang berprofesi sebagai tengkulak dengan jumlah kecil
5.	Anak Buah Kapal (ABK) atau nelayan buruh	Sekumpulan orang yang bekerja menjual tenaganya dalam kegiatan penangkapan ikan pada nelayan besar dan nelayan kecil.
6.	Tengkulak	Orang atau lembaga yang membeli hasil tangkapan laut dan menentukan harga pasar
8.	Pemerintah	Lembaga yang menaungi dan mengontrol aktivitas nelayan, baik dampak pada lingkungan, hasil perikanan dan paguyuban nelayan. Pemerintah yang dimaksud lebih spesifik dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan.

Tabel 3 Kategori Subyek Penelitian

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

¹ Gross Tonnage (GT) Menurut PP No. 7 tahun 2000 tentang kelautan disebut sebagai Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT yang merupakan satuan VOLUME kapal. Kemudian dalam PP 51 tahun 2002 tentang Perkapalan pada pasal 1 poin 4 Tonase kapal adalah VOLUME yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT). Dalam hal lain, Gross Tonnage adalah perhitungan VOLUME semua ruang yang terletak dibawah geladak ditambah VOLUME ruangan tertutup diatas geladak ditambah VOLUME ruangan diatas geladak paling atas. Istilah ton yg dipakai berasal dari UK (united kingdom), ada 4 ukuran penggunaan kata Ton, yaitu:

1). Long Ton = 2240 lbs = 1,016 kg

2). Short Ton = 2000 lbs = 907,2 kg

3). Tonne = 2205 lbs = 1,000 kg (ini yg sering dipakai secara internasional)

4). Tonage (kita baca Tonase= adlh memang satuan Volume khusus bid.shiping maritime) = 100 cubik feet = 2,83 m3. Artinya Tonnage sendiri sudah merupakan satuan yang disetarakan dengan 2,83 m3.

² Hasil wawancara dengan nelayan kecil di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo pada 9 Februari 2017.

3.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kawasan Wilayah Pesisir Utara khususnya Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Secara administratif Kecamatan Mayangan masuk ke dalam wilayah yang dinaungi oleh Kota Probolinggo, dimana Kecamatan Mayangan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Batas Utara : Selat Madura

Batas Timur : Kecamatan Dringu

Batas Selatan : Kecamatan Kanigaran

Batas Barat : Kecamatan Kademangan

Berdasarkan pada data profil monografi Desa (2014), total luas wilayah Kecamatan Mayangan adalah 8.655 km², dan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sehingga, masyarakat di Wilayah Pesisir Utara banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan atau pedagang ikan.

3.5.2 Waktu Penelitian

Berikut adalah jadwal perancangan penyusunan proposal sebagai target waktu penelitian yang disusun oleh peneliti.

No	Aktivitas	Maret Minggu ke	April Minggu ke	Mei Minggu ke
1.	Observasi, penentuan tema dan fokus			
2.	Pembahasan Bab I			
3.	Penyempurnaan Bab I			
4.	Pembahasan Bab II dan Bab III			
5.	Penyempurnaan Bab II dan III			
6.	Penyempurnaan Bab I, II dan III			

7.	Seminar Proposal												
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4 Timeline perancangan proposal

No	Aktivitas	Juni Minggu ke				Agustus Minggu ke				Desember Minggu ke			
1.	Turun lapang dan penyelesaian transkrip												
2.	Pembahasan Bab IV												
3.	Penyempurnaan Bab IV dan Pembahasan Bab V												
4.	Penyempurnaan Bab V dan pembahasan Bab VI												
5.	Penyempurnaan Bab IV, V dan VI												
6.	Persiapan Seminar Hasil												

Tabel 5 Timeline perancangan laporan

3.6 Jenis dan Sumber Data

3.6.1 Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dalam hal ini adalah peneliti (Sugiyono, 2010). Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai informan, melalui hal tersebut dapat dilakukan wawancara secara tidak terstruktur pada informan, dalam hal ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber data primer diperoleh penulis dari wawancara informan yaitu Nelayan Besar, Nelayan Kecil, Nelayan Cantrang, ABK, *Pangamba'*, Tengkulak dan Pemerintah (Dinas Perikanan Kota Probolinggo) serta observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *interview* dengan melakukan wawancara secara langsung antara peneliti dengan informan. Informan adalah seseorang atau individu yang terkait secara langsung

dengan data yang dibutuhkan peneliti dan akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang akan diajukan. *Interview* dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan menggunakan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat langsung ditanyakan secara bebas untuk memperoleh data yang akurat dan tepat guna menunjang analisis terhadap permasalahan penelitian yang dibahas (Moleong, 2006, hal. 130).

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan yang berarti bahwa peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan yang subyek peneliti lakukan, akan tetapi peneliti melakukan observasi pada saat berlangsungnya wawancara. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti didahului dengan adanya pendekatan dengan subyek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subyek penelitian.

Dalam hal ini, pengamatan yang dilakukan merupakan bentuk pengamatan terstruktur dimana observasi yang dilakukan berpedoman pada observasi yang dilakukan saat berlangsungnya wawancara dengan menggolongkan pada kondisi fisik, kondisi psikologis, dan kondisi sosial ekonomi informan.

3.6.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data Sekunder dapat diperoleh melalui studi dokumentasi yang dihimpun melalui instansi pemerintah terkait, sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga dapat berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari tempat-tempat penelitian, laporan, jurnal penelitian dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Data sekunder juga dapat diperoleh dengan melakukan penelusuran situs-situs internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data monografi dan data profil Kelurahan Mayangan, serta PP no 02 tahun 2015 terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pukat.

3.7 Teknik Penentuan Informan

Informan sendiri adalah seseorang yang memiliki peran untuk memberikan berbagai informasi tentang situasi dan kondisi pada latar penelitian, sehingga informan dalam penelitian harus memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian dan konteks penelitian yang akan dilakukan (Moleong, 2006, hal. 132).

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu, tujuan dari pertimbangan ini agar data yang didapatkan oleh peneliti lebih representatif (Sugiyono, 2010). Sesuai dengan definisi tersebut tentunya orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini diharapkan memenuhi syarat dan kriteria yang diajukan oleh peneliti sebagai pertimbangannya. Penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki 5 subyek penelitian yang dalam hal ini peneliti melakukan pembatasan informan yang termasuk dalam kategori tiap subyek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu :

3.7.1 Nelayan Besar

1. Berdomisili di wilayah pesisir utara Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

2. Memiliki kapal dengan berat diatas 20 GT, yang merupakan kapal industri perikanan
3. Mempekerjakan anak buah kapal (ABK) diatas 50 orang
4. Penggunaan alat tangkap selain cantrang

3.7.2 Nelayan Kecil

1. Berdomisili di wilayah pesisir utara Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
2. Memiliki kapal dengan berat 5-10 GT
3. Mempekerjakan anak buah kapal 1-50 orang
4. Penggunaan alat tangkap selain cantrang

3.7.3 Nelayan Cantrang

1. Berdomisili di wilayah pesisir utara Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo
2. Menggunakan kapal gardan dalam proses penangkapan hasil laut
3. Menggunakan alat tangkap cantrang sebelum Peraturan Pemerintah KPP No. 02 Tahun 2015 diberlakukan
4. Masih menggunakan alat tangkap cantrang setelah Peraturan Pemerintah KPP No 02 Tahun 2015 diberlakukan

3.7.4 Pangambe'

1. Pembeli pertama hasil tangkapan nelayan di pelabuhan ketika nelayan tiba
2. Pembelian hasil tangkapan nelayan diatas 20 kg
3. Mempekerjakan perempuan/ istri nelayan buruh untuk proses pengasinan dan pemilahan ikan

3.7.5 Tengkulak

1. Pembeli kedua hasil tangkapan nelayan kepada *Amba'an darat*

2. Mendistribusikan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan

3.7.6 Pemerintah

1. Merupakan orang yang bernaung di dalam lembaga pemerintahan, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo
2. Pernah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah, khususnya no 02 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan pukat kepada nelayan/ kelompok nelayan di Kota Probolinggo
3. Melakukan pendampingan atas turunya Surat edaran Nomor: 72/ MEN-KP/II/2016 tentang pembatasan penggunaan alat penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Perairan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) (KKP.go.id, 2016) kepada nelayan/ kelompok nelayan di Kota Probolinggo

3.8 Teknik Pengumpulan Data

3.8.1 Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang secara sengaja dan sistematis dilakukan dimana pengamatan tersebut dilakukan pada aktivitas individu maupun obyek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan datang langsung Wilayah Pesisir Utara, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, untuk mengamati kegiatan pemilahan ikan yang sedang berlangsung dan relasi yang terjadi antar nelayan. Dalam hal ini peneliti mengamati segala kegiatan yang dijalankan oleh nelayan dari awal datang sampai nelayan pulang kembali ke rumah.

3.8.2 Wawancara

Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula (Creswell, 2015). Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung tatap muka (*face to face relationship*) antar si pencari informasi (*interviewer* atau *information hunter*) dengan sumber informasi (*interview*) (Moleong, 2006). Secara sederhana *interview* diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi dimana wawancara akan dipergunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan cita-cita seseorang (Nawawi, 1997).

3.8.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dokumen maupun buku-buku, Koran, majalah dan lain-lain (Nawawi, 1997). Sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan dalam dokumentasi ini peneliti menggunakan dua macam dokumenter, yaitu dokumenter pribadi dan dokumen resmi, dokumen pribadi misalnya adalah catatan, foto foto dan sebagai bukti penelitian beberapa dokumen pribadi milik peneliti (Nawawi, 1997). Sedangkan dokumen resmi merupakan surat surat yang di buat untuk melakukan penelitian seperti beberapa penduduk yang di peroleh dari Kelurahan, serta data izin penelitian di daerah tersebut dan data data resmi lainnya (Nawawi, 1997).

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus berupa teknik menganalisis data dengan tiga strategi analisis yaitu perbandingan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu (Creswell, 2015). Dari ketiga teknik analisis data tersebut, peneliti memilih teknik perbandingan pola dalam menganalisis data dalam penelitian ini, analisis data dengan menggunakan teknik perbandingan pola, dapat dilakukan dengan cara membandingkan pola yang diprediksikan sehingga jika ada pola yang bersamaan maka hasilnya dapat menguatkan validitas studi kasus dalam penelitian (Creswell, 2015). Dalam studi kasus deskriptif teknik analisis perbandingan pola akan lebih relevan dengan pola variabel-variabel yang lebih spesifik. Dalam hal ini peneliti menggabungkan antara data yang didapat dari penelitian dengan teori yang digunakan, dengan demikian pada tahap ini, peneliti membahas dengan menggunakan teknik analisis data dari beberapa jawaban informan terkait “Pergeseran relasi Pada Tindakan Sosial-Ekonomi Nelayan Pada Masa Transisi Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo”.

Selanjutnya peneliti akan membuat perencanaan terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian. Tujuan membuat analisis perencanaan, yaitu menganalisis data studi kasus dengan membuat suatu perencanaan tentang kasus yang bersangkutan (Kristanto, 2016). Unsur dalam analisis perencanaan adalah menjelaskan sebuah fenomena berdasar pada penetapan serangkaian kejadian timbal balik mengenai fenomena, pembuatan perencanaan sering dilakukan dengan bentuk naratif. Perencanaan akhir sebuah studi kasus merupakan serangkaian perulangan sebagai berikut (Kristanto, 2016, hal. 50-51):

- a. Membuat suatu pernyataan teori awal

Dengan cara menyusun data hasil wawancara yang telah diperoleh ke dalam transkrip.

- b. Membandingkan temuan-temuan awal

Pada tahap ini, peneliti melakukan perbandingan antara hasil wawancara yang telah ditranskrip di lapangan dengan hasil *survey* dan observasi atau temuan awal.

c. Memperbaiki pernyataan atau proposisi

Setelah membandingkan hasil temuan dengan kasus awal, maka akan diperoleh perbedaan dan persamaan. Perbedaan pada proposisi awal yang akan diperbaiki kemudian.

d. Membandingkan dengan kasus lain

Temuan kasus lain berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan kasus yang diangkat dalam penelitian. Kasus lain ini digunakan untuk memperkuat hasil penelitian kedalam kasus yang berbeda sehingga memiliki keunikan. Dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarot Wisnu Kristanto (2016), dengan judul penelitian Keterlekatan Pada Tindakan Ekonomi Nelayan Kelompok Bina Lestari Pada Kegiatan Penangkapan Ikan Dalam Upaya Pemanfaatan Nilai Ekonomi Lingkungan di Pesisir Pantai Tamban (Studi Kasus di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang) dan Maya Resty Andryana (2016), dengan judul penelitian Strategi Adaptasi Nelayan dalam Menghadapi Peraturan Pelarangan Cantrang.

e. Memperbaiki pernyataan atau proposisi

Dilakukan pemeriksaan data mulai dari pembuatan pernyataan teoritis sampai dengan membandingkan dengan kasus lain, sehingga dapat diketahui rumusan masalah telah terjawab atau belum.

f. Mengulangi proses pemeriksaan sebanyak mungkin, sebagaimana diperlukan.

Pemeriksaan analisa data secara keseluruhan melalui penentuan hasil penelitian. Apakah telah memenuhi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Jika hasil analisa data telah menjawab rumusan masalah penelitian, maka peneliti dapat

melanjutkan penulisan laporan, tetapi jika rumusan masalah penelitian belum terjawab maka peneliti dapat mengambil tindak lanjut dengan pembuatan perencanaan dengan melakukan proses perbaikan serangkaian gagasan.

Pengecekan kembali dilakukan dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dokumen-dokumen serta perbandingan hasil data penelitian dengan keadaan sebenarnya di lapangan berdasarkan pada data primer dan sekunder, sehingga data hasil penelitian ini mempunyai derajat kepercayaan informasi yang akurat. Sesuai dengan data yang diperoleh pada saat berlangsungnya penelitian.

Melalui data yang diperoleh di lapangan serta hasil dari wawancara, maka peneliti melakukan tahapan analisis data dengan bentuk analisis dominan perjodohan pola yang didukung oleh pola variabel-variabel yang sudah diprediksi dan ditentukan oleh peneliti sebelum dilakukan pengumpulan data.

Analisis data yang terkumpul tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan analisa data deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari kasus yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul ditinjau dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan umum dengan penggunaan data kuantitatif yang digunakan untuk mempertajam analisa kualitatif.

3.8 Proposisi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus, tentunya diharuskan adanya sebuah proposisi awal sebelum dilakukan penelitian. Proposisi ini berguna dalam membantu mengarahkan peneliti untuk memberikan fokus pada penelitiannya. Proposisi dalam penelitian ini adalah:

1. Relasi yang terjadi antar nelayan adalah keterlekatan relasional karena tindakan ekonomi tersebut disituasikan secara sosial dan melekat (embedded) dalam

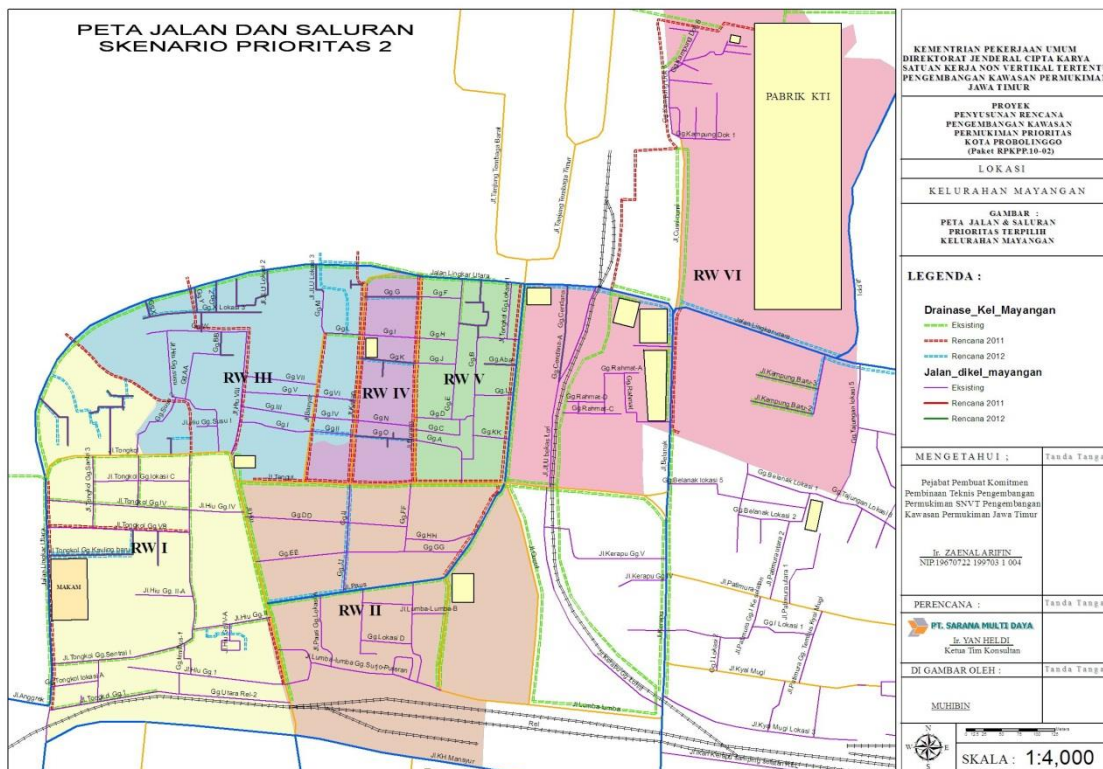
jaringan sosial personal serta memiliki kesamaan dalam aspek budaya, sosial dan agama.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Mayangan dan Pelabuhan Tanjung Tembaga

Gambar 5: Peta Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo



Sumber: Data Monografi Kelurahan Mayangan Januari-Juli 2017, diolah peneliti, 2017

Kelurahan Mayangan merupakan salah satu dari lima kelurahan yang terletak di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dengan luas wilayah sebesar 127,60 Km² dan jumlah penduduk sebesar 11.587 orang. Letak Kelurahan Mayangan berada di ujung utara Kota Probolinggo dan dihipit oleh beberapa Kelurahan. Dibuktikan dari peta diatas bahwa di sebelah utara Kelurahan Mayangan berbatasan langsung dengan laut, yakni Selat Madura.

Hal ini menjadikan wilayah di Kelurahan Mayangan memiliki suhu rata-rata yang berkisar antara 29°C- 32°C dengan banyaknya curah hujan sebesar 950 Mm/ tahun.

Sedangkan di sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kelurahan Sukabumi dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunharjo yang menyebabkan letak Kelurahan Mayangan ditengah dua kelurahan lain dengan ujung utara yang berhimpit dengan laut.

Jarak tempuh Kelurahan Mayangan dengan Kecamatan Mayangan berkisar 0,50 km yang bisa dilalui 5 menit menggunakan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak Kelurahan Mayangan dengan Kota Dati II berjarak 1,75 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 10 menit. Jarak yang dekat dengan pusat pemerintahan di Kota Probolinggo membuat fasilitas di Kelurahan Mayangan yang disiapkan. Fasilitas yang ada di Kelurahan Mayangan yaitu tersedianya masjid, pasar ikan, pasar tradisional dan indomaret/ alfamart/ perbalanjaan modern lainnya, sanggar menari dan teater di Kelurahan Mayangan, lapangan sepakbola dan voli, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan seperti berdirinya tiga puskesmas pembantu, dan industri rumahan, seperti industri perikanan, dan KTI.

Di ujung Utara Kelurahan Mayangan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura, terdapat pelabuhan yang melayani sektor perindustrian serta perikanan. Pelabuhan ini dinamakan Pelabuhan Tanjung Tembaga yang dijadikan oleh peneliti sebagai lokasi penelitian. Jarak tempuh Pelabuhan Tanjung Tembaga dengan Kota Dati II berkisar 2 km yang dapat ditempuh dengan waktu 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Letaknya yang berada di pusat pemerintahan kota membuat Pelabuhan Tanjung Tembaga semakin berkembang, hal ini dibuktikan dengan masuknya Pelabuhan Tanjung Tembaga sebagai Pelabuhan unggulan di Jawa Timur¹. Hal ini dikarenakan Pelabuhan Tanjung Tembaga memiliki letak yang strategis dari sisi bisnis sehingga sangat porspektif melayani sekitar 120 juta penduduk wilayah Indonesia

¹ dikutip pada <http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/20/gubernur-minta-pelindo-serahkan-pengelolaan-pelabuhan-tanjung-tembaga-probolinggo> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 15.13 wib

Timur². Dengan demikian, Pelabuhan Tanjung Tembaga dipercaya sebagai pelabuhan yang dapat menunjang perekonomian dan perdagangan di Jawa Timur.

Letak yang berbatasan langsung dengan Selat Madura membuat Kelurahan Mayangan memiliki potensi hasil tangkapan laut. Potensi hasil tangkapan laut termasuk dalam kegiatan usaha perikanan yang meliputi usaha perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut. Usaha Perikanan Tangkap atau penangkapan ikan di perairan umum dan pengolahan hasil laut dengan komoditas unggulan di perairan Mayangan berupa Kakap Merah, Kurisi, Kerapu, dan Lemuru. Sedangkan pengolahan hasil laut memproduksi berbagai jenis olahan hasil laut diantaranya pengolahan tepung ikan, pakan ternak, krupuk ikan, dan berbagai jenis olahan makanan yg terbuat dari bahan dasar ikan.

Potensi hasil laut dipercaya sebagai salah sumber daya yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Kelurahan Mayangan. Data menunjukkan bahwa penangkapan hasil laut di Kota Probolinggo mencapai 52.385,6 ton hasil tangkapan³. Lain halnya dengan penangkapan hasil laut, produksi hasil tangkapan per tahun mencapai 75,4 ton⁴. Sedangkan jumlah hasil usaha perikanan di Kelurahan Mayangan berkisar 380 ton.⁵

Potensi hasil tangkapan laut dan keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kelurahan Mayangan ini menjadikan sektor perikanan dan perdagangan seimbang dengan sektor lain. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Kelurahan Mayangan sebagai berikut:

“Ya kita banyak terbantu sebetulnya, soalnya masyarakat di Mayangan ini kan beragam, yang jadi nelayan itu banyak, terlebih di Kelurahan Mayangan sendiri, itu hampir 80% nelayan lah. Otomatis kan masyarakat juga mengikuti, jadi banyak yang dagang, yo dagang ikan atau budidaya ikan lain.”

² dikutip pada <http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/20/gubernur-minta-pelindo-serahkan-pengelolaan-pelabuhan-tanjung-tembaga-probolinggo> diakses tanggal 17 Maret 2017 pukul 15.13 wib

³ Dikutip dari hasil wawancara dengan Kasi Perikanan Tangkap disertai pencarian lewat situs dkp.jatimprov.go.id

⁴ Dikutip dari hasil wawancara dengan Kasi Perikanan Tangkap disertai pencarian lewat situs dkp.jatimprov.go.id

⁵ Dikutip dari data monografi Kelurahan Mayangan periode Januari-Juli 2017

(Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2017, di Kantor Kelurahan).

Dari kutipan di atas ditunjukkan bahwa Kelurahan Mayangan memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan dan juga mampu menyeimbangkan sektor lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan juga membutuhkan masyarakat yang akan mendistribusikan hasil tangkapan dan juga pembeli hasil tangkapan. Sehingga, mau tidak mau ada kolaborasi antar masyarakat yang berbeda pekerjaan namun saling terhubung di bidang perikanan dan juga perdagangan. Apabila potensi ini yang telah dimiliki di Kelurahan Mayangan dioptimalkan maka tidak menutup kemungkinan nelayan-nelayan di sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

4.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Monografi Kelurahan Mayangan periode Januari- Juli 2017, jumlah penduduk Kelurahan Mayangan sebesar 11.587 orang, yang terdiri dari jumlah laki-laki 5.829 orang dan perempuan sebesar 5.758 orang dengan kelompok umur yang bervariasi. Jumlah dan kelompok umur dapat dilihat di tabel 6 berikut ini:

Tabel 6: Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	517	501	1018
2	6-9	446	369	815
3	10-17	873	848	1721
4	18-25	800	750	1550
5	26-40	1390	1308	2698
6	41-45	466	487	953
7	46-55	707	779	1486
8	>55	627	714	1341
Jumlah				11582

Sumber: Data Monografi Kelurahan Mayangan periode Januari-Juli 2017, diolah peneliti, 2017

Dari tabel diatas bisa dilihat usia penduduk produktif di Kelurahan Mayangan mempunyai jumlah yang cukup banyak, \pm 9.749 jiwa. Umur rata-rata penduduk

Kelurahan Mayangan yang mulai aktif bekerja adalah 10 sampai 17 tahun, yang menunjukkan bahwa pada usia tersebut merupakan usia remaja. Usia remaja diartikan sebagai usia peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa, ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis (Hurlock, 2003). Perubahan psikologis pada usia remaja ini juga meliputi intelektual, emosional, dan kehidupan sosial. Di Pelabuhan Tanjung Tembaga, usia 15 tahun merupakan usia aktif bekerja, karena rata-rata banyak penduduk di Kelurahan Mayangan hanya mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat SD saja. Tidak hanya itu, melainkan juga pekerjaan sebagai nelayan dan tengkulak yang biasanya diturunkan dari orangtua kepada anaknya, membuat pendidikan tidak dipandang sebagai hal yang utama. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu tengkulak, sebagai berikut:

“...kalau saya SMP saja tidak lulus, dari kecil sudah ikut orangtua disini (TPI), makanya saya neruskan tengkulak ini. Untung juga lumayan.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017, di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga)

Selain itu, pernyataan dari Lurah di Kelurahan Mayangan, sebagai berikut:

“Kalau daerah sini pendidikan itu ya gak begitu penting bagi beberapa masyarakat. Ada yang nganggap penting, ada yang tidak. Memang di Kelurahan Mayangan banyakan yang tamat SD dan SMA. Padahal ya sekolah disini banyak tinggal milih. Tapi ya gitu, apalagi kalau nelayan, ya sudah anak suruh ikut jadi nelayan, SD sudah diajari, SMP sudah kerja.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 10 November 2017, di kantor Kelurahan Mayangan)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa usia produktif penduduk Kelurahan Mayangan cukup banyak, namun faktor kondisi sosial penduduk pada usia remaja yang mempunyai semangat untuk bekerja tinggi pada tingkat pendidikan tamat SMP membuat masyarakat Kelurahan Mayangan tidak mementingkan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dalam tabel tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Mayangan seperti dibawah ini:

Tabel 7: Tingkat Pendidikan Warga Kelurahan Mayangan

No	Keterangan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Tidak Tamat SD	1037
2	Tamat SD	3514
3	Tamat SMP	1687
4	Tamat SMA	2486
5	D1/D2	31
6	D3	54
7	S1	308
8	S2	19
9	Tidak/ Belum Sekolah	2446
Jumlah Total		11.582

Sumber: Data rekening penduduk Kelurahan Mayangan Januari-Juli 2017, diolah peneliti, 2017

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Mayangan masih rendah. Hal ini mempengaruhi keadaan sumber daya manusia di Pelabuhan Tanjung Tembaga, khususnya yang bekerja sebagai nelayan, karena tingkat pendidikan yang rendah membuat mayoritas nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga hanya berputar pada pekerjaan nelayan ataupun buruh kasar. Hal ini dibuktikan ketika pekerjaan nelayan tidak lagi menopang kebutuhan, maka banyak masyarakat bekerja sebagai Anak buah kapal ataupun buruh kasar. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan sudah mencoba untuk melakukan upaya pelatihan kepada nelayan kecil supaya nelayan tidak hanya menggantungkan pendapatan dari melaut, namun program ini tidak berjalan lancar, hal ini karena pemerintah tidak mendapatkan anggaran untuk melakukan pelatihan lebih lanjut dan juga beberapa nelayan sudah melakukan penolakan dari awal. Penolakan ini berupa tidak mengikutinya program yang telah dilaksanakan dimana nelayan memilih melaut dari pada mengikuti pelatihan dan juga tidak berkembangnya pelatihan yang telah dilakukan nelayan, sehingga dianggap membutuhkan biaya yang lebih. Hal ini diungkapkan oleh lurah sebagai berikut:

“Mau menyalahkan pemerintah ya gak mungkin juga soalnya dinas sudah berupaya menanggulangi kemiskinan ke nelayan. Ya nelayan juga punya pemikiran sendiri, jadi seenaknya. Dikembangkan buat ikan olahan tapi gak laku malah rugi. Ini kan juga berhubungan dengan ke uletan dan juga tingkat pendidikan. La paling banyak

tamat SD, mau dikasih materi marketing ya gak ngerti. Taunya jual ke itu-itu aja, ujung-ujungnya ngutang.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2017, di Kantor Kecamatan)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pola berpikir, dimana nelayan merasa tidak begitu penting mengikuti pelatihan yang diadakan pemerintah dan juga nelayan terjebak kepada peminjaman utang kepada tengkulak. Dengan melakukan hubungan yang susah diputus membuat nelayan yang melakukan pinjaman tersebut mengembalikan kepada tengkulak dalam bentuk ikan yang jika dijual harganya jauh lebih rendah dipasaran.

Namun tidak semua nelayan yang berpendidikan rendah mengalami perekonomian yang rendah juga. Salah satu juragan kapal besar yang hanya tamat SD memiliki penghasilan tigapuluh juta tiap bulannya. Hal ini dikarenakan kepemilikan modal yang dimiliki jauh lebih tinggi didukung dengan lamanya pengalaman yang dimiliki. Penghasilan tidak tetap seperti nelayanlah yang mengakibatkan masyarakat nelayan harus pintar menyimpan uang untuk digunakan dalam memnuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum mayoritas penduduk di Kelurahan Mayangan bermata pencaharian sebagai pegawai/PNS dan Wiraswasta. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8: Jenis Mata pencaharian dan jumlah penduduk yang bekerja

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Wiraswasta	1020
2	Pegawai/ PNS	1663
3	Tani	14
4	Buruh	60
5	Nelayan	527
6	Jasa	89
Jumlah Total		3.373

Sumber: RPJM Desa Tambakrejo, diolah peneliti, tahun 2016

Jumlah penduduk di Kelurahan Mayangan yang bekerja sebesar 3.373, sedangkan angka usia penduduk produktif di Kelurahan Mayangan sebesar \pm 9.749 jiwa. Hal ini membuktikan bahwa tidak banyak penduduk di Kelurahan Mayangan yang bekerja, entah itu karena tingkat pendidikan yang rendah ataupun hal-hal lainnya. Sedangkan

tingkat pendidikan tertinggi di Kelurahan Mayangan adalah tamat SD. Hal ini membuktikan keberhubungan antara tingkat pendidikan, usia produktif mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Mayoritas penduduk di Kelurahan Mayangan bekerja sebagai pegawai swasta ataupun PNS, wiraswasta dan nelayan. Tingkat pendidikan yang rendah menunjukkan bagaimana kualitas SDM sehingga mempengaruhi pekerjaan. Di daerah Kelurahan Mayangan terdapat perusahaan besar, seperti PT. KTI ataupun lembaga pemerintahan yang terletak di Kota Probolinggo dan sekitarnya. Keberadaan perusahaan dan lembaga pemerintahan inilah yang kemudian mampu menyerap tenaga kerja di sekitar kelurahan mayangan seperti pegawai dan PNS. Sama halnya dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembaga di utara Kelurahan Mayangan yang menjadikan banyak masyarakat bekerja di sektor kelautan seperti nelayan. Hal ini dikarenakan tersedianya SDA yang ada di daerah tempat tinggal menjadikan masyarakat memanfaatkan hal tersebut.

4.3 Polemik Peraturan Menteri No 02 Tahun 2015

Di beberapa wilayah Indonesia, penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik/ Cantrang (*seine nets*) telah marak digunakan. Hal ini telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan menimbang kerusakan ekologis dan penurunan sumber daya ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan memberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik/ Cantrang (*seine nets*) di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Pada kenyataannya, persoalan alat tangkap nelayan di Indonesia sudah muncul sejak era Presiden Soeharto. Pada tahun 1980, para nelayan kecil meminta kapal pukat harimau (*trawl*) dilarang beroperasi karena dianggap telah merugikan mereka. Soeharto pun

mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39/1980 tentang penghapusan jaring trawl yang berlaku mulai 1 Oktober 1980 untuk perairan Laut Jawa yang juga berlaku di Pulau Sumatera mulai 1 Januari 1981⁶.

35 tahun kemudian, polemik alat tangkap nelayan kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Diawali ketika Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan No. 2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) yang juga termasuk pelarangan penggunaan cantrang sesuai dengan aturan ini yang mulai ditetapkan 8 Januari 2015. Peraturan ini kemudian mendapat protes yang keras dari para nelayan. Mereka menolak larangan penggunaan cantrang. Nelayan menilai, cantrang berbeda dengan trawl yang memang membahayakan lingkungan. Sejak saat itu, gelombang aksi unjuk rasa nelayan terus terjadi, bahkan sampai di depan Istana Negara, Jakarta.

Pelarangan ini akhirnya membuat pemerintah larangan penggunaan cantrang. Hingga saat ini, larangan penggunaan cantrang sudah tiga kali diperpanjang pemerintah. Perpanjangan pertama ditetapkan hingga Desember 2016, melalui Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI⁷. Alasan perpanjangan ini selain penolakan keras dari masyarakat nelayan, namun juga karena pemerintah belum menuntaskan alat pengganti cantrang.

Namun, pelarangan cantrang kembali diperlonggar hingga Juni 2017, melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017⁸. Setelah itu, kelonggaran ketiga berlangsung hingga akhir Desember 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampungan

⁶ Dikutip pada <https://tirto.id/sampai-kapan-polemik-larangan-cantrang-cCwq> diakses pada tanggal 02 Januari 2018 pukul 12.21 wib

⁷ Dikutip melalui kkp.go.id mengenai surat edaran no. 72/MEN-KP/II/2016 pada tanggal 10 November 2017 pukul 12.30 wib

⁸ Dikutip melalui kkp.go.id mengenai surat edaran no. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 pada tanggal 10 November 2017 pukul 12.45 wib

Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI. Hal ini dikarenakan karena alat tangkap pengganti yang belum tuntas.

Ketika diawal tahun 2017 aturan ditetapkan, masyarakat nelayan merasa belum siap berpindah ke alat tangkap baru. Hal ini dirasa cantrang dan pukat hela memiliki keunggulan dibanding alat tangkap lain yang dirasa lebih kuno. Selain itu, hasil tangkap ikan pada alat tangkap cantrang dan pukat hela mampu menangkap banyak sekali ikan, sehingga menghasilkan nilai penjualan yang lebih tinggi. Sehingga terjadi penolakan kembali oleh masyarakat nelayan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Penolakan yang ramai dilakukan oleh masyarakat nelayan di awal tahun 2017 juga terjadi pada masyarakat nelayan di Kota Probolinggo yang sebagian besar menggunakan alat tangkap cantrang. Pada saat itu, masyarakat merasa bahwa penggunaan alat tangkap cantrang mampu menangkap ikan lebih banyak dan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh juragan kapal, sebagai berikut:

"Pemerintah dirasa kurang mendukung rakyat. Kalau bukan rakyat yang ngambil ya siapa lagi. Cuma aturannya memang harus jelas juga, masyarakat harus normatif juga. Kalau mau dilarang harus ada solusi yang jelas. Harapan kita, pemerintah harus mendukung rakyat dan memberi aturan yang betul gitu. Rakyat itu tuntutananya tidak banyak. Cuma bisa bebas aja, bisa kerja, ada dukungan dari pemerintah. Dulu kan cantrang itu dari Pemerintahan lama, dari jamannya Pak Harto bukan yang sekarang, yang terakhir di jaman Bapak SBY. Malah di jaman Pak SBY dapat bantuan cuma di pemerintahan yang sekarang, Bu Susi kok malah dilarang. Padahal dulu didukung oleh pemerintah. Kalau memang dulu tidak ada dukungan dari pemerintah, jadi saya punya kapal tidak sampai jor-joran sampai 5. Dulu dibantu sama pemerintah, dari coolbox, saya dapat bantuan banyak itu, harganya 50 juta. 1 coolbox luasnya 4x8, tapi ya di kasih sekat gitu. Kan itu dukungan dari pemerintah, dulu tapi. Sekarang ada pelarangan tapi gak ada solusi. Nanti ya bakal demo lagi."

(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017, di rumah informan)

Dari kutipan diatas diungkapkan adanya perbedaan dukungan terhadap penggunaan alat tangkap cantrang oleh pemerintah. Dimana pada pemerintahan terdahulu ketika cantrang masih diperbolehkan membuat masyarakat menaruh investasi akan kapal cantrang karena hasil yang lebih menggiurkan dibanding penggunaan jaring insang.

Ketika cantrang dilarang, masyarakat merasa tidak adil dengan larangan tersebut dan masyarakat enggan berpindah pada alat tangkap yang baru.

Pada saat ini, alat tangkap cantrang hanya diberlakukan awal tahun saja karena demo yang dilakukan masyarakat membuat Pemerintah memberi waktu sejenak kepada mereka untuk mempersiapkan penggunaan alat tangkap yang baru yang akan diberlakukan diawal tahun 2018. Masa seperti ini, disebut masa relaksasi. Namun pada kenyataannya, masyarakat nelayan belum sepenuhnya mempersiapkan diri terhadap alat tangkap yang baru. Ada beberapa faktor dan juga kendala akan peralihan alat tangkap ini. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Perikanan Tangkap, sebagai berikut:

“Ya pertama untuk di alat tangkap mereka kan juga harus mengganti alat tangkap dan jumlahnya tidak murah karena bisa sampai ratusan juta. Yang kedua, mereka selama ini juga ada yang sudah punya tanggungan ke bank. Misalnya untuk tanggungan alat tangkap cantrang itu mereka pinjam ke bank, seandainya itu harus diganti dengan alat baru yang hasilnya menurut mereka belum jelas dan tidak sebanyak cantrang, nah untuk angsuran ini nanti bagaimana, ya biaya hidup penggantian ini juga gimana. Bagi mereka, selama ini belum ada yang menyamai cantrang. Soalnya cantrang itu kebawah jadi dapat ikan banyak, soalnya ngeruk semua jadi dapat ikan banyak. Kalau kita arahkan ke greenlap yang jaring insang hanya disini-sini saja, sedangkan di perairan sini di Selat Madura gak sebanyak cantrang. Jadi kan pendapatannya tidak sebanyak itu. Selain itu, juga harus ada pelatihannya juga karena kan gak semua bisa menggunakan karena yang biasanya pakai cantrang beralih ke alat tangkap lain harus ada pelatihannya juga dan itu juga dirasa susah soalnya merubah garden kapal yang otomatis itu juga menambah biaya lagi.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2017, di Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo)

Permasalahan menurunnya pendapatan ikan menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Selain itu, biaya yang cukup besar digunakan untuk merubah alat tangkap membuat masyarakat semakin kontra terhadap peraturan yang akan diberlangsungkan. Pernyataan salah satu Kasi Perikanan Tangkap diatas menunjukkan tidak ada kesiapan yang dilakukan oleh masyarakat mengingat saat ini adalah masa dimana mereka harus menyesuaikan diri tidak menggunakan cantrang sebelum peraturan benar-benar dilaksanakan.

Kendala dan permasalahan tidak hanya terjadi pada masyarakat nelayan, namun juga terjadi pada Dinas Perikanan di Kota Probolinggo. Disebutkan bahwa pada tahun 2017 ini mulai diberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan⁹. Sehingga jika tahun sebelumnya Dinas Perikanan dibantu dengan Ilmu Kelautan, saat ini Ilmu Kelautan menjadi kewenangan Provinsi yang dahulu berwenang akan 4-12 mil wilayah laut, kini diperluas menjadi 0-12 mil. Tentu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut di tiap daerah, terlebih lagi dalam pelarangan cantrang dibutuhkan Ilmu Kelautan di daerah untuk memberlakukan pemberdayaan dan juga kelompok kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Perikanan Tangkap ini, yaitu:

“Pelarangan alat tangkap cantrang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil ekosistem laut serta menjaga dari kerusakan. Untuk itu, Dinas Perikanan berupaya untuk melakukan sosialisasi dan juga pendampingan. Sosialisasi telah dilakukan baik formal maupun tidak formal kepada nelayan. Sedangkan untuk proses pendampingan, diperlukan pembuatan kelompok kerja atau pokja. Namun yang belum dilakukan adalah pembuatan pokja, karena tidak turunnya anggaran untuk pokja dari pusat, serta berpindahnya Ilmu Kelautan di daerah ke Provinsi. Hal ini menjadikan daerah tidak memiliki wewenang terhadap hal yang berhubungan dengan kelautan. Untuk itu, Dinas telah memberikan bantuan berupa pemberian alat tangkap baru untuk nelayan dengan kapal kurang dari 10 GT dan bantuan berupa pemberian akses pinjaman modal ke Bank kepada nelayan dengan kapal diatas 10 GT. Di Kota Probolinggo sendiri, telah ada 2 nelayan kecil yang telah mendapatkan bantuan alat tangkap, namun belum terealisasi dari segi prakteknya karena tidak adanya modal terhadap instruksi pelatihan alat tangkap baru kepada Dinas Perikanan. Hal ini yang kemudian menjadi polemik permasalahan.”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017, di Kantor Dinas Perikanan Kota Probolinggo)

Dari pernyataan Kasi Perikanan Tangkap diatas dinyatakan bahwa, upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas nelayan sudah dilakukan oleh pemerintah ataupun Dinas Perikanan melalui sosialisasi dan juga pemberdayaan. Namun pemberdayaan kelompok usaha bersama tidak lagi dilakukan karena Ilmu Kelautan tidak berada di daerah melainkan berada di Provinsi, sehingga Dinas Perikanan Kota Probolinggo kehilangan

⁹ Dikutip pada <http://peraturan.go.id/uu/nomor-23-tahun-2014.html> pada tanggal 10 November 2017 pukul 13.39 wib

wewenang untuk membuat kelompok kerja dan juga melakukan pemberdayaan. Selain itu, tidak turunnya anggaran untuk melakukan pemberdayaan dan instruksi penggunaan alat tangkap baru menjadi masalah utama yang dihadapi Dinas Perikanan di daerah. Hal ini menyebabkan kesiapan yang harus dibangun masyarakat pada masa relaksasi ini seakan tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah.

Menghadapi peraturan yang akan dilaksanakan awal tahun 2018 ini, membuat banyak masyarakat yang kontra terhadap peraturan ini. Namun sebenarnya masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan serta sumber daya di laut perlu dilakukan tapi tidak dengan pelarangan cantrang. Pelarangan cantrang dan pembentukan sumber daya laut yang berkualitas adalah satu kesatuan yang saling berhubungan, namun tidak bagi masyarakat nelayan. Dua hal ini seakan tidak berhubungan sama sekali yang bagi mereka penggunaan alat tangkap tidak mempengaruhi kerusakan sumber daya laut di daerah Probolinggo. Hal ini terjadi karena masyarakat nelayan bukan mencari ikan, namun mengejar ikan, sehingga cantrang tidak hanya diterapkan di Selat Madura saja, namun bisa keluar Selat yang memungkinkan seperti Selat Bali dan alat tangkap cantrang yang digunakan pada selat yang besar dan membutuhkan beberapa alat untuk mendeteksi karang-karang yang ada dilaut sehingga dirasa tidak merusak karang serta biota laut lainnya. Hal ini diungkapkan oleh juragan kapal, sebagai berikut:

“...iya itu, tapi kok kayak pemerintah itu apa kata rakyat dah. Nanti demo lagi aja. Katanya merusak karang atau apalah itu, tapi kalau jaring gak kira nyangkut ke karangnya gak kira diterobos. Kan kita pakai alat GPS, kalau ada karangnya ya mundur cari yang gak ada karangnya. Persoalannya memang cantrang ini menjanjikan, mensejahterakan ABK juga, kayaknya mau hidup layak itu enak. Kan bisa merekrut tenaga kerja, disamping dilaut di darat kan juga bisa pengolahan ikan.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017, di rumah informan)

Dengan pernyataan seperti diatas, disebutkan ketidakberhubungan antara peraturan pelarangan cantrang dengan merusaknya biota laut serta isinya. Sehingga, masyarakat seringkali menyalahkan peraturan yang tidak memiliki solusi terhadap kegelisahan

masyarakat. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Probolinggo berupa pemberian bantuan modal untuk masyarakat dengan kapal diatas 10 GT dan pemberian alat tangkap baru berupa jaring insang untuk masyarakat dengan kapal dibawah 10 GT. Namun, pemberian bantuan ini lagi-lagi dianggap kurang efisien oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat mau menerima, mengolah bantuan dan juga menggunakan alat tangkap baru. Seperti pemberian modal dimana masyarakat melihat bahwa modal tersebut akan memberatkan masyarakat dalam proses pencicilan karena modal tersebut tidak semua masyarakat mengerti akan dibuat untuk apa terlebih pengetahuan masyarakat yang terbatas karena hanya mengetahui masalah laut dan sekitarnya. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang juragan kapal akan kekhawatiran pearturan yang akan dilaksanakan dan juga ketidakefektifan bantuan yang diberikan, sebagai berikut:

“Ada modal, cuma kesepakatan kerja transaksinya gak ada. Soalnya nelayan kan juga harus pinter soal dagang, kalau soal modal ya gampang aja. Nanti dikasih modal, mau diapain, mau dikasih alat apa yang bisa produktif. Tidak adanya tanggapan juga dari pemerintah, kita mau beralih apa? Nanti modalnya habis ditengah jalan, kita harus setor terus tiap bulan. Padahal alat cantrang di lain negara tidak apa, cuma arelnya diabatasi. Kalau di Natuna malah banyak yang pakai trawl dan pukot harimau.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017, dirumah informan)

Dari kutipan diatas disebutkan bahwa pemberian modal tidak semata-merta membantu mengatasi permasalahan masyarakat yang dialami saat ini. Masyarakat solusi yang jelas dari pemerintah. Disisi lain, pemerintah mengalami permasalahan yang menghambat proses bantuan di masa relaksasi ini. Sehingga terjadi hal yang dirasa kurang tepat bagi kedua belah pihak dan ketidaksiapan yang dirasakan bagi kedua belah pihak. Tentunya, keadaan ini berdampak di masa relaksasi ini, dimana masyarakat yang tetap kokoh mempertahankan alat tangkap cantrang dengan berbagai alasan tertentu dan juga ketidakmampuan pemerintah yang dirasa masyarakat menjadikan ketidakakuran bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

4.4 Gambaran Informan

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang bisa memberikan informasi terkait dengan penelitian. Adapun informan yang dipilih diantaranya:

a. Haji Muklas (nelayan besar dan nelayan cantrang)

Haji Muklas merupakan juragan kapal yang berusia 70 tahun. Haji Muklas merupakan pemilik kapal besar dan cantrang yang telah 50 tahun lebih bergelut di dunia perikanan. Di tahun 70an hingga 90an Haji Muklas bekerja sebagai nelayan dengan posisi ABK hingga nahkoda kapal. Karena lamanya Haji Muklas bergelut di sektor laut, membuat beliau memiliki 5 kapal yang terdiri dari 4 kapal cantrang dan 1 kapal besar (diatas 30 GT). Haji Muklas mempekerjakan 30-40 orang yang bekerja sebagai ABK sebanyak 30-35 orang dan 5 orang nahkoda. Jumlah pekerja akan berubah tiap waktu sesuai dengan jadwal melaut yang dilakukan oleh nahkoda dan juga kebutuhan pekerja yang akan bekerja melaut. Menjadi empat juragan kapal membuat Haji Muklas yang hanya tamat SD mendapatkan keuntungan kurang lebih 30 juta tiap bulannya. Keuntungan ini sudah melewati pembagian hasil antar ABK dengan peraturan pembagian tujuh banding tiga dimana tujuh persen milik pekerja dan tiga puluh persen milik juragan kapal.

b. Mas Alfian (Tengkulak, investor)

Mas Alfian merupakan tengkulak besar di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga yang berusia 26 tahun. Ia telah melakukan pekerjaan sebagai tengkulak kurang lebih selama 10 tahun dimana ia meneruskan usaha orangtua yang telah mengajari kegiatan di sektor perikanan ini dari SMP. Pendidikan terakhir yang diraih Mas Alfian hanya tamat SD karena sedari kecil ia sering membantu dan ikut orangtua berdagang ikan. Ia memiliki 12 karyawan yang terdiri dari 8 orang memilah dan membersihkan ikan dan 4 pengangkut. Tengkulak di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga bekerja di tiap

hari kecuali jumat. Mas Alfian mengkulak kurang lebih 15 ton (1 truk= 5,5 ton). Namun, saat belum terjadi masa relaksasi¹⁰, Mas Alfian bisa mengkulak sebanyak 16 hingga 20 ton dalam sehari. Hasil yang diambil, dikirim ke Perusahaan-perusahaan di Bali dan Lombok. Sebagai tengkulak besar di Pelabuhan Tanjung Tembaga, ia berlangganan banyak kepada juragan kapal dan Pangamba (untuk hasil yang banyak, jika terjadi kekurangan hasil kulak). Ia memberikan hutangan sementara kepada juragan kapal sesuai dengan banyak ikan yang akan dibeli, sehingga juragan kapal akan memiliki tanggung jawab memberikan ikan kepada Tengkulak yang sudah banyak memberikan hutangan. Jika hasil kulakan dirasa kurang, ia membeli kepada Pangamba' di sekitar Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Hasil ikan dengan Kapal cantrang dijual kepada perusahaan pakan ternak karena kondisi ikan yang kecil dan belum siap dipanen. Hasil pembelian dan penjualan antara tengkulak, pangamba' dan juragan kapal sangat fluktuatif dan bisa berubah tiap jam.

c. Pak Muhyi (Tengkulak, investor)

Pak Muhyi berusia sekitar 40 tahun dan juga bekerja sebagai Tengkulak di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo. Sama halnya seperti Mas Alfian, beliau memiliki 10 pekerja yang terdiri dari 6 orang yang membersihkan dan memilah ikan serta 4 orang pengangkut. Sehari-harinya, beliau membeli hasil tangkapan sebanyak 10 ton. Beliau berlangganan kepada juragan kapal balai dan kapal cantrang. Hasil tangkapan yang telah dikulak oleh Pak Muhyi akan didistribusikan ke daerah Lombok dan Pasuruan. Untuk pendistribusian di Perusahaan Pasuruan merupakan ikan hasil tangkap kapal cantrang yang akan digunakan untuk pakan ternak. Pak Muhyi telah bekerja sebagai tengkulak selama 10 tahun, sehingga membuat beliau memiliki

¹⁰ Adanya pendampingan dan peralihan untuk menggunakan alat tangkap baru dalam pelarangan alat tangkap cantrang atau bisa juga disebut masa transisi.

hubungan kepada juragan kapal yang telah dipercayai lama untuk menukarkan hasil tangkapannya.

d. Ibu Tris (Pangamba' dan nelayan kecil)

Pangamba' merupakan istilah dalam bahasa Madura yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah penghadang. Di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, profesi sebagai Pangamba' dilakukan oleh perempuan dan juga memiliki kapal untuk ia ambil hasil tangkapannya dan dijual kepada pasar ikan lainnya atau kepada Tengkulak. Ibu Tris adalah salah satu Pangamba' di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Ibu Tris saat ini berusia 35 tahun (pindah keatas) dan telah bekerja kurang lebih 10 tahun sebagai pangamba' dan juragan kapal. Sehari-hari beliau mengambil paling banyak 1 ton hasil tangkapan. Ibu Tris juga memiliki 1 kapal kecil yang hasil tangkapannya beliau jual kepada Tengkulak dan Pedagang Ikan di Pasar sekitar Kota Probolinggo. Ibu Tris memiliki pekerja sebanyak 10 hingga 20 orang yang terdiri dari 10 orang ABK, 1 orang nahkoda, 7 orang pekerja yang memilah ikan dan 2 orang pengangkut. Jika hasil tangkapan yang dimiliki oleh kapalnya tidak mencukupi, maka beliau akan membeli dari Pangamba' lain. Dikarenakan memiliki kapal sendiri, maka beliau juga memiliki langganan yang tidak tetap, serta pembeli yang tidak tetap. Hal ini juga dikarenakan dengan tergantungnya harga pasar yang sangat fluktuatif tiap jamnya.

e. Ibu Dewi (Pangamba)

Sama seperti Ibu Tris, Ibu Dewi merupakan Pangamba' yang saat ini berumur sekitar 50 tahun. Beliau telah bekerja sebagai Pangamba' kurang lebih 20 tahun. Hasil tangkapan yang diambil kurang dari 1 ton. Banyaknya pekerja yang dimiliki adalah 5 orang yang terdiri dari 1 orang pengangkut dan 4 orang pemilah ikan. Hasil tangkapan kemudian beliau jual kepada Pangamba' lainnya, Tengkulak dan juga pedagang pasar

ikan di pasar. Lamanya beliau berprofesi menjadi Pangamba' membuat beliau dikenal dan memiliki hubungan dengan juragan kapal lainnya ataupun aktor yang ada di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo.

f. Ibu Lia

Tri Ria Yuliana atau Bu Lia merupakan salah satu staff yang bertugas di Dinas Perikanan Kota Probolinggo. Beliau memiliki Jabatan sebagai Kasi Perikanan Tangkap. Sesuai dengan jabatannya, beliau bertugas menghimbau dan melakukan sosialisasi terkait masalah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Kota Probolinggo. Hal ini berhubungan dengan Permen no 02 tahun 2015 yang akan melakukan larangan terhadap cantrang dan pukat. Dengan adanya peraturan tersebut, membuat Ibu Lia sering memberikan sosialisasi dan melakukan pendampingan secara tidak formal kepada nelayan di Kota Probolinggo.

g. Bapak Abbas (Camat Kecamatan Mayangan)

Bapak Abbas merupakan Camat di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo yang menjabat pada saat ini. Bapak Abbas berusia 42 tahun dan telah menjabat selama 2 tahun. Dalam masa jabatannya Bapak Abbas banyak merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kecamatan Mayangan baik dari daerah maupun orang-orangnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang di dapat di Kecamatan Mayangan, salah satunya penghargaan atas kinerja Kecamatan di Probolinggo. Bapak Abbas juga banyak menjalankan program di bidang pengembangan dan budaya. Salah satunya, Kecamatan Mayangan seringkali mengadakan kerja bakti Benteng di Benteng kecamatan Mayangan yang merupakan salah cagar budaya di Kota Probolinggo. Untuk Program pengembangan yang dilaksanakan banyak sekali, salah satunya

Pembinaan Ketua RT dan RW di Kecamatan Mayangan untuk meningkatkan kerja ketua RT dan RW, Pembinaan Ibu-Ibu PKK dan lain-lain.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Relasi Antar Aktor di Pelabuhan Tanjung Tembaga Sebelum Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Pelabuhan Tanjung Tembaga yang terletak di ujung utara Kota Probolinggo merupakan Pelabuhan yang melayani di sektor perekonomian serta perdagangan di Jawa Timur. Selain itu, letaknya yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan Pelabuhan Tanjung Tembaga kaya akan hasil laut, misalkan ikan kakap, kerapu, kurisi, tuna dan jenis-jenis ikan lainnya. Hal ini menjadikan beberapa masyarakat di sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga, khususnya Kelurahan Mayangan bekerja sebagai nelayan dan hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan serta hasil laut.

Aktivitas masyarakat di Pelabuhan Tanjung Tembaga dalam memanfaatkan lingkungan terbagi dalam sektor perikanan dengan bentuk kegiatan menangkap ikan dan sektor perdagangan dengan bentuk kegiatan pendistribusian hasil tangkap. Kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang terbentuk berdasarkan kepemilikan modal, yaitu nelayan besar, nelayan kecil dan nelayan cantrang. Kegiatan penangkapan ikan terbentuk atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup yang disebut sebagai pekerjaan. Dalam kegiatan penangkapan ikan terdapat suatu proses yang membentuk sebuah relasi antara ketiga aktor nelayan. Hal ini dikarenakan nelayan besar mempunyai kepemilikan modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan kecil. Seperti kepemilikan kapal yang GT nya lebih tinggi akan mampu meraup banyak hasil tangkapan laut dan juga kesempatan melaut di luar Selat Madura. Tak ketinggalan juga, nelayan besar yang biasa disebut juragan kapal mampu mempekerjakan lebih dari 30 Anak Buah Kapal (ABK) untuk saling berhubungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Berbeda dengan nelayan besar atau juragan kapal yang memiliki kepemilikan modal lebih tinggi, nelayan kecil memiliki kapal kurang dari 10 GT yang membuat nelayan kecil hanya mampu berlayar di sekitar Selat Madura saja dengan jarak kurang lebih 10 mil dari Pelabuhan Tanjung Tembaga. Hal ini berhubungan dengan perolehan hasil tangkapan yang tidak banyak dibandingkan dengan nelayan besar, karena Selat di sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga akan mengalami musim paceklik di musim bulan purnama yang akan kekurangan ikan di setiap awal bulannya, sehingga nelayan kecil akan mendapatkan hasil tangkapan yang jauh lebih sedikit dan juga keterbatasan kapal yang tidak bisa melebihi jarak diatas 10 mil untuk mengejar ikan. Terlebih, kapal milik nelayan kecil di Pelabuhan Tanjung Tembaga hanya membutuhkan ABK dibawah 10 orang yang otomatis tenaga untuk memperoleh hasil tangkapan tidak sebanyak pada kapal nelayan besar.

Pada nelayan yang memiliki kapal cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga sangat diuntungkan, karena alat tangkap cantrang mampu mengambil hasil tangkapan yang banyak dibandingkan dengan alat tangkap lain di Kota Probolinggo. Kapal cantrang sendiri memiliki berat diatas 10 GT, sehingga termasuk dalam kategori kapal besar. Sehari-harinya, Juragan kapal yang bernama Haji Muklas mampu memperoleh hasil tangkapan yang sangat besar dengan menggunakan alat tangkap cantrang. Dari kepemilikan modal ini, Haji Muklas yang merupakan nelayan besar dan nelayan cantrang, mampu mempekerjakan orang yang memiliki keahlian melaut dan yang mempunyai sumber daya berupa tenaga. Keahlian melaut dimiliki oleh nahkoda kapal atau biasa disebut *Tekong* yang telah memiliki lisensi dari Kesatgas Darat dan juga telah mengikuti beberapa test. Dengan keahlian yang dimiliki, *Tekong* bisa disebut sebagai orang kepercayaan juragan kapal, sehingga *Tekong* memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengajukan ABK kepada juraga kapal.

Dalam sektor perdagangan yang dapat dilihat dari kegiatan pendistribusian hasil tangkapan, terdapat aktor yang terlibat antara lain Tengkulak dan juga *Pangamba'*. Tengkulak berpusat di Pasar Ikan/ Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Aktivitas di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga di mulai pada pukul 08.00 hingga 15.00 wib. Pusat aktivitas akan dimulai ketika kapal datang di parkiran pasar ikan pada pukul 11.00 wib hingga pukul 13.00 wib dan menjual langsung kepada Tengkulak. Di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga, sistem penjualan tidak melalui sistem lelang seperti di tempat lain, melainkan pemberian hutangan kepada juragan kapal atau secara langsung ketika kapal datang. Hal ini seperti diungkapkan juragan kapal, sebagai berikut:

“kalau disini jualnya sudah gak pakai lelang. Sistemnya langsung, yang mau ngulak langsung aja ke pasar, cepat-cepatan atau biasanya kebanyakan disini ini pakai sistem hutangan. Nanti juragan dikasih hutang sama tengkulak, misalnya 15 juta. Nanti ikannya langsung kasih ke tengkulak. Kalau saya gak pakai gitu, langsung aja, biar gak banyak hutang.”

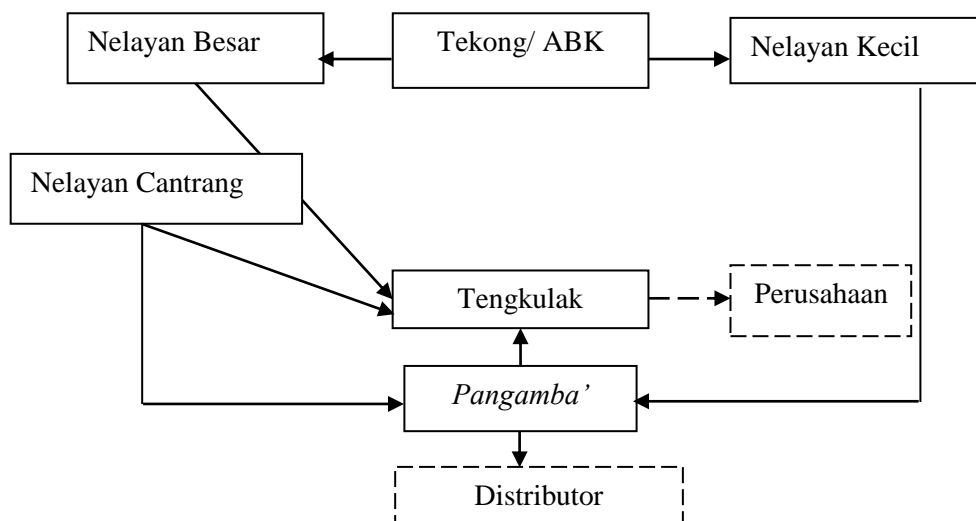
(wawancara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017, di rumah informan)

Proses relasi juga terjadi kepada *Pangamba'* di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Dimana *Pangamba'* merupakan perempuan pengkulak ikan dalam jumlah lebih sedikit dibanding Tengkulak. *Pangamba'* diambil dari istilah bahasa Madura yang berarti penghadang, oleh sebab itu, sebagian besar *Pangamba'* di Pelabuhan Tanjung Tembaga merupakan perempuan dengan Suku Madura atau tinggal di Pulau Gili Ketapang yang dapat ditempuh selama 45 menit menggunakan kapal. *Pangamba'* di Pasar ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga menjual ikan yang telah dibelinya kepada Tengkulak atau menjualnya langsung kepada Pedagang di Pasar Kota Probolinggo. Tentu, harga ikan yang terdapat di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga sangat fluktuatif dan bisa berubah tiap jamnya.

Tindakan ekonomi antar aktor dalam sektor perdagangan serta perikanan sangat erat kaitannya dengan pencarian keuntungan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Jika ditarik

garis dari penjelasan diatas, maka relasi yang terjadi antar aktor adalah sebagai berikut seperti digambarkan pada diagram:

Bagan 1: Relasi Antar Aktor Sebelum Pelarangan Cantrang



(Sumber: Diolah peneliti, 2017)

Keterangan:

—————> Berhubungan dalam membangun relasi

- - - - -> Berhubungan dalam membangun relasi namun tidak masuk dalam penelitian

Dapat dilihat bahwa dalam relasi tersebut tidak hanya tentang kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan namun juga ada kegiatan perdagangan yang dilihat melalui pemasok oleh tengkulak dan *pangamba'*. Dari gambar diatas, ABK dan *tekong* menyediakan tenaga dan keahlian melaut untuk nelayan besar, cantrang dan kecil. Hal ini disebabkan nelayan memiliki kepemilikan modal berupa kapal, sehingga membutuhkan

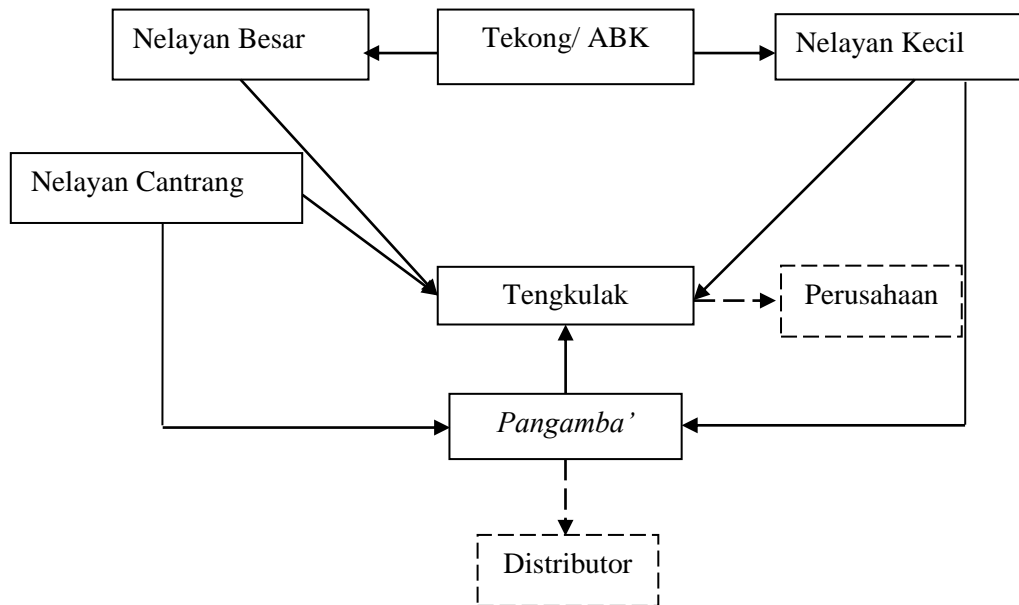
orang yang akan menjual tenaganya. Dengan bantuan ABK dan *tekong*, nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang akan dijual kepada tengkulak dan *pangamba*'. Tengkulak akan memberikan hutangan sementara kepada nelayan yang dimaksudkan untuk membantu nelayan di musim-musim paceklik. Namun, motif pemberian hutang membuat nelayan memiliki hutang sosial kepada tengkulak. Sehingga, nelayan memberikan hasil tangkapan kepada tengkulak sebagai orang pertama yang membeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan biasanya. *Pangamba*' akan membeli ikan kepada nelayan dalam jumlah kecil dan akan menjualnya kembali kepada tengkulak. Dari penjelasan diatas, posisi tengkulak tentu menjadi dominan, dimana ia harus mengambil ikan sebanyak-banyaknya, jika ikan yang didapat kurang tentu tengkulak akan membeli kepada *pangamba*'.

5.2 Tindakan Ekonomi Aktor Nelayan Pada Masa Transisi.

Terbentuknya relasi tindakan sosial dan ekonomi antara aktor nelayan pada kegiatan penangkapan ikan dan juga pendistribusian di Pelabuhan Tanjung Tembaga menjadi fokus penelitian ini. Pada sektor perikanan dimana kegiatan penangkapan ikan ditunjukkan oleh nelayan yang dalam penelitian ini dianalisis menggunakan tiga proposisi Granovetter yakni tentang tindakan ekonomi. Hal ini dikarenakan tiga proposisi tersebut bukan hanya melihat tindakan ekonomi antar aktor nelayan, namun juga melihat tindakan sosial serta melihat kondisi dibalik semua itu.

Tindakan ekonomi antar aktor dalam sektor perdagangan serta perikanan sangat erat kaitannya dengan pencarian keuntungan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Jika ditarik garis dari penjelasan diatas, maka relasi yang terjadi antar aktor adalah sebagai berikut seperti digambarkan pada diagram:

Bagan 2: Relasi Antar Aktor di Masa Transisi



(Sumber: Diolah peneliti, 2017)

Keterangan:

—————> Berhubungan dalam membangun relasi

- - - - -> Berhubungan dalam membangun relasi namun tidak masuk dalam penelitian

Relasi yang terbentuk antar nelayan dilihat dari tindakan ekonomi para nelayan besar, nelayan kecil dan juga nelayan cantrang yang memilih bekerja sama dengan ABK dan *tekong*. Adapun nelayan besar memiliki beberapa pola dan motif, seperti pernyataan juragan kapal dan pemilik kapal cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, mengatakan:

“Kalau untuk pekerja yang akan kerja kepada saya, baik itu ABK ataupun *tekong* bahasanya kalau disini, bahasa Indonesianya nahkoda itu tergantung kepada mereka. Jadi semisalnya, untuk memilih *tekong*, saya bisa menawarkan orang yang datang pada saya, ataupun ABK yang memilih dengan sistem voting. Bilapun saya sudah punya, tetap harus persetujuan ABK, karena *tekong* kan pemimpin yang ada di kapal ataupun di laut, jadi *tekong* harus bisa mengerti, mengendalikan emosi, atau istilahnya ngemong ABK. Untuk *tekong* sendiri harus memiliki lisesnsi seperti SIM dari Kesatgas Darat, itupun mengikuti beberapa test. Selain itu, *tekong* yang menawarkan diri kepada saya, akan saya lihat apakah memiliki catatan merah selama melaut. Catatan merah bisa berupa ketidakjujuran, emosi yang tidak terkontrol dan hal lainnya. Hal itu juga sama dilakukan untuk memilih ABK, biasanya *tekong* akan membawa ABK yang sudah lama dipercayai dan melakukan kerjasama. Saya akan percaya pada ABK yang dibawa oleh *tekong*. Sama-sama punya kebutuhan, makanya saya butuh mereka, dan mereka juga butuh saya.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017, di kediaman Haji Muklas)

Hubungan kerjasama yang dilakukan antar Haji Muklas dengan ABK serta tekong merupakan salah satu tindakan ekonomi yang memiliki motif untuk membantu ABK dan tekong memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual tenaga dan keahliannya untuk menangkap ikan. Hal ini dibuktikan, seorang juragan kapal yang memiliki banyak kepemilikan modal berupa kapal tidak perlu ikut melaut mengejar ikan. Oleh karena itu, juragan kapal membutuhkan orang yang dapat diandalkan dan dipercaya dalam mengendalikan kapal di laut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa seorang *tekong* lah pemimpin di laut sedangkan juragan hanya berkuasa penuh pada saat kapal berada di darat. Dengan begitu, hubungan kerjasama yang dilakukan melalui tindakan ekonomi akan menguntungkan kedua belah pihak, hanya saja tingkat keuntungan yang didapatkan antar kedua belah pihak berbeda.

Pihak ABK dan *tekong* akan merasa diuntungkan dengan bekerja pada juragan kapal, karena memperoleh bayaran berupa ikan dan juga *tekong* akan berkuasa penuh terhadap ABK. Hasil ikan yang didapat akan dibagi rata dalam sistem penjualan, dengan pembagian 7:3. Dimana 70% hasil akan masuk kepada ABK dan *tekong*, sedangkan 30% hasil akan masuk kepada juragan kapal. Perbedaan keuntungan inilah yang akan banyak dialami oleh juragan kapal yang memiliki banyak kapal. Seperti Haji Muklas yang memiliki 5 kapal berupa 1 kapal *purse seinse* dan 4 kapal cantrang. Dengan banyaknya kapal yang aktif berlayar akan mendapatkan hasil yang banyak juga. Oleh karena itu, Haji Muklas mampu memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 30.000.000,00 setiap bulannya.

Searah dengan tiga proposisi tindakan ekonomi yang merupakan konsep pemikiran Granovetter yaitu tindakan ekonomi masih dipengaruhi oleh orang lain, misalkan terjadi interaksi antar individu, seperti saling bertatap muka, saling berbicara dan saling

berinteraksi secara sosial, maka tindakan ekonomi adalah tindakan sosial. Hal ini terjadi pula pada hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Haji Muklas sebagai juragan, dimana motif untuk melakukan tindakan ekonomi dengan mempekerjakan ABK dan *tekong* selain untuk mendapat keuntungan juga untuk membantu perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Disisi lain, hubungan kerja sama yang dilakukan juga untuk menjaga *power* atau kekuasaan, status, *sociability* dan pengakuan yang dimana dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain akan membuat Haji Muklas semakin disegani dan dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Sehingga dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh Haji Muklas merupakan tindakan ekonomi yang bernilai sosial.

Demikian juga terjadi pada Ibu Tris (35), sebagai nelayan kecil dan juga seorang *pangamba'* yang membangun hubungan dengan ABK. Dimana ABK akan sangat membantu jika musim padang bulan tiba, karena Ibu Tris bekerja sebagai *pangamba'*, sehingga sering menjadikan ABK sebagai pekerja dalam mendistribusikan ikan. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan wawancara sebagai berikut:

“waktu padang bulan kan tidak boleh melaut, sebenarnya tidak apa-apa Cuma beresiko soalnya ombaknya besar sama ikannya itu jarang-jaran, makanya kadang ABK bantu saya distribusi ikan, mengangkut ikan. Soalnya kalau saya tidak memperbolehkan melaut, kapal hanya punya 1, kalau terkena karang bahaya. Rata-rata nelayan disini ya gini, tapi kalau sudah juragan ya tetap saja melaut, kan beda tempatnya.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2017, di pasar ikan)

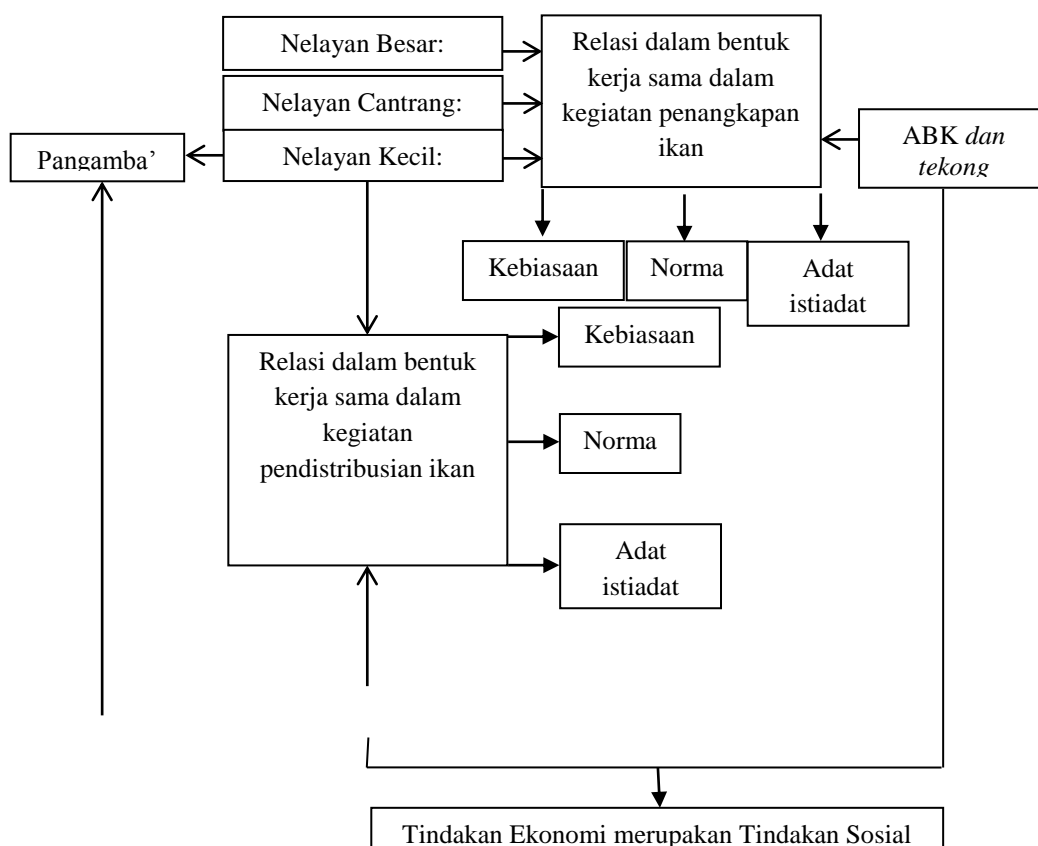
Pernyataan di atas menguatkan pemikiran tentang tindakan ekonomi adalah tindakan sosial, dimana tindakan ekonomi yang dilakukan oleh Ibu Tris di dasari dengan mencari keuntungan yang dibagi kedua belah pihak, sehingga Ibu Tris mempekerjakan beberapa orang sebagai ABK. Namun, ketika musim padang bulan tiba, Ibu Tris mempekerjakan ABK dalam pekerjaan lain, yaitu mendistribusikan ikan, mulai pembersihan ikan hingga pengangkutan. Hal ini diperoleh keinginan lain Ibu Tris dalam membantu ABK ketika

musim padan bulan tiba, dimana hasil tangkapan tidak ada, sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi. Dengan ABK bekerja di bagian distribusi yang tidak berhubungan dengan laut, dapat menghidupkan kembali kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Relasi yang telah terbangun ini tentu sama-sama menguntungkan, dimana ABK memperoleh pemasukan dan juga nelayan kecil yang bekerja sebagai *pangamba'* tetap berjalan dengan bantuan dari ABK yang menjadi relasinya.

5.2.1 Tindakan Ekonomi Merupakan Bentuk Tindakan Sosial

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis tindakan ekonomi dari tiga proposisi Granovetter, yang menyebutkan bahwa tindakan ekonomi adalah bentuk dari tindakan sosial, tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial. Pada proposisi pertama, fenomena tindakan ekonomi merupakan tindakan sosial di Pelabuhan Tanjung Tembaga yang dapat dilihat melalui adanya kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan norma yang dimiliki dalam hubungan sosial yang berlangsung.

Bagan 3: Tindakan Ekonomi Bentuk Dari Tindakan Sosial





(sumber: Data diolah Peneliti, 2017)

Penjelasan mengenai bagan yang ada di atas, terdapat dua hal yang menghubungkan adanya kerjasama. Pertama, sektor perikanan yang dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Kedua, sektor perdagangan dengan cara pendistribusian hasil tangkap melalui proses jual-beli hasil tangkap yang dilakukan oleh nelayan, tengkulak dan juga *pangamba*'. Motif dari nelayan dan ABK serta *tekong* membentuk sebuah relasi kerja sama pada kegiatan penangkapan hasil laut tidak hanya berorientasi untuk mendapat keuntungan ekonomi semata. Terdapat kondisi sosial dari aktor yang melatarbelakangi tindakan ekonomi aktor tersebut, dimana aktor ini merupakan nelayan kecil dan ABK serta *tekong*. Hal ini juga sama terjadi pada tengkulak dengan nelayan yang tidak hanya mencari keuntungan, namun kepercayaan antara kedua belah pihak. Sementara pada nelayan kecil, akan membentuk kerjasama dengan *pangamba*', selain untuk membantu *pangamba*', nelayan kecil beserta ABK akan mendapat pemasukan di saat musim ombak dan padang bulan.

Fenomena terjadinya relasi antara antara aktor dalam bentuk kerja sama dalam kegiatan penangkapan ikan serta pendistribusian ikan, terjadi tidak hanya untuk kebutuhan ekonomi, ada faktor lain, diantaranya keinginan untuk sama-sama mendapat keuntungan, keinginan untuk mendapatkan kepercayaan, dan juga keinginan untuk dihargai. Sehingga dari hubungan yang telah dibentuk akan memunculkan kebiasaan, norma ataupun adat istiadat yang menguatkan bahwa proposisi tindakan ekonomi merupakan tindakan sosial.

Nelayan di daerah Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo merupakan masyarakat dengan budaya pendalungan. Masyarakat Pendalungan sendiri merupakan masyarakat dengan latar budaya campuran Jawa-Madura (Wahjono, 2011, hal. 122). Budaya pendalungan masuk ke dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Tembaga yang berada di pesisir utara Kota Probolinggo, karena kaum pendalungan sebagian besar bermukim di bagian timur Jawa Timur, sehingga aktor nelayan juga memiliki Budaya Pendalungan. Pusat daerah kaum Pendalungan adalah kota Jember, dan tersebar mulai dari pinggiran timur pantai Surabaya terus ke selatan dan menyusur pantai utara Jawa yang berhadapan dengan pulau Madura melewati kota-kota Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga Banyuwangi (kota pelabuhan yang menghadap ke pulau Bali) (Wahjono, 2011, hal. 122).

Masyarakat Pendalungan pun terbagi dalam tiga kelompok (Wahjono, 2011, hal. 128). Kelompok pertama yaitu orang bersuku Jawa yang dibesarkan di daerah-daerah di Pulau Madura. Kelompok ini berbicara dengan dua bahasa yaitu, Jawa dan Madura, yang secara tidak sengaja melahirkan hasil asimilasi dari kedua bahasa tersebut. Kelompok kedua berasal dari keturunan hasil perkawinan Jawa-Madura, yang mana kelompok ini secara historis telah terbentuk sejak 1671 ketika Pangeran Madura, Trunojoyo memberikan Madura kepada prajurit Jawa yang bersatu dengan dia untuk melawan Raja Mataram Jawa Mangkurat I (Wahjono, 2011, hal. 128). Dari historis tersebut, terbentuklah praktek asimilasi budaya dan menjadi Bahasa Pendalungan yang berjalan cepat. Berkembangnya Kelompok Pendalungan semakin cepat ketika Gubernur Inggris Raffles mentransmigrasikan ribuan orang-orang Jawa untuk bekerja dan membuka perkebunan baru di tengah-tengah Gunung Semeru, Argopura, dan Ijen. Namun, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan disana tidak mencukupi, maka pejabat Belanda setelah Raffles

menjabat, meresponnya dengan menambahkan orang-orang Madura (Wahjono, 2011, hal. 128). Kelompok terakhir yaitu, orang Madura yang bermigrasi ke Jawa dengan menyeberangi Selat Madura. Pada kelompok inilah yang menunjukkan orang Madura sekarang tinggal di kota-kota tapal kuda, dimana Pendalungan Probolinggo pada umumnya berasal dari Sampang dan Pamekasan.

Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Pendalungan di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan Jember berbeda dengan Masyarakat Pendalungan di Situbondo dan Bondowoso. Bahasa Jawa kasar (ngoko) digunakan sebagai dialek dengan kosa kata Madura, sehingga Masyarakat Pendalungan di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan Jember terbiasa menggunakan Bahasa Jawa (dengan logat madura) dan Bahasa Madura. Namun, pada Masyarakat Pendalungan di Situbondo dan Bondowoso hanya bisa menggunakan Bahasa Madura saja.

Dari sejarah Masyarakat Pandalungan diatas, disebutkan bahwa nelayan di Kota Probolinggo termasuk dalam kelompok kedua dimana merupakan hasil perkawinan campur antara Jawa-Madura dan juga termasuk dalam kelompok ketiga dimana hampir semua merupakan orang Madura yang bermigrasi ke Jawa dengan menyebrangi Selat Madura. Dengan jenis masyarakat seperti itu, akan terbentuklah suatu karakteristik nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Karakteristik pada nelayan tidak lepas dari adanya percampuran budaya Jawa-Madura atau Budaya Pandalungan. Hal ini juga diungkapkan oleh juragan kapal perihal ABK dan *tekong* yang bekerja dengan beliau, berikut:

“.... *Tekong* itu orang kepercayaan saya. Jadi saya percaya mereka cari ABK yang seperti apa. Kan orang di Probolinggo itu Madura, apalagi kerja jadi nelayan, orangnya pasti keras. Jadi ABK dan *tekong* itu memang banyak yang keras, kalau marah ya langsung ngomong. Tapi saya percaya, karena duanya juga berpengaruh dalam hal misalnya ABK bisa milih *tekong* yang mana. Tekong ini kan pemimpin di laut, jadi harus bisa memimpin, meredam kalau ada yang marah. Sama halnya, tekong bisa memilih mau pakai ABK yang mana. Jadi biasanya dari ABK, kalau mereka rajin, mau belajar, bisa mengendalikan emosi ya saya suruh ikut pelatihan dari Kesatgas biar dapat

SIM, jadi bisa jadi tekong juga. Ada beberapa seperti itu. Soalnya *tekong* harus punya lisensi, harus ahli bukan hanya dalam mengendarai kapal, api juga mengatur emosi ABK lain dan menjadi pemimpin. Kalau di darat, saya pemimpinnya, tapi kalau di laut kan yang memimpin *tekong*. ”
(wawancara dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017, di rumah informan)

Pernyataan diatas menyebutkan beberapa watak dari Masyarakat Pandalungan yang sebagian besar dimiliki oleh nelayan. Watak yang dimiliki sebagian besar adalah watak Madura, yaitu keras, mudah naik darah, tangguh, pekerja keras, namun juga setia. Dalam hal ini, watak tersebut hampir dimiliki oleh ABK dan *tekong* dalam pekerjaan penangkapan ikan ini. Selain itu, sifat setia juga terjadi dalam membangun relasi. Hal ini dibuktikan hampir tidak pernah ABK dan *tekong* yang mengkhianati juragan dengan pergi mencari juragan lain. Sama halnya akan juragan cantrang, dimana kapal cantrang saat itu dilarang namun tidak satupun ABK dan *tekong* pegi meninggalkan juragan, namun mereka semua saling bergantung kepada juragan bahkan turut serta menghadiri demonstrasi baik di Kota Probolinggo maupun di Jakarta. Saat ini pun, di masa transisi mereka pun tetap bekerja pada nelayan cantrang meskipun awal tahun 2018 kapal cantrang sudah di larang.

Sifat-sifat Jawa juga masuk dalam diri Masyarakat Pandalungan, khususnya pada kegiatan penangkapan ikan, seperti fokus dalam pekerjaan dan juga mudah iba seperti yang terjadi pada juragan kapal. Dengan adanya rasa iba, juragan kapal seringkali mengarahkan orang yang datang padanya untuk meminta pekerjaan menjadi ABK. Hal ini tentunya selain adanya rasa iba, dengan menolong diharapkan agar orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya sifat-sifat yang dimiliki, maka timbullah kebiasaan dimana kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang biasa dikerjakan dan dipelajari oleh seorang individu serta dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Kebiasaan tersebut yaitu kerja keras seperti yang dilakukan ABK dan *tekong* untuk mendapat

kepercayaan dari juragan kapal. Kerja keras yang dilakukan adalah mendapatkan hasil tangkap ikan yang sebanyak-banyaknya, bahkan bisa melebihi dari batas yang ditentukan dalam melaut. Selain itu, kepercayaan juga merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh juragan kapal kepada *tekong* dalam menentukan kepemimpinan di laut dan juga memilih ABK.

Akar dari pemikiran Weber dalam proposisi ini juga menjelaskan adanya perilaku orang melalui makna terstruktur dan menginterpretasikannya dalam bentuk norma. Norma sendiri merupakan suatu aturan yang mengikat suatu kelompok sebagai panduan dalam mengendalikan kelompok tersebut. Dalam hal ini, terjadi pada ABK dan tekong yang sangat *mengajeni* atau hormat kepada juragan. Ketika terjadi permasalahan yang tidak bisa terselesaikan antara ABK dan *tekong*, juragan akan terlibat dan memberi keputusan, sehingga ABK dan *tekong* sangat menghormati keputusan dari juragan. Aturan juga terjadi dalam hubungan di sektor pendistribusian ikan antara juragan kapal dan tengkulak. Juragan sangat hormat kepada tengkulak ketika sudah menjadi langganan ataupun ketika tengkulak memberikan bantuan modal kepada juragan. Hal ini dikarenakan, tengkulak telah membantu juragan kapal untuk tetap bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Munculnya kebiasaan, norma atau adat istiadat dalam tindakan ekonomi ini tidak hanya terjadi antar juragan kapal dengan ABK dan *tekong* saja. Namun, dalam hal pendistribusian ikan pun, tengkulak serta *pangamba'* akan membentuk sistem hubungan yang memunculkan suatu kebiasaan, norma atau adat istiadat. Antara tengkulak dan juragan kapal memunculkan kebiasaan atas hubungan yang telah berlangsung. Kebiasaan yang muncul kemudian berkaitan dengan norma atau

aturan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini diungkapkan oleh Mas Alfian (27) sebagai tengkulak, sebagai berikut:

“.... Pasti kalau kerja di tempat seperti ini, pasti kenal dengan siapa saja, mau orang baru atau lama. Ya biasanya kalau nelayan itu tangkapan lagi banyak kan ada ungkapan syukur, biasanya kerumah atau ya kesini bawa sesuatu, kadang nasi, kadang sering kasih bonus ikan. Orang-orang disini ya seperti ini, saling membantu. Saya membeli semua tangkapan, kalau bisa semua setor ke saya, kan itu juga bantuan apalagi di musim seperti ini. Kadang ya misalnya saya punya anak buah, terus juragan butuh ya saya kasih tawaran buat pakai anak buah saya, kadang juga sebaliknya.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017, di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga)

Ungkapan diatas menunjukkan adanya sifat yang merujuk pada masyarakat pandalungan dimana budaya jawa dengan madura mengalami suatu percampuran. Tolong menolong merupakan suatu sifat yang dimiliki orang jawa, yang mana hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam membantu sesama. Namun, dalam budaya madura, menolong bukan hanya kewajiban untuk membantu sesama melainkan untuk mendapatkan hal lain atau balasan kebaikan yang telah diberikan. Hal inilah yang menjadi kebiasaan dalam kegiatan pendistribusian ikan, ketika tengkulak membantu juragan kapal yang kesusahan dalam hal modal, ataupun penempatan anak buah, akan mewujudkan hutang sosial yang dimiliki oleh juragan. Sehingga, juragan akan berbuat seperti demikian untuk tengkulak.

Fenomena ini juga terjadi antara tengkulak dengan *pangamba'*, dimana *pangamba'* merupakan Suku Madura yang tinggal di Pulau Gili Ketapang. Sehingga tengkulak yang merupakan masyarakat Pandalungan dengan budaya Pandalungan akan saling berhubungan dengan Budaya Madura. Sama halnya seperti kebiasaan yang terjadi antara juragan kapal dengan tengkulak, kebiasaan tersebut akan memunculkan suatu norma. Norma yang dimiliki yaitu pembagian hasil tangkapan yang dipesan oleh tengkulak kepada *pangamba'*, dimana ketika tengkulak memesan kepada pangamba' pesanan harus sesuai dengan yang diambil.

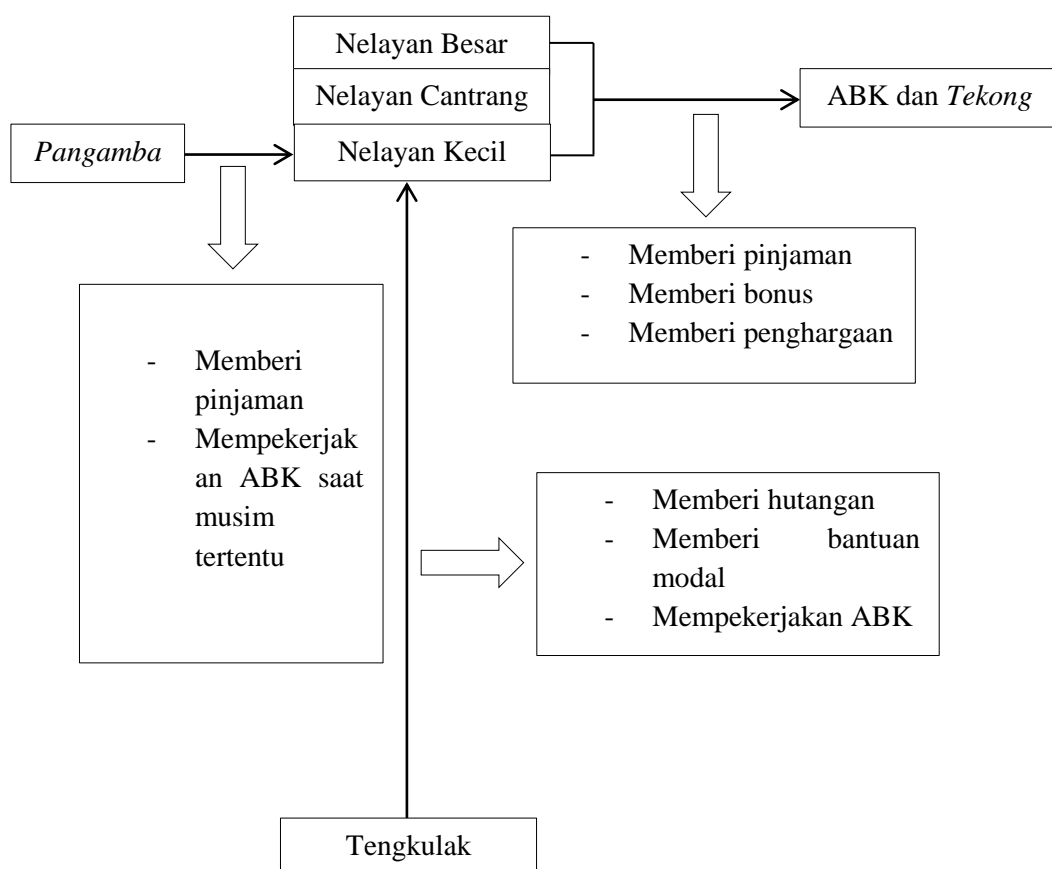
Selain itu, waktu yang diminta pun terjadi karena adanya peraturan yang muncul akibat kebiasaan. *Pangamba'* tidak akan menjual ikan kepada tengkulak diwaktu tengkulak sudah memenuhi target, tengkulak akan datang sendiri kepada *pangamba'* ketika kekurangan hasil tangkap.

Tidak terlepas dari Masyarakat Pandalungan, semua kebiasaan dan aturan merupakan bentuk dari Budaya Pandalungan sendiri yang dimiliki masyarakat nelayan. Sesuai dengan argumentasi dari Granovetter yang mengutip pemikiran dari Weber bahwa tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu bentuk dari tindakan sosial, sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain, misalkan memberi perhatian ini dilakukan secara sosial dalam berbagai cara seperti memperhatikan orang lain, saling bertukar tatap muka ataupun berinteraksi (Damsar, 1997, hal. 44). Selain itu, makna tersebut diinterpretasikan melalui norma, adat istiadat dan kebiasaan, maka tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial.

5.2.2 Tindakan Ekonomi Disituasikan Secara Sosial

Granovetter mengajukan proposisi yang kedua, bahwa tindakan ekonomi merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam proses hubungan sosial yang sedang berlangsung. Tindakan ekonomi ini disituasikan secara sosial dan melekat dalam hubungan sosial personal yang sedang berlangsung. Hubungan yang dilihat dari proposisi kedua ini merupakan suatu interaksi yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum membentuk hubungan. Berikut bagan peneliti dalam menganalisis tindakan ekonomi disituasikan secara sosial, yaitu hubungan sosial yang terjadi aktor nelayan, sebagai berikut:

Bagan 4: Tindakan Ekonomi Disituasikan Secara Sosial



(sumber: Diolah Peneliti, 2017)

Bagan diatas menjelaskan bagaimana tindakan ekonomi merupakan bentuk dari tindakan sosial. Terdapat hubungan sosial personal yang sedang berlangsung antar kedua belah pihak. Hubungan ini merujuk seseorang yang akan melakukan interaksi harus mendefinisikan situasi sosial tertentu terlebih dahulu. Seperti pada gambaran bagan diatas, dapat dilihat juragan kapal, baik nelayan besar, kecil

ataupun cantrang akan melakukan suatu interaksi kepada ABK dan *tekong*. Interaksi tersebut bukan semata-mata tanpa tujuan, namun telah melalui tahapan pendefinisian dalam situasi sosial. Sebelum juragan kapal memulai interaksi sosial, juragan kapal akan memikirkan langkah apa yang harus dilakukan. Memberi pinjaman kepada ABK dan *tekong* berupa uang adalah bentuk interaksi yang telah terdefiniskan. Hal ini dikarenakan dengan memberikan pinjaman akan membuat ABK dan *tekong* semakin terikat dengan juragan kapal, sehingga memunculkan perasaan tidak enak dan lebih menghormati juragan kapal sebagai aktor yang sangat dibutuhkan dengan bekerja lebih giat dan tidak mengkhianati juragan. Peristiwa ini berhubungan dengan dampak di masa transisi pada pelarangan cantrang. Haji Muklas (70) mengungkapkan bentuk interaksi yang telah dilakukan sebagai berikut:

“... ya saat ini keadaan memang lagi kurang ikan. Meskipun peraturan belum direncanakan tetap saja ada pengawasan dari pemerintah. Tidak bisa mengambil ikan banyak. Biasanya saya tahu ada pekerja yang butuh bantuan. Saya beri pinjaman. Disini saling membantu. Saya tahu kalau pekerja juga butuh tambahan, diperhatikan biar kerjanya juga bagus. Saya percayakan juga sama *tekong*, soalnya kan dia yang mengerti..”
(wawancara dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017, di kediaman informan)

Ungkapan diatas menunjukkan juragan kapal mendefinisikan suatu kondisi sosial tertentu sebelum melakukan suatu interaksi. Selain pemberian pinjaman, pemberian penghargaan juga dilakukan. Pemberian penghargaan dimaksudkan menambah semangat bekerja antar ABK dan. Seperti yang terjadi, bahwa *tekong* memiliki peran penting dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. *Tekong* merupakan orang kepercayaan dari juragan kapal yang tidak hanya bisa memimpin, namun juga bisa mengendalikan emosi antar ABK. Keberadaan dua aktor ini (ABK dan *tekong*) sangat dibutuhkan oleh juragan kapal untuk membantu bekerja dalam kegiatan penangkapan ikan, sehingga juragan kapal akan melakukan suatu interaksi sosial terlebih dahulu untuk meningkatkan tujuan yang diinginkan.

Hal ini juga terjadi pada tengkulak yang menjalin hubungan dengan juragan kapal. Dalam relasi ini tidak hanya berfokus pada kegiatan penangkapan ikan namun juga jual beli ikan dalam proses pendistribusian hasil tangkap. Untuk menjalin hubungan dengan tengkulak, tengkulak akan memikirkan jenis interaksi sosial yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pemberian hutang. Hal ini dilakukan untuk mempererat relasi yang akan berlangsung sekaligus memperoleh kepercayaan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhyin (40) sebagai tengkulak, berikut:

“Memang disini kan kebanyakan sistem jual belinya pakai utangan. Itu istilahnya, sebenarnya kita memberi modal ke nelayan besar sama cantrang. Enaknya itu kan kita jadi dapat ikan, jadi langsung pasti dapat. Nah kalau buat nelayan kecil itu kan dulunya tidak pernah ngasih sistem utangan, soalnya saya ambil di nelayan besar dan cantrang itu sudah cukup. Kalau sekarang-sekarang aja ini yang selalu kurang, makanya kadang ada yang saya kasih utangan ke nelayan kecil. Tapi, nelayan kecil ini kalau musim ombak tidak melaut, soalnya kan fasilitas kapalnya kurang memadai, makanya kadang ya saya kasih pinjaman utang. Nanti kalau dikembalikan dalam bentuk ikan dan harganya memang jauh lebih murah dari pasaran.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017, di pasar ikan)

Ungkapan diatas, menjelaskan bahwa dalam membangun relasi kepada juragan kapal dilakukan sistem utangan. Hal ini dimaksudkan agar juragan kapal menjadi percaya kepada tengkulak, sehingga tengkulak menjadi tangan pertama dan pelanggan yang mendapat hasil tangkapan laut. Hal ini sejalan dengan ungkapan Granovetter dimana pelaku melakukan interaksi sosial secara langsung dengan cara mendefinisikan suatu situasi sosial terlebih dahulu. Interaksi sosial yang dilakukan tengkulak adalah berlangganan dengan juragan kapal serta nelayan cantrang agar mendapatkan kepercayaan. Selain itu, dengan membantu juragan kapal dan nelayan cantrang ketika kekurangan modal untuk melaut.

Disisi lain, ketika tengkulak membantu nelayan kecil dalam memberikan utangan di saat musim padang bulan dan ombak. Hal ini dikarenakan, kapal yang dimiliki nelayan kecil tidak memadai untuk melakukan penangkapan ikan di

musim yang berbahaya, sehingga nelayan kecil terkadang menganggur atau bahkan melakukan pekerjaan lain. Dengan bantuan yang diberikan oleh tengkulak, akan membantu pemenuhan kebutuhan hidup dari nelayan kecil. Sehingga, nelayan kecil merasa memiliki utang sosial kepada tengkulak yang akan dibayarkan ketika musim tidak rawan dalam menjual ikan. Dari proses interaksi sosial ini timbullah rasa saling percaya dan saling membutuhkan antara kedua belah pihak, sehingga nelayan kecil akan menjual hasil tangkapannya dengan harga lebih murah kepada tengkulak. Hal ini juga diungkapkan oleh juragan kapal dan nelayan cantrang ketika menjual hasil tangkapannya dengan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Berikut pernyataan juragan kapal dan juga nelayan cantrang:

“Jadi Tengkulak akan memberikan hutang kepada saya, agar saya bisa menjual hasil tangkapan langsung kepada tengkulak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan untung yang saya miliki lebih dikit dan juga ada beban untuk melunasi hutang dalam bentuk pemberian ikan yang dijual lebih murah. Biasanya misalnya, 1 kg ikan dijual dengan harga 15.000, namun karena terikat sistem hutangan akan membuat saya menjual hanya dengan 10.000 saja. Dulu saya seperti itu, kalau sekrang saya jual bebas. Soalnya saya punya 5 kapal, buat apa terikat.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017, di kediaman Haji Muklas)

Pernyataan diatas tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan muncul ketika terjadi interaksi sosial antara kedua belah pihak. Seperti yang dikatakan Haji Muklas, dimana beliau akan menjual harga yang lebih murah kepada tengkulak karena terikat dengan utang yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini membuktikan pernyataan Granovetter bahwa tindakan ekonomi merupakan hasil dari proses yang dilakukan dalam membangun hubungan sosial yang sedang berlangsung dan dapat dikatakan bahwa tindakan ekonomi akan selalu melekat dalam hubungan sosial persona yang sedang berlangsung.

Pendefinisian interaksi ini juga terjadi antara nelayan kecil yang bekerja sebagai *pangamba'* kepada ABK dan *tekong*. Ketika musim padang bulan tiba atau musim ombak, nelayan kecil tidak akan mendapatkan penghasilan dari melaut karena tidak mempunyai kapal keluar jalur dari Selat yang ditentukan. Sehingga, nelayan kecil akan bekerja sebagai *pangamba'*, yang akan mempekerjakan ABK serta *tekong* dalam hal pengangkutan ikan hingga pendistribusian. Hal ini dimaksudkan bukan untuk semerta-merta menghidupi kebutuhan ekonomi ABK dan *tekong*. Namun, supaya ABK dan *tekong* tetap setia kepada nelayan kecil agar bisa bekerja lagi padanya ketika musim ombak dan padang bulan berakhir.

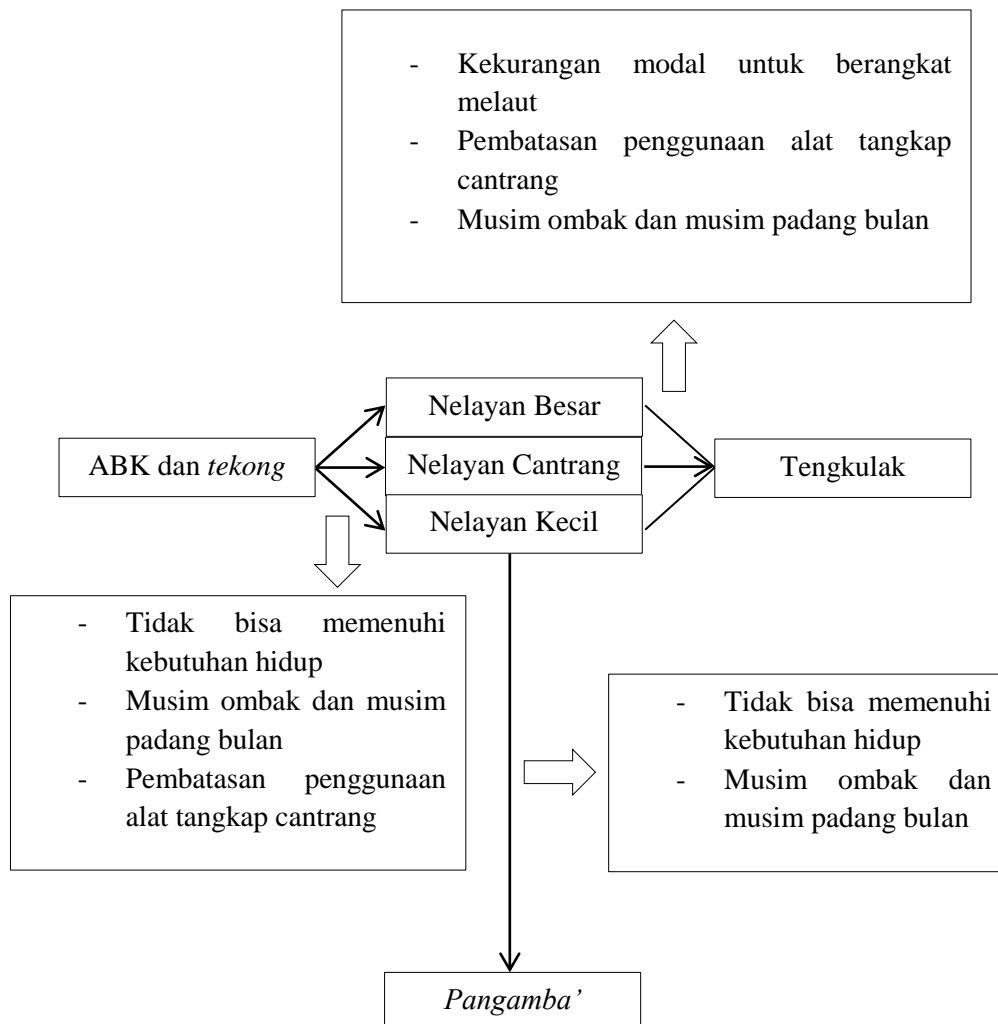
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proposisi kedua, Granovetter akan menjelaskan tindakan ekonomi yang merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam proses hubungan sosial yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi antara tengkulak, nelayan besar, nelayan cantrang, nelayan kecil dan juga *pangamba'* yang akan melakukan proses hubungan sosial dimulai dengan melakukan interaksi sosial yang menguatkan relasi yang telah terbangun. Dengan saling membantu, akan memunculkan kepercayaan antar aktor yang terlibat, inilah yang didefinisikan oleh Granovetter dimana pelaku akan melakukan suatu interaksi sosial secara langsung dengan cara melihat suatu situasi sosial terlebih dahulu. Hal inilah, yang kemudian disebutkan bahwa tindakan ekonomi akan disituasikan secara sosial dan melekat dalam hubungan sosial personal yang sedang berlangsung.

5.2.3 Institusi Ekonomi Dikonstruksi Secara Sosial

Proposisi yang terakhir dari Granovetter adalah dengan melihat bahwa institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial. Hal ini berawal dari pendapat Berger dan Luckman (1996) yang menjelaskan bahwa institusi ekonomi bukan suatu jenis

dari seperangkat realitas eksternal yang nampak namun berasal dari kreasi yang terjadi perlahan-lahan, dengan proses pengentalan kreasi ekonomi dan menjadi kiat dalam melakukan sesuatu (Damsar, 1997, hal. 33). Dalam kreasi ekonomi ini, terdapat suatu interaksi sosial yang terjadi. Interaksi sosial ini terjadi karena adanya kondisi kritis yang mewajibkan terjadinya relasi. Dalam kondisi ini, dapat dilihat bagaimana pihak yang kecil membutuhkan pihak yang besar. Berikut bagan peneliti dalam menganalisis tindakan ekonomi disituasikan secara sosial, yaitu hubungan sosial yang terjadi aktor nelayan, sebagai berikut:

Bagan 5: Institusi-institusi Ekonomi Dikonstruksikan Secara Sosial



(sumber: Diolah Peneliti, 2017)

Bagan diatas menunjukkan proposisi ketiga, yaitu institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial. Fenomena yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Tembaga, yaitu ketika ABK/ *tekong* membutuhkan juragan kapal dalam membangun hubungan. Kebutuhan tersebut diakibatkan adanya situasi kritis, sehingga orang tersebut akan menghasilkan suatu kreasi sosial yang terjadi secara perlahan. Kondisi kritis tersebut salah satunya terjadi pada ABK dan *tekong* yang bekerja pada juragan kapal cantrang. Saat itu terdapat kondisi kritis dimana kapal cantrang mulai diawasi oleh pihak kelautan yang menyebabkan turunnya hasil tangkap. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi ABK dan *tekong*, sehingga sesuai dengan pembahasan latar budaya pada proposisi pertama yang menyebutkan bahwa jarang sekali ABK/ *tekong* mengkhianati juragannya, maka ABK dan *tekong* akan meminta tolong langsung kepada juragan. Seperti yang diungkapkan oleh juragan kapal berikut:

“... Iya, ada pelarangan dari Bu Susi beberapa waktu lalu, untuk di Probolinggo sendiri pemilik kapal cantrang tidak banyak, hanya sekitar 90 kapal. Tapi peraturan ini agak seenaknya, dengan kata lain tidak memikirkan solusi apa yang harus dilakukan. Kelihatannya pemerintah tidak mengerti kalau dilarang, mau diganti apa, mau kerja apa, kan tidak memikirkan sampai kesana. Katanya ada pemberian modal, tapi masyarakat akan bingung mau diapakan modalnya, ujung-ujungnya habis ditengah jalan, tapi kewajiban membayar tiap bulan terus berjalan. Makanya beberapa masyarakat di Probolinggo, nelayan cantrang, keluarganya, beberapa pedagang yang berhubungan ke Jakarta untuk mengikuti demo. Namun, ujung-ujungnya pendamaian kedua belah pihak lewat pemberian modal yang nihil hasilnya dan perubahan alat tangkap dengan memakai jaring insang. Saya kan juga bingung, yang kerja sama saya kan kasihan juga. Jadi ada yang beberapa saya arahkan untuk sementara kerja membenarkan kapal, kadang saya suruh kerja sama kenalan saya, saya sauruh ikut”

(wawancara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017, di kediaman informan)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa situasi kritis muncul ketika pelarangan cantrang mulai direncanakan. Dengan hubungan kerjasama yang telah terjalin, ABK dan *tekong* merasa khawatir untuk melanjutkan pekerjaannya ketika akan terjadi pelarangan. Sehingga, yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada

juragan kapal. Haji Muklas sendiri merupakan seorang juragan kapal yang memiliki 4 kapal cantrang dan satu kapal purse seinse. Peraturan yang akan dimunculkan tentu membuat Haji Muklas mulai mengatur kembali dalam kegiatan penangkapan ikan. ABK dan tekong yang meminta bantuan pun, diarahkan kepada pekerjaan lain, seperti memperbaiki kapal yang rusak, memperbaiki jaring tangkap hingga mengajak bekerja pada nelayan lain yang dikenalnya. Sehingga dalam peristiwa itu, ABK dan *tekong* akan menambah nilai prestasinya terhadap juragan kapal.

Lain halnya dengan pelarangan cantrang, kondisi kritis juga terjadi ketika ABK dan *tekong* kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, kebutuhan tersebut mengarahkan untuk berhubungan dengan juragan kapal. Kondisi kritis juga menimpa pada ABK dan *tekong* ketika di musim padang bulan atau ombak dimana mereka tidak bisa bekerja. Dalam hal ini, dilakukan hubungan yang baik dan terarah pada nelayan kecil agar tetap mendapat bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Fenomena yang terjadi tidak hanya pada ABK dan *tekong* terhadap juragan, melainkan juga terhadap juragan kapal dengan tengkulak. Interaksi ini menunjukkan ada suatu keterhubungan yang muncul dengan mengarahkan tindakannya untuk membantu seseorang di waktu yang sulit. Seperti ketika tengkulak memberikan hutang kepada nelayan ketika musim ombak atau kekurangan modal untuk melaut. Dengan membantu, diharapkan nelayan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, sehingga dalam peristiwa ini, tengkulak akan mendapatkan nilai yang tinggi di mata nelayan. Hal ini akan membuat hubungan antar nelayan dan tengkulak memiliki nilai sosial dan moral, dimana nelayan akan menghargai tengkulak dengan memberikan ikan yang berharga

murah, ataupun memperkenalkan seseorang dari suatu perusahaan untuk membeli ikan pada tengkulak tersebut. Peristiwa ini dimunculkan dengan tindakan yang membantu pihak tertentu, untuk mendapatkan penghargaan dan juga kedudukan di mata pihak yang di bantu. Fenomena ini sejalan dengan pemikiran Granovetter dalam proposisi ketiganya yang menyebutkan bahwa institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial.

Peristiwa yang ketiga terjadi kepada nelayan kecil yang juga berprofesi sebagai *pangamba* ketika membangun relasinya dengan ABK dan *tekong*. Dimana ketika nelayan kecil mengalami libur sementara untuk tidak melaut yang berdampak pada tidak bekerjanya ABK dan tekong, akan membuat tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, nelayan kecil akan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu dalam pendistribusian ikan. Hal ini akan menjalankan kembali aktivitas untuk memperoleh pendapatan.

Dalam kesimpulan pada proposisi ketiga, terdapat pihak yang dominan juga yang lemah. Dimana pihak dominan akan membantu pihak yang lemah karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan. Granovetter juga menjelaskan, hasil dari kreasi sosial ini akan terjadi secara perlahan, sehingga dapat diarahkan tindakannya kepada seperangkat aktivitas. Hal ini menyebabkan, pihak yang membantu akan mendapat nilai lebih atau prestasi dari pihak yang terbantu, sehingga muncullah nilai sosial dan moral yang lebih dari sekedar hubungan yang dimiliki.

5.3 Bentuk Keterlekatan Antara Aktor di Pelabuhan Tanjung Tembaga

Untuk mengawali pembahasan, dapat diambil sedikit penjelasan dalam bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa menurut Granovetter bentuk-bentuk keterlekatan

dibagi menjadi dua yaitu, keterlekatan relasional dan keterlekatan struktural, dua keterlekatan ini memiliki aturan dan konsep. Keterlekatan relasional merupakan tindakan ekonomi yang lebih personal diantara kedua aktor yang melibatkan aspek etnis, budaya, agama, sosial dan politik dalam kehidupan para aktor, sedangkan keterlekatan struktural merupakan keterlekatan yang terjalin dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas dan di dalamnya terdapat aturan-aturan yang disepakati bersama. Dalam keterlekatan relasional yang merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung diantara para aktor, dalam kenyataan di lapangan, keterlekatan relasional sebagai keterlekatan yang dominan terjalin antara aktor, seperti nelayan besar dengan ABK dan *tekong*, nelayan cantrang dengan ABK dan *tekong* serta nelayan kecil dengan ABK dan *tekong*. Hubungan personal dan kedekatan para aktor yang sangat kuat terlihat dari rasa saling percaya antara nelayan dan ABK serta *tekong* menjadi faktor terus berjalannya relasi dalam kegiatan penangkapan ikan. Hal ini diungkapkan oleh Haji Muklas (70) sebagai juragan kapal, berikut:

“Kalau untuk pekerja yang akan kerja kepada saya, baik itu ABK ataupun Tekong bahasanya kalau disini, bahasa Indonesianya nahkoda itu tergantung kepada mereka. Jadi semisalnya, untuk memilih Tekong, saya bisa menawarkan orang yang datang pada saya, ataupun ABK yang memilih dengan sistem voting. Bilapun saya sudah punya, tetap harus persetujuan ABK, karena Tekong kan pemimpin yang ada di kapal ataupun di laut, jadi Tekong harus bisa mengerti, mengendalikan emosi, atau istilahnya ngemong ABK. Untuk Tekong sendiri harus memiliki lisesnsi seperti SIM dari Kesatgas Darat, itupun mengikuti beberapa test. Selain itu, Tekong yang menawarkan diri kepada saya, akan saya lihat apakah memiliki catatan merah selama melaut. Catatan merah bisa berupa ketidakjujuran, emosi yang tidak terkontrol dan hal lainnya. Hal itu juga sama dilakukan untuk memilih ABK, biasanya Tekong akan membawa ABK yang sudah lama dipercayai dan melakukan kerjasama. Saya akan percaya pada ABK yang dibawa oleh Tekong.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2017, di kediaman informan)

Berangkat dari adanya rasa saling membutuhkan antara nelayan dengan ABK dan *tekong*, terbentuklah relasi kegiatan penangkapan ikan di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Dalam kegiatan penangkapan ikan nelayan menyediakan modal berupa kapal dan alat

melaot serta modal untuk kegiatan melaot. Sedangkan *tekong* bertugas untuk memimpin kegiatan melaot dan ABK akan menyediakan tenaga untuk mengambil ikan. Tidak hanya itu, munculnya suatu kesamaan budaya Pandalungan menjadi satu aspek yang mendorong terjalinnya hubungan interpersonal.

Kepercayaan yang terjalin dalam relasi antara nelayan dengan ABK dan *tekong* terlihat pada tindakan ABK dan *tekong* yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kedua aktor sama-sama percaya bahwa tindakan ekonomi yang dilakukan baik sama-sama memiliki motif untuk mendapat keuntungan. Kemudian ditambah lagi dengan motif-motif yang lain diantara keduanya mengakibatkan rasa kepercayaan antara nelayan dengan ABK serta *tekong* semakin kuat dalam melakukan tindakannya.

Tindakan kerjasama yang dilakukan nelayan dengan ABK dan *tekong* didasari oleh hubungan personal, dimana sesuai pernyataan Haji Muklas (70), bahwa beliau telah mengenal setidaknya satu orang *tekong* karena ada kesamaan baik dari daerah, agama, sosial ataupun budaya. Dari hal tersebut, juragan akan memberikan kebebasan kepada *tekong* untuk memilih ABK yang akan diajak bekerjasama, hal ini juga berlaku sebaliknya. Sehingga, bentuk keterlekatan yang terjadi antar nelayan besar, cantrang dan kecil dengan ABK dan *tekong* adalah keterlekatan relasional.

Keterlekatan relasional juga terjadi pada juragan kapal dengan tengkulak, karena adanya kesamaan dalam hal budaya, agama hingga aspek sosial. Sehingga, bantuan seringkali didapatkan terlebih dalam situasi yang kritis karena adanya klientasi diantara kedua belah pihak. Sama halnya dengan *pangamba'* dan nelayan kecil, yang mana hubungan terbentuk karena adanya kesamaan dan juga karena terikatnya interaksi yang telah terjadi.

Berbeda dengan keterlekatan relasional, keterlekatan struktural terjadi dalam suatu jaringan yang luas. Jaringan ini dapat berupa institusi ataupun struktur sosial. Dalam hal

ini keterlekatan struktural dapat dilihat dengan hubungan yang terbentuk didalamnya yang memunculkan norma atau aturan tertentu. Hubungan tersebut bukan lagi hubungan yang interpersonal, namun sudah mencakup sistem yang ada di sektor perikanan dan pendistribusian ikan di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Seperti, kemunculnya sistem pembagian upah, sistem pelunasan hutang sosial dan juga sistem pembelian ikan.

Sehingga, dari penjelasan analisis mengenai bentuk keterlekatan yang terjadi dalam kegiatan penangkapan ikan dan pendistribusian ikan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa relasi yang terjadi adalah sebuah bentuk keterlekatan relasional. Relasional yang dimaksud adalah hubungan personal yang terjadi antar aktor yang melibatkan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Kerja sama yang saling mendapatkan keuntungan menciptakan hubungan yang kuat dalam tindakan kerja sama di Pelabuhan Tanjung Tembaga.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan pergeseran relasi pada tindakan ekonomi-sosial nelayan pada masa transisi pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Maka hasil dari penelitian ini, yaitu:

Pergeseran relasi terjadi dimana tengkulak yang saat dulu hanya mengambil hasil tangkapan dari nelayan besar dan nelayan cantrang, kini membangun relasi dengan nelayan kecil untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan dan pembatasan hasil tangkapan laut yang dilakukan oleh nelayan cantrang, sehingga mengakibatkan tengkulak semakin hari mengalami penurunan hasil tangkap untuk didistribusikan. Sehingga, tengkulak saat ini menguasai pasar ikan di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, dengan memberi kesempatan kepada nelayan besar, nelayan kecil, nelayan cantrang, tengkulak lainnya dan *pangamba'* untuk menjual hasil tangkapan.

Jenis keterlekatan yang terjadi pada masa transisi ini adalah keterlekatan relasional dimana relasi ini terjadi karena adanya hubungan personal antar aktor dengan melibatkan aspek sosial, ekonomi dan budaya Pandalungan di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.

6.2 Saran

- a. Bagi Nelayan Cantrang

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, nelayan cantrang dapat menjalankan aturan Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang dengan adanya pendampingan dari pemerintah. Selain itu, nelayan cantrang dapat melakukan pergantian alat tangkap dengan solutif dan aman.

b. Bagi Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur

Pemerintah bisa mengevaluasi dampak dari diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan yang akan berhubungan dengan Peraturan Pemerintahan No 02 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Altat Tangkap Cantrang. Perubahan peraturan ini akan berdampak pada kehidupan sosial nelayan, karena jika tahun sebelumnya Dinas Perikanan dibantu dengan Ilmu Kelautan, saat ini Ilmu Kelautan menjadi kewenangan Provinsi yang dahulu berwenang akan 4-12 mil wilayah laut, kini diperluas menjadi 0-12 mil. Sehingga implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut di tiap daerah, terlebih lagi dalam pelarangan cantrang dibutuhkan Ilmu Kelautan di daerah untuk memberlakukan pemberdayaan dan juga kelompok kerja. Oleh karena itu, saran bagi pemerintah, diharapkan dapat mengevaluasi dan memberlakukan pendampingan pada nelayan cantrang.

c. Bagi Dinas Perikanan Kota Probolinggo

Dinas Perikanan Kota Probolinggo dapat mengevaluasi peraturan yang akan dijalankan. Serta, tidak hanya melakukan sosialisasi, namun juga bisa melakukan pendampingan, pemberdayaan dan pengawasan.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan ada penelitian yang mengangkat dampak dari peraturan pemerintah saat Permen No 02 Tahun 2015 telah dilaksanakan. Selain itu, dapat fokus melihat

otonomi daerah di bidang sosiologi pembangunan yang memicu terjadinya konflik antar aktor. Oleh karena itu, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang serupa, agar dapat mengembangkan hasil penelitian yang telah diperoleh, sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang nelayan dan manfaat bagi Ilmu Sosial, terutama Sosiologi Ekonomi dan Otonomi Daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di antara Lima Pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar, M. (1997). *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hurlock, E. (2003). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kinseng, R. A. (2014). *Konflik Nelayan*. Jogjakarta: Obor.
- KKP.go.id. (2016). *Kementrian Kelautan dan Perikanan RI Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap*. Dipetik April 20, 2017, dari KKP Perbolehkan Alat Penangkap Ikan Cantrang Sampai Dengan Desember 2016: <http://www.djpt.kkp.go.id>
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: LkiS.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi. (1997). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prof Damsar, M. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Ir. La Sara, M. P. (2014). *Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Swedberg, R. (2003). *Principles of economic sociology*. United Kingdom: Princeton University Press.

Jurnal

- Andryana, M. R. (2015). Strategi Adaptasi Nelayan dalam Menghadapi Peraturan Pelarangan Cantrang. *Repository IPB*.
- Julianto, F. J. (2016). Fenomena Kemiskinan Nelayan: Perspektif Teori Strukturasi. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol 12 No. 02 2016.

- Kafi, D. (2010). Tindakan Ekonomi dan Keterlekatan Pondok Pesantren dengan Santri Karyawan (Studi Kasus Santri Karyawan yang Bekerja Pada Unit Usaha AIDRAT di Pondok Pesantren Sunan Drajat, banjaranyar, Paciran, Lamongan). *Academia.edu*
- Kristanto, J. W. (2016). Keterlekatan Pada Tindakan Ekonomi Nelayan Kelompok Bina Lestari Pada Kegiatan Penangkapan Ikan Dalam Upaya Pemanfaatan Nilai Ekonomi Lingkungan di Pesisir Pantai Tamban (Studi Kasus di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab Malang). *Universitas Brawijaya*.
- Sadwewo, D. W. (2010). Analisa Morfologi Perbedaan Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Dengan Menggunakan Sample Pantai Marina dan Pantai Parangtritis. *GMRP-BADP-002-27*.
- Wahjono, S. I. (2011). Aktualisasi Budaya Pendalungan Untuk Kesenambungan Perusahaan Keluarga Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional. 122.
- Widjajanti, W. W. (2013). PENATAAN PERMUKIMAN NELAYAN DI PANTAI MAYANGAN PROBOLINGGO JAWA TIMUR. *Simposium Nasional RAPI XII - 2013 FT UMS*.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016 Tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Untuk Mengatur Perluasan Kewenangan Provinsi di Sektor Kelautan

Akses Online

<https://tirto.id/sampai-kapan-polemik-larangan-cantrang-cCwq>

kotaprobolinggo.bps.go.id

dkp.jatimprov.go.id

kompas.com mengenai perbedaan kultur nelayan pesisir selatan dengan nelayan pesisir utara versi Menteri Susi Pudjiastuti

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Guide Interview

A. Pedoman wawancara dengan nelayan besar

1. Menurut anda bagaimana kondisi ekonomi nelayan kecil di Pelabuhan Tanjung Tembaga?
2. Apa yang melatarbelakangi anda bekerja sama dengan nelayan kecil dalam kegiatan penangkapan ikan?
3. Berapakah modal yang diperlukan untuk kegiatan melaut dalam sehari?
4. Apakah terhadap modal yang dikeluarkan, anda selalu mendapatkan keuntungan?
5. Apakah hasil melaut yang telah diperoleh dapat mencukupi kebutuhan hidup anda dan keluarga?
6. Berapakah rata-rata pendapatan anda dalam sebulan?
7. Bagaimana penggunaan teknologi yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan?
8. Apakah alat-alat penangkapan ikan yang anda sediakan sudah memadai?
9. Biasanya dalam sekali melaut berapa jumlah nelayan yang terlibat?
10. Apakah terdapat pembatasan wilayah dalam penangkapan ikan?
11. Hambatan apa saja yang ditemui saat kegiatan melaut?
12. Apa kegiatan anda sehari-hari bila musim ombak besar tiba?
13. Jika musim ombak besar tiba, apakah yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup anda?
14. Jika hasil tangkapan nelayan kecil melimpah, apa yang anda lakukan?
15. Bagaimana hubungan anda dengan tengkulak?
16. Bagaimana mekanisme penjualan hasil tangkapan ikan yang telah diperoleh dan dijual kemanakah ikan tersebut?
17. Apakah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dipercaya dapat memperlancar kegiatan penangkapan ikan?
18. Apakah terdapat kegiatan arisan atau simpan pinjam yang dilakukan antar masyarakat nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga?
19. Apakah terdapat kebiasaan yang menjadi ciri khas nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga dalam menangkap ikan?
20. Apakah terdapat sistem kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam kegiatan nelayan?
21. Bagaimana pendapat anda ketika diberlakukannya Permen KPP No. 2 Tahun 2015?
22. Adakah bentuk kerjasama yang anda lakukan dengan nelayan cantrang?

B. Pedoman wawancara dengan nelayan kecil

1. Berapa modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam sekali melaut?
2. Biasanya berapa jumlah nelayan yang terlibat dalam sekali melaut?
3. Bagaimana pembagian tugas saat kegiatan melaut atau menangkap ikan?
4. Bagaimana kondisi alat untuk menangkap ikan?

5. Bagaimana penggunaan teknologi dalam kegiatan menangkap ikan?
6. Bagaimana mekanisme penjualan hasil tangkapan ikan yang telah diperoleh dan dijual kemanakah ikan tersebut?
7. Apa yang anda lakukan bila hasil tangkapan kurang?
8. Faktor apa saja yang menjadi hambatan saat melaut?
9. Apa yang anda lakukan saat musim ombak besar?
10. Apakah ada profesi lain selain anda menjadi nelayan?
11. Bagaimana anda memenuhi kebutuhan hidup saat musim ombak besar/musim paceklik?
12. Apakah hasil melaut yang telah diperoleh dapat mencukupi kebutuhan hidup anda?
13. Berapakah rata-rata pendapatan anda dalam sebulan?
14. Apa yang mendorong anda bekerja sama dengan nelayan besar dalam kegiatan penangkapan ikan?
15. Apakah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dipercaya dapat memperlancar kegiatan penangkapan ikan?
16. Apakah terdapat kegiatan arisan atau simpan pinjam yang dilakukan antar masyarakat nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga?
17. Apakah terdapat kebiasaan yang menjadi ciri khas nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga dalam menangkap ikan?
18. Apakah terdapat sistem kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam kegiatan nelayan?
19. Bagaimana pendapat anda ketika diberlakukannya Permen KPP No. 2 Tahun 2015?
20. Adakah bentuk kerjasama yang anda lakukan dengan nelayan cantrang?

C. Pedoman wawancara dengan Nelayan Cantrang

1. Sejak kapan anda menggunakan alat tangkap cantrang?
2. Berapa banyak anda mempekerjakan nelayan buruh dalam kegiatan penangkapan ikan?
3. Bagaimana bentuk kerjasama anda dengan nelayan besar dan nelayan kecil?
4. Bagaimana ketika musim paceklik tiba?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang Permen No 2 Tahun 2015?
6. Apakah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo pernah melakukan sosialisasi terkait Peraturan menteri?
7. Berapakah modal yang diperlukan untuk kegiatan melaut dalam sehari?
8. Apakah terhadap modal yang dikeluarkan, anda selalu mendapatkan keuntungan?
9. Apakah hasil melaut yang telah diperoleh dapat mencukupi kebutuhan hidup anda dan keluarga?
10. Berapakah rata-rata pendapatan anda dalam sebulan?
11. Bagaimana penggunaan teknologi yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan?
12. Apakah alat-alat penangkapan ikan yang anda sediakan sudah memadai saat ini?

13. Biasanya dalam sekali melaut berapa jumlah nelayan yang terlibat?
14. Apakah terdapat pembatasan wilayah dalam penangkapan ikan?
15. Hambatan apa saja yang ditemui saat kegiatan melaut?
16. Bagaimana hubungan anda dengan tengkulak?
17. Bagaimana mekanisme penjualan hasil tangkapan ikan yang telah diperoleh dan dijual kemanakah ikan tersebut?
18. Apakah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dipercaya dapat memperlancar kegiatan penangkapan ikan?
19. Apakah terdapat kegiatan arisan atau simpan pinjam yang dilakukan antar masyarakat nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga?
20. Apakah terdapat kebiasaan yang menjadi ciri khas nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga dalam menangkap ikan?
21. Apakah terdapat sistem kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam kegiatan nelayan?

D. Pedoman wawancara dengan *Pengamba*’

1. Apa yang anda lakukan ketika suami pulang dari laut?
2. Bagaimana pembagian pemilahan ikan?
3. Berapa banyak anda mempekerjakan ibu-ibu dalam kegiatan pemilahan ikan?
4. Dalam bentuk apa kerjasama yang anda lakukan dengan tengkulak?
5. Apa yang anda lakukan ketika musim ombak/ paceklik tiba?
6. (Untuk Istri Nelayan cantrang) Bagaimana pendapat anda tentang Permen No 2. Tahun 2015?
7. Apakah anda mengikuti kegiatan arisan? atau simpan pinjam ke bank/ rentenir?

E. Pedoman Wawancara dengan Tengkulak

1. Bagaimana bentuk hubungan anda dengan nelayan??
2. Berapa banyak anda membeli hasil tangkapan kepada nelayan?
3. Berapa banyak modal yang anda keluarkan untuk membeli tangkapan?
4. Berapa harga hasil tangkapan yang akan anda jual?
5. Berapa penghasilan anda selama sebulan?
6. Bagaimana jika nelayan mengalami musim paceklik?
7. Bagaimana anda mendistribusikan hasil tangkapan?

F. Pedoman Wawancara dengan Pemerintah

1. Apakah anda sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan akan Permen?
2. Apakah ada pendampingan?
3. Dalam bentuk seperti apa?
4. Apa yang terjadi jika nelayan cantrang melanggar peraturan?

Lampiran 2. Foto-Foto Penelitian di Pelabuhan Tanjung Tembaga

1. Kegiatan sehari-hari di pasar ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga



Sumber: dokumentasi pribadi, oleh peneliti, 2017

2. Parkiran kapal di Pasar Ikan Pelabuhan Tanjung Tembaga





Sumber: dokumentasi pribadi, oleh peneliti, 2017

3. Pengolahan hasil laut



Sumber: dokumentasi pribadi, oleh peneliti, 2017